

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Kota Probolinggo

Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah kota di wilayah bagian Utara Propinsi Jawa Timur. Terletak antara jalur Jalan Surabaya/Malang – Banyuwangi dan Jember/Lumajang. Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan dan 29 kelurahan yaitu Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kedopak.

Secara geografis daerah ini terletak antara 7°43'41" sampai 7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10' sampai 113°15' Bujur Timur dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran, dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

Tabel 4. 1 Pembagian Kecamatan Dirinci Per Kelurahan di Kota Probolinggo

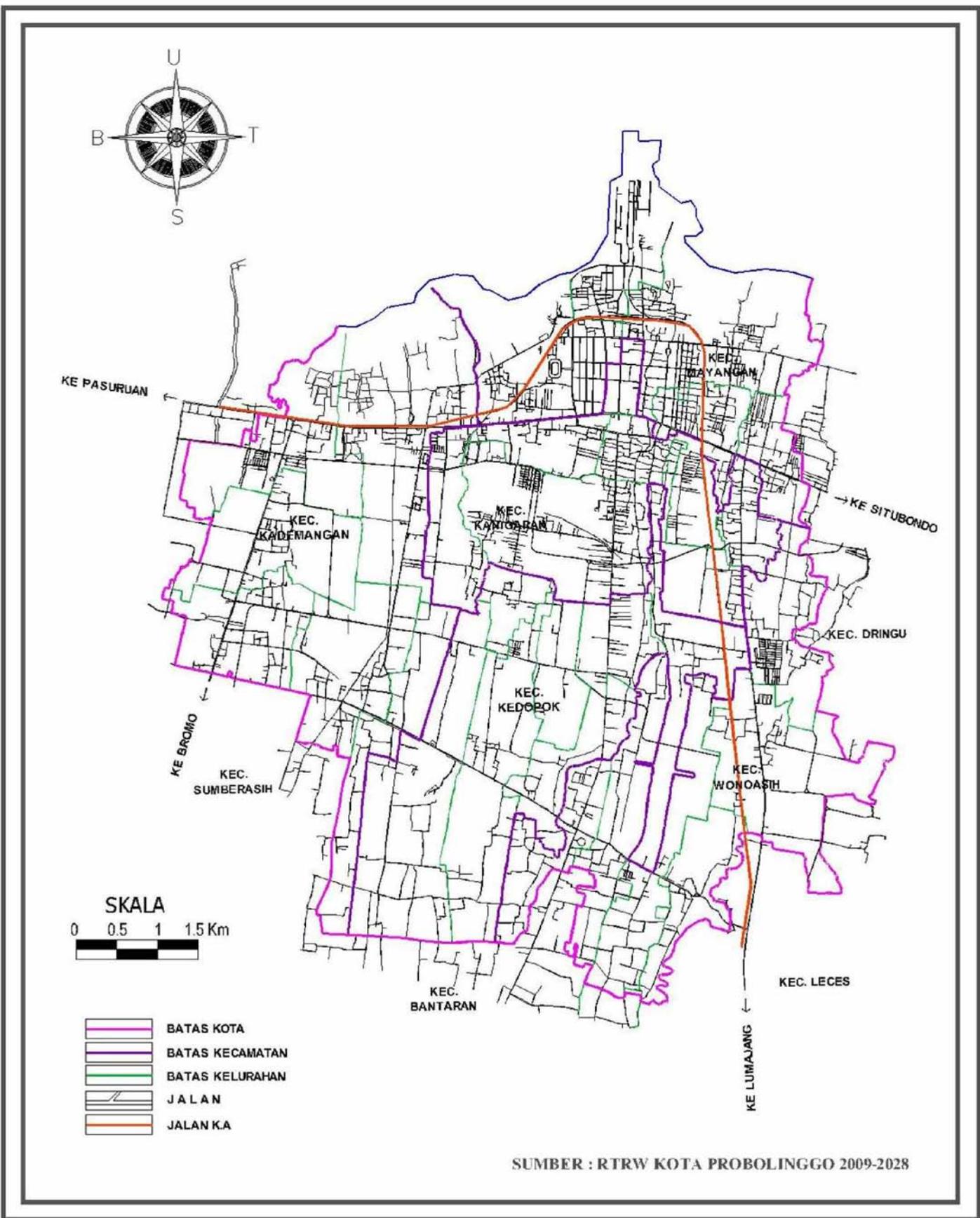
No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Mayangan		
	1. Mayangan	1.276	10.799
	2. Sukabumi	1.487	11.055
	3. Mangunharjo	3.455	19.609
	4. Jati	1.246	14.617
	5. Wiroborang	1.191	6.279
	Jumlah	8.655	62.359
2	Kanigaran		
	1. Tisnonegaran	2.479	5.657
	2. Curahgrinting	1.269	3.548
	3. Kanigaran	3.427	17.564
	4. Kebonsari Kulon	1.558	15.290
	5. Kebonsari Wetan	976	4.922
	6. Sukoharjo	944	6.995
	Jumlah	10.653	53.976
3	Kademangan		
	1. Kademangan	2.130	6.912
	2. Pilang	3.068	5.695
	3. Ketapang	2.051	6.579
	4. Triwung Lor	2.077	5.788
	5. Triwung Kidul	1.763	7.586
	6. Pohsangit Kidul	1.665	4.744
	Jumlah	12.754	37.304

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
4	Wonoasih		
1.	Wonoasih	843	3.555
2.	Jrebeng Kidul	1.970	4.775
3.	Pakistaji	1.855	4.758
4.	Kedunggaleng	1.298	2.542
5.	Kedungasem	3.145	7.049
6.	Sumber Taman	1.870	9.291
	Jumlah	10.981	31.970
5	Kedopok		
1.	Sumber Wetan	4.876	5.253
2.	Kareng Lor	2.345	4.754
3.	Jrebeng Kulon	1.530	4.120
4.	Jrebeng Wetan	905	3.136
5.	Jrebeng Lor	2.866	8.836
6.	Kedopok	1.102	3.450
	Jumlah	13.624	29.549
	Jumlah Keseluruhan	56.667	215.158

Sumber : RTRW Kota Probolinggo 2009-2028

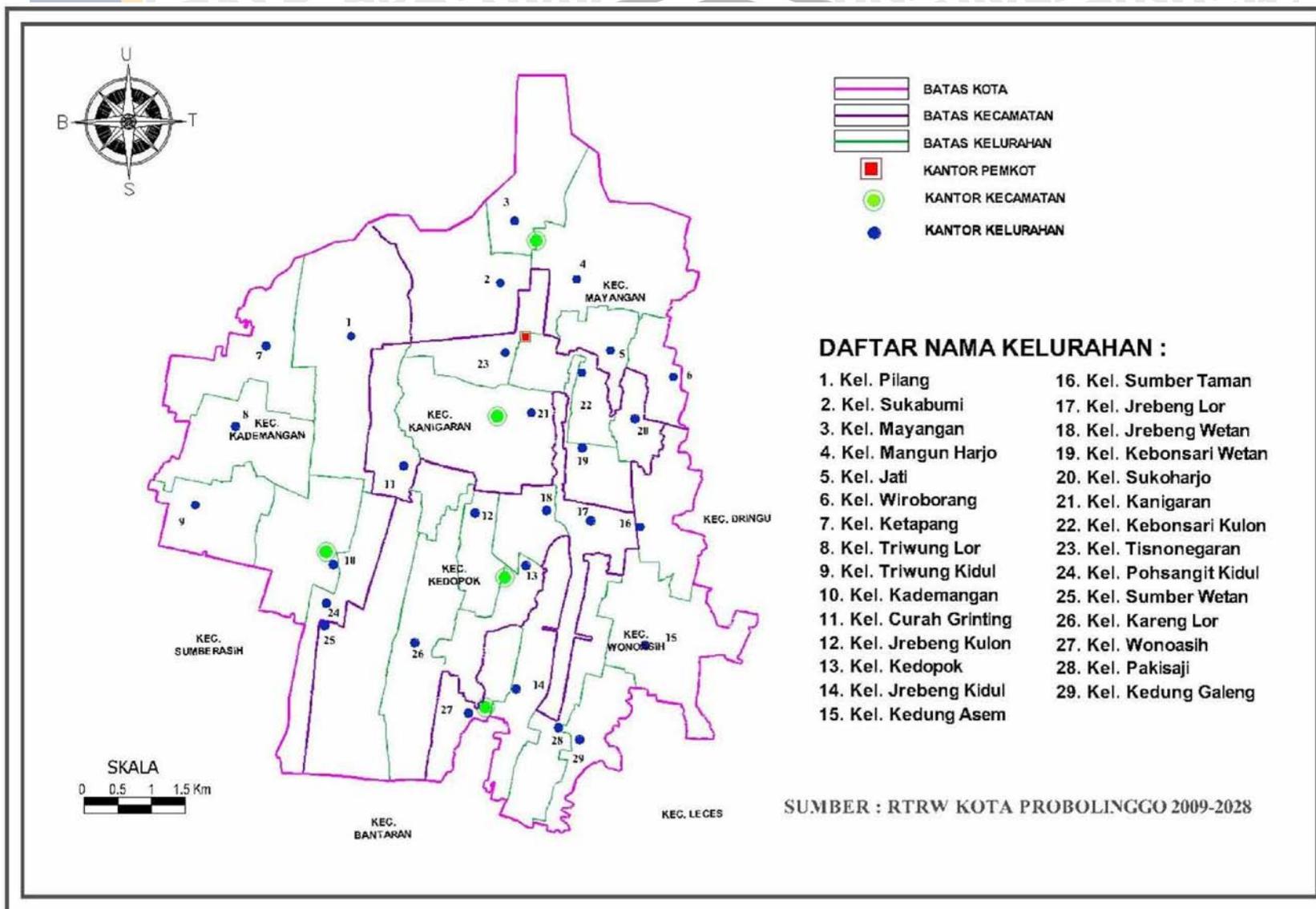
Untuk lebih jelasnya mengenai batas Kota Probolinggo dapat dilihat pada gambar 4.1.





Gambar 4. 1 Peta Batas Administrasi Kota Probolinggo





Gambar 4. 2 Peta Pembagian Kelurahan Kota Probolinggo

Rencana pengembangan fungsi dan peranan Kota Probolinggo secara garis besar adalah sebagai berikut.

1. Sebagai pusat kegiatan yang membentuk suatu wilayah pelayanan tertentu sesuai dengan struktur kota
2. Sebagai simpul jasa distribusi yang mencakup kegiatan perhubungan dan komunikasi, pemasaran dan perdagangan (sistem koleksi dan distribusi)
3. Sebagai tempat fungsi tertentu berdasarkan kegiatan intensif yaitu kegiatan sekunder dan kegiatan tersier
4. Pemanfaatan fungsi kota yang mendukung pengembangan kegiatan yang ada di wilayah hinterland

Struktur tata ruang serta fungsi dan peranan Kota Probolinggo hingga tahun 2028 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Struktur Tata Ruang, Fungsi dan Peranan Kota Probolinggo Hingga Tahun 2028

Hierarki Wilayah	BWK	Fungsi dan Peranan
Orde K1	B	Sebagai pusat pemerintahan, perumahan dan fasilitas umum, pusat perkantoran, pusat perdagangan dan jasa (skala pelayanan wilayah kota), jalur hijau dan kawasan militer.
Orde K2	A	Sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, perumahan dan fasilitas umum, industri, pergudangan, kawasan lindung mangrove, jalur hijau, pengembangan pelabuhan, permukiman nelayan, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), pariwisata dan sarana olahraga.
Orde K3	C	Sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri pergudangan, pertanian, perumahan dan fasilitas umum, jalur hijau dan terminal regional.
	D	Sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, perumahan dan fasilitas umum, pertanian, jalur hijau dan sarana olahraga.
	E	Sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri (agro industri), industri kecil, pendidikan, pertanian, perumahan dan fasilitas umum, dan jalur hijau.

Sumber: RTRW Kota Probolinggo 2009-2028

Kota Probolinggo dibagi menjadi 5 (lima) bagian wilayah kota (BWK) dengan masing-masing prioritas pembangunan yaitu:

1. Bagian Wilayah Kota A (BWK A)

BWK A memiliki luas wilayah 8,655 km² dengan pusat BWK adalah Mayangan. Wilayah BWK A meliputi Kelurahan Mayangan, Sukabumi, Mangunharjo, Jati, dan Kelurahan Wiroborang. Wilayah BWK A terdiri dari 2 (dua) Unit Lingkungan, yaitu :

§ Unit Lingkungan 1 (A1) dan Unit Lingkungan 2 (A2)

Dengan prioritas pembangunan yaitu sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, perumahan dan fasilitas umum, industri, pergudangan, kawasan lindung mangrove, jalur hijau, pengembangan pelabuhan, permukiman nelayan, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), pariwisata dan sarana olahraga

Unit lingkungan 1 (A1) terdiri dari Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Sukabumi.

Unit lingkungan 2 (A2) terdiri dari Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Jati dan Kelurahan Wiroborang.

2. Bagian Wilayah Kota B (BWK B)

BWK B memiliki luas wilayah 10,653 Km² dengan pusat BWK Kanigaran. Wilayah BWK B meliputi Kelurahan Tisnonegaran, Curahgrinting, Kanigaran, Kebonsari Kulon, Kebonsari Wetan, dan Kelurahan Sukoharjo. Wilayah BWK B terdiri dari 2 (dua) Unit Lingkungan, yaitu :

§ Unit Lingkungan 1 (B1) dan Unit Lingkungan 2 (B2)

Dengan prioritas pembangunan yaitu sebagai pusat pemerintahan, perumahan dan fasilitas umum, pusat perkantoran, pusat perdagangan dan jasa (skala pelayanan wilayah kota), jalur hijau dan kawasan militer.

Unit lingkungan 1 (B1) terdiri dari Kelurahan Tisnonegaran, Kelurahan Kanigaran dan Kelurahan Curahgrinting. Unit lingkungan 2 (B2) terdiri dari Kelurahan Kebonsari Wetan, Sukoharjo dan Kelurahan Kebonsari Kulon.

3. Bagian Wilayah Kota C (BWK C)

BWK C memiliki luas wilayah 12,754 Km² dengan pusat BWK Kademangan. Wilayah BWK C meliputi Kelurahan Kademangan, Pilang, Ketapang, Triwung Lor, Triwung Kidul, dan Kelurahan Pohsangit Kidul. Wilayah BWK C terdiri dari 2 (dua) Unit Lingkungan, yaitu :

§ Unit Lingkungan 1 (C1) dan Unit Lingkungan 2 (C2)

Dengan prioritas pembangunan yaitu sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri pergudangan, pertanian, perumahan dan fasilitas umum, jalur hijau dan terminal regional.

Unit lingkungan 1 (C1) terdiri dari Kelurahan Pilang, Kelurahan Triwung Lor dan Kelurahan Ketapang.

Unit lingkungan 2 (C2) terdiri dari Kelurahan Triwung Kidul, Kelurahan Kademangan dan Kelurahan Pohsangit Kidul.

4. Bagian Wilayah Kota D (BWK D)

BWK D memiliki luas wilayah 10,981 Km² dengan pusat BWK Wonoasih. Wilayah BWK D meliputi Kelurahan Wonoasih, Jrebeng Kidul, Pakistaji, Kedunggaleng, Kedungasem dan Kelurahan Sumber Taman. Wilayah BWK D terdiri dari 2 (dua) Unit Lingkungan, yaitu :

§ Unit Lingkungan 1 (D1) dan Unit Lingkungan 2 (D2)

Dengan prioritas pembangunan yaitu sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri (agro industri), industri kecil, pendidikan, pertanian, perumahan dan fasilitas umum, dan jalur hijau.

Unit lingkungan 1 (D1) terdiri dari Kelurahan Wonoasih, Kelurahan Jrebeng Kidul dan Kelurahan Pakistaji.

Unit lingkungan 2 (D2) terdiri dari Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Kedungasem dan Kelurahan Sumber Taman.

5. Bagian Wilayah Kota E (BWK E)

BWK E memiliki luas wilayah 13,624 Km² dengan pusat BWK Kedopok. Wilayah BWK E meliputi seluruh Kelurahan Sumber Wetan, Kareng Lor, Jrebeng Kulon, Jrebeng Wetan, Jrebeng Lor, dan Kelurahan Kedopok. Wilayah BWK E terdiri dari 2 (dua) Unit Lingkungan.

§ Unit Lingkungan 1 (E1) dan Unit Lingkungan 2 (E2)

Dengan prioritas pembangunan yaitu sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, perumahan dan fasilitas umum, pertanian, jalur hijau dan sarana olahraga.

Unit lingkungan 1 (E1) terdiri dari Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan Kareng Lor dan Kelurahan Jrebeng Kulon.

Unit lingkungan 2 (E2) terdiri dari Kelurahan Jrebeng Lor, Kelurahan Jrebeng Wetan dan Kelurahan Kedopok.

4.1.1 Kondisi Fisik Geografis Kota Probolinggo

A. Topografi

Wilayah Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter di atas permukaan air laut. Apabila ketinggian tersebut dikelompokkan atas; ketinggian 0 -10 meter, ketinggian 10 -25 meter, ketinggian 25 -50 meter. Semakin ke wilayah selatan, ketinggian dari permukaan laut semakin besar. Namun demikian seluruh wilayah Kota Probolinggo relatif berlereng (0 – 2%).

Hal ini mengakibatkan masalah erosi tanah dan genangan cenderung terjadi di daerah ini.

B. Geologi

Wilayah Kota Probolinggo dibentuk dari bahan induk batuan vulkanik dan zaman quarter muda (*young quarternary volcanic product*) dan batuan endapan (alluvium). Bahan induk tersebut terbentuk dengan fisiografi yang relatif datar. Bahan induk alluvium terdapat pada wilayah bagian utara dan tenggara, sedangkan bahan induk *volcanic product* terdapat pada bagian lainnya.

C. Jenis tanah

Jenis tanah penting diketahui terutama dalam usaha pengembangan pertanian. Jenis tanah di wilayah Kota Probolinggo terdiri dari Alluvial, Mediteran, dan Regosol. Jenis tanah alluvial regosol terdapat pada daerah paling utara yaitu daerah pantai. Alluvial kelabu tua pada bagian tengah ke utara. Jenis tanah yang terluas di wilayah Kota Probolinggo adalah alluvial coklat keabuan, yaitu dari bagian tengah hingga selatan kota. Jenis tanah regosol coklat terdapat sebagian kecil di bagian timur kota, sedangkan kompleks grumosol hitam dan litosol pada bagian barat daya kota. Jenis tanah aluvial (63,98%) merupakan tanah yang sangat baik untuk usaha pertanian, karena tersedia cukup mineral yang diperlukan untuk tumbuh-tumbuhan. Demikian pula jika digunakan untuk bangunan, jenis tanah ini mempunyai daya tahan yang kuat karena merupakan endapan tanah liat yang bercampur pasir halus. Jenis tanah grumosol (4,82%) sifat tanahnya mudah longsor dan memiliki drainase buruk. Dengan demikian, tentunya jenis tanah ini kurang baik guna didirikan bangunan karena selalu terancam bahaya. Jenis tanah Mediteran (31,20%) merupakan jenis tanah yang memiliki karakteristik tahan menahan.

D. Kemampuan tanah

Kemampuan tanah suatu wilayah perlu ditinjau mengenai kedalaman efektif tanah, tesktur tanah, drainase, dan faktor pembatasnya.

1. Kedalaman efektif

Kedalaman efektif merupakan kedalaman tanah dimana perakaran tanaman masih bisa tumbuh dengan baik. Kedalaman tanah di wilayah Kota Probolinggo adalah lebih dari 90 cm.

2. Tekstur Tanah

Tekstur tanah adalah perbandingan partikel liat, debu dan pasir yang terdapat pada suatu gumpalan tanah. Data mengenai tekstur tanah yang diperoleh adalah tekstur tanah pada kedalaman 20 cm.

Tekstur tanah secara umum diklasifikasikan dalam 3 kelas, yaitu halus, sedang dan kasar. Tekstur tanah di Kota Probolinggo terdiri dari tekstur halus dan sedang. Tanah bertekstur halus terdapat di wilayah bagian Utara, sedangkan tanah bertekstur sedang terdapat di bagian wilayah lainnya. Luas tanah bertekstur halus ialah 3.816 Ha (67,35% dari luas wilayah), sedang tanah bertekstur sedang ialah 1.849,93 Ha (32,65% luas wilayah). Tanah pertanian, tanah bertekstur sedang merupakan tanah yang paling mudah pengolahannya.

3. Drainase

Drainase yang dimaksud adalah kemampuan permukaan tanah untuk merembeskan air secara alami. Keadaan drainase tanah dikelompokkan atas 3 kelas, yaitu drainase baik/tidak pernah tergenang, tergenang periodik, dan drainase tergenang terus-menerus. Sebagian besar wilayah Kota Probolinggo berdrainase cukup baik/tidak pernah tergenang. Drainase tergenang periodik terdapat di dekat pantai dan beberapa kawasan di daerah tengah. Areal persawahan dan tambak dimasukkan pada tanah berdrainase baik.

4. Faktor Pembatas

Faktor pembatas yang dimaksud adalah sifat fisik dan kimia tanah yang mengganggu pertumbuhan akar tanaman dan pemanfaatan air tanah. Untuk Kota Probolinggo faktor pembatas yang ada adalah air asin. Daerah tersebut mencakup wilayah yang terkena akibat pasang surut air laut, yaitu mencakup luasan seluas 110 Ha atau 4.94% dari seluruh luas wilayah Kota.

E. Iklim

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim 2 jenis setiap tahunnya yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim penghujan terjadi pada Bulan Desember sampai dengan Mei, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai bulan Nopember.

Data dari DPU Sub Dinas Pengairan, rata-rata jumlah curah hujan tahun 2006 tercatat 1.409,50 mm dengan hari hujan sebanyak 71 hari. Apabila dibandingkan dengan rata-rata curah hujan tahun 2005 sebesar 961 mm dengan 55 hari hujan, maka kondisi tahun 2006 lebih basah dengan curah hujan bertambah

sebesar 46,67% dan curah hujan per harinya juga bertambah 13,62%, dimana curah hujan per hari pada tahun 2005 sebesar 17,47 mm/hari sedangkan curah hujan per hari pada tahun 2006 sebesar 19,85 mm/hari.

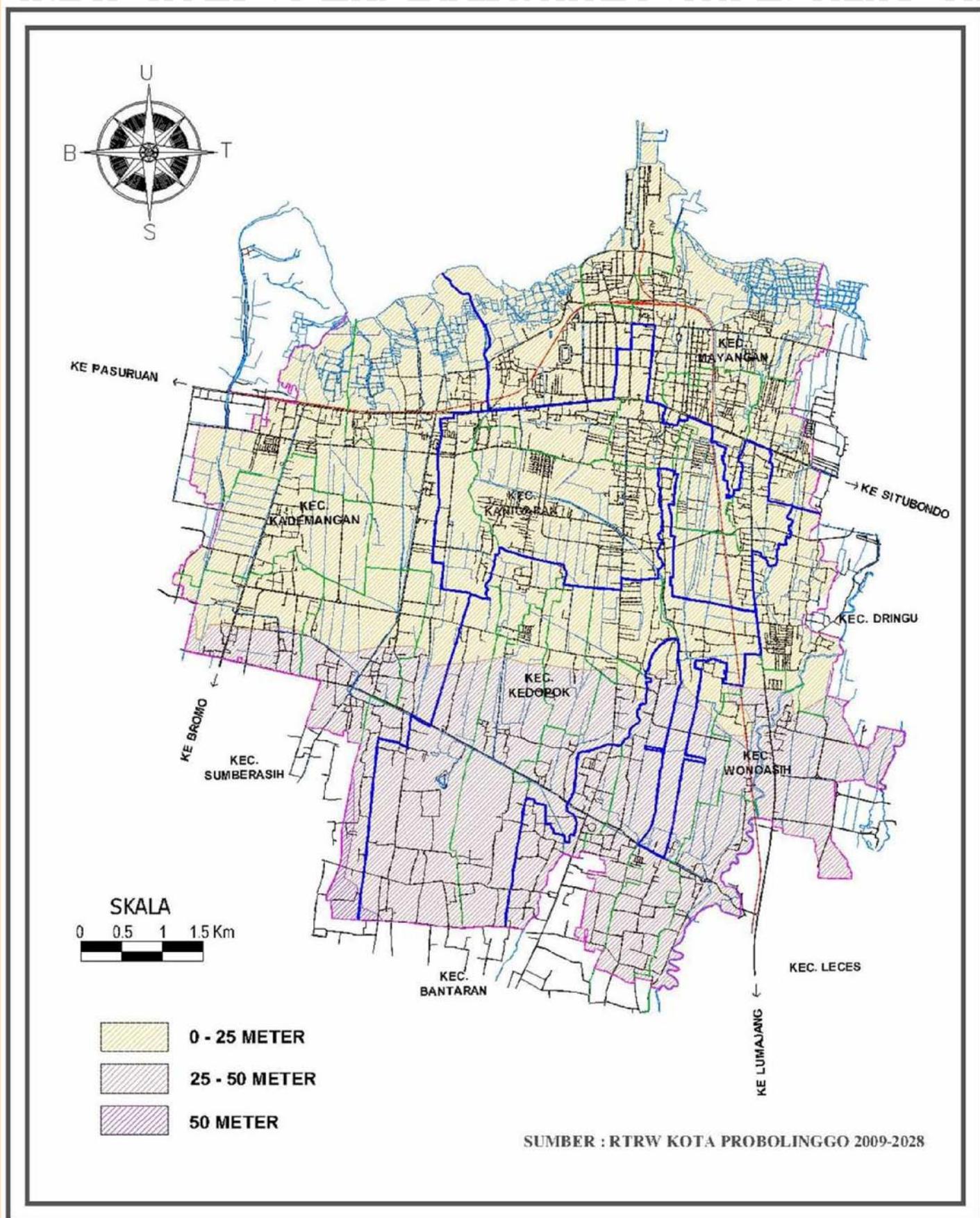
Untuk periode bulan Juni - Nopember praktis tidak ada hujan di Kota Probolinggo. Curah hujan per hari yang lebat terjadi pada bulan Januari sebesar 27,09 mm/hari selama 21 hari, sedangkan lamanya hari hujan terjadi pada bulan Januari dan Februari dengan 21 dan 15 hari hujan. Keadaan ini merupakan hasil pantauan dari 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota Probolinggo.

Musim kering yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan Nopember di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang (kecepatan mencapai 81 km/jam) dari arah Tenggara ke Barat Laut, angin ini biasanya disebut dengan Angin Gending.

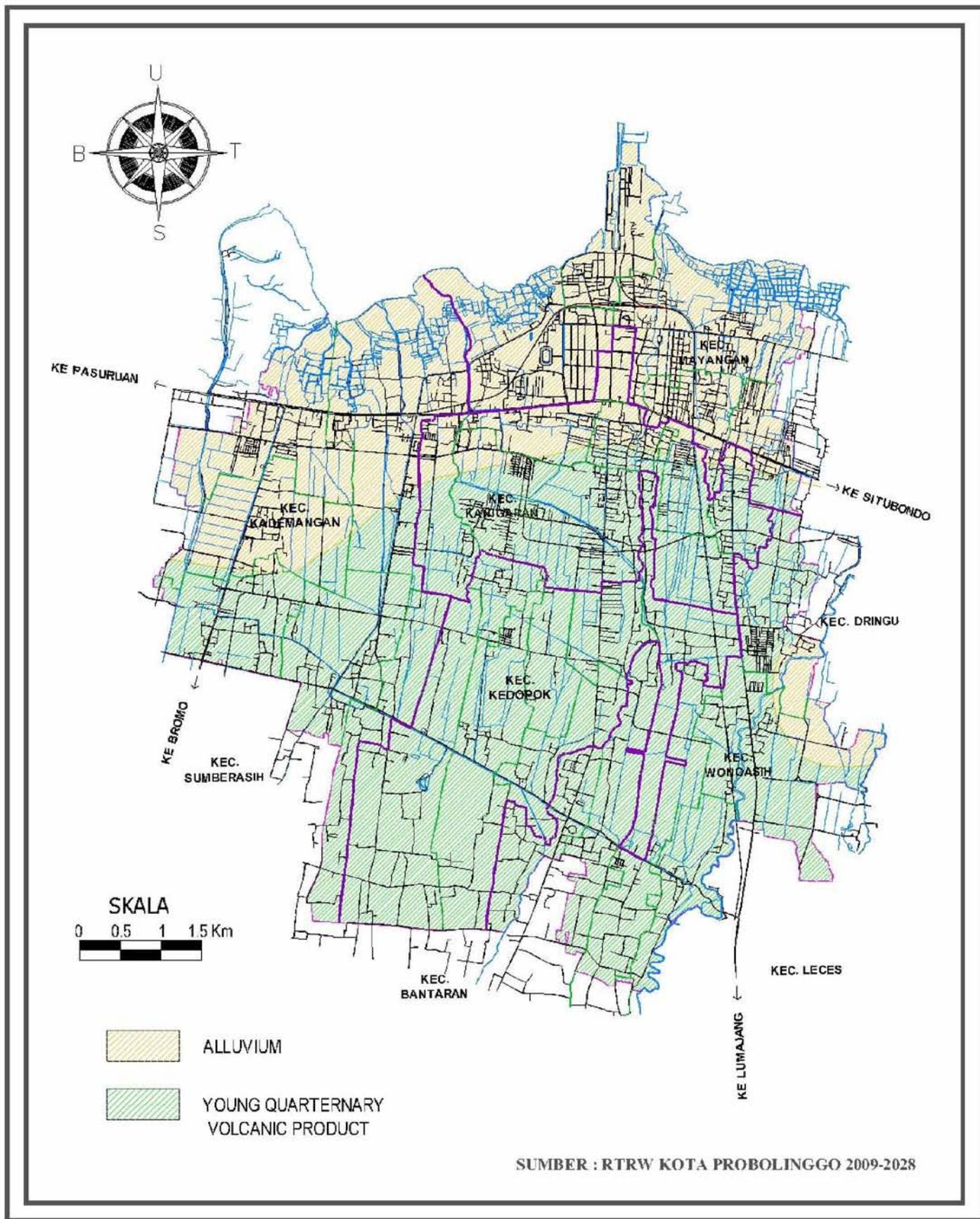
F. Hidrologi

Di wilayah Kota Probolinggo terdapat 6 sungai yaitu Kali Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah, dan Pancur. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah selatan ke utara sesuai dengan kelerengan wilayah dan mempunyai hulu di wilayah Kabupaten Probolinggo. Untuk keperluan usaha pertanian, sungai-sungai tersebut telah dimanfaatkan seluruhnya melalui saluran-saluran irigasi yang dibangun untuk maksud itu. Selain sungai maka sumber air irigasi lainnya adalah mata air yang terdapat di berbagai tempat. Air tanah di Kota Probolinggo umumnya jernih dan tidak berbau. Penduduk yang belum mendapat fasilitas air ledeng umumnya menggunakan air tanah sebagai sumber air minum.

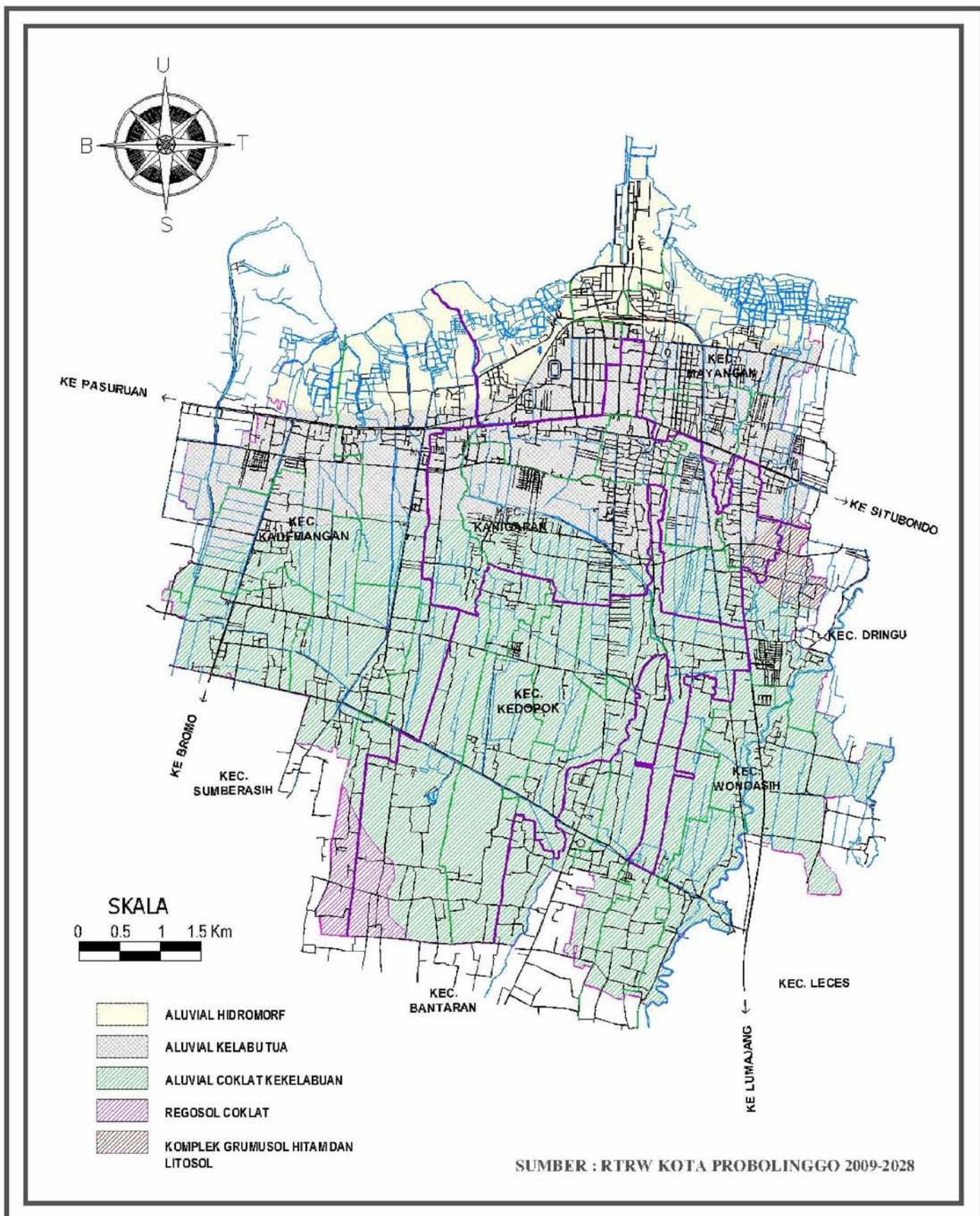
Hal ini dilakukan dengan menggunakan sumur atau pompa. Kedalaman air tanah, yang dilihat dari kedalaman sumur, bervariasi antara kedalaman 3 sampai 12 meter. Semakin ke selatan kedalamannya semakin tinggi.



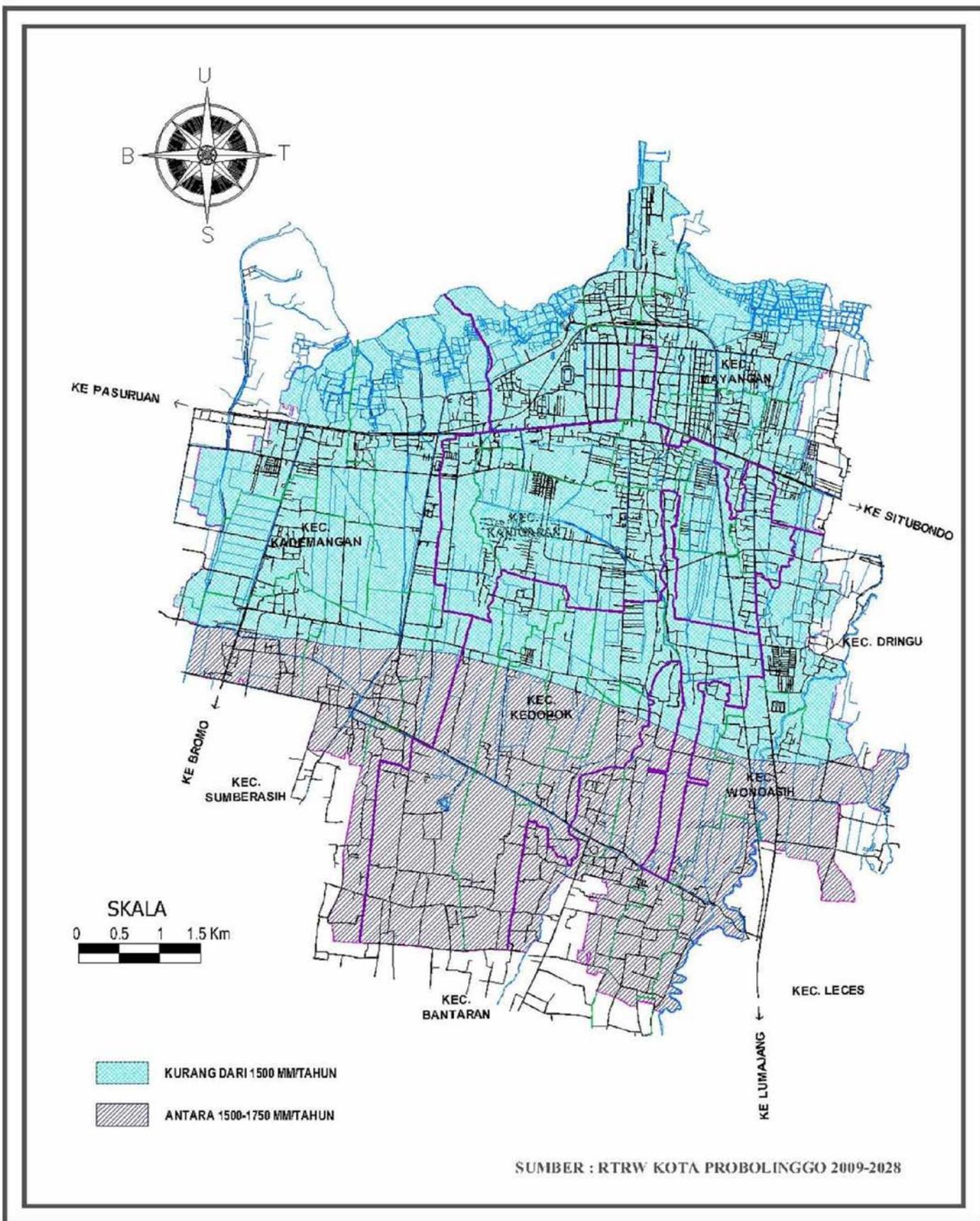
Gambar 4. 3 Peta Ketinggian Kota Probolinggo



Gambar 4. 4 Peta Geologi Kota Probolinggo



Gambar 4. 5 Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo



Gambar 4. 6 Peta Curah Hujan Kota Probolinggo

4.1.2 Penggunaan Lahan Kota Probolinggo

Dalam proses perencanaan suatu kota/daerah, aspek tata guna tanah merupakan aspek penting untuk ditinjau sehingga dapat ditelaah jenis penggunaan tanah dan pola struktur ruang yang ada. Struktur penggunaan tanah secara umum di Kota Probolinggo adalah permukiman, perdagangan, industri, tanah pertanian. Secara keseluruhan penggunaan tanah di Kota Probolinggo didominasi oleh tanah permukiman dan pertanian.

Secara umum penggunaan tanah di Kota Probolinggo tahun 2007 didominasi oleh lahan pertanian dengan luas 2593,64 Ha atau 45,77% dari luas keseluruhan Kota Probolinggo dengan lahan pertanian paling luas berada di Kecamatan Kedopok sebesar 860,98 Ha, kemudian berikutnya adalah Kecamatan Kademangan dengan luas lahan pertanian sebesar 667,21 Ha dan Kecamatan Wonoasih dengan luas lahan pertanian sebesar 514,48 Ha.

Penggunaan lahan paling dominan berikutnya setelah lahan pertanian adalah lahan permukiman, yaitu sebesar 2.090,04 Ha atau 36,88% dari luas Kota Probolinggo. Persebaran permukiman di Kota Probolinggo cukup merata di seluruh kecamatan, hal ini dapat dilihat berdasarkan selisih luas lahan permukiman pada setiap kecamatan yang tidak terlalu mencolok. Luas lahan permukiman paling besar berada di Kecamatan Kanigaran yaitu sebesar 474,29 Ha, kemudian berikutnya adalah Kecamatan Wonoasih sebesar 412,24 Ha.

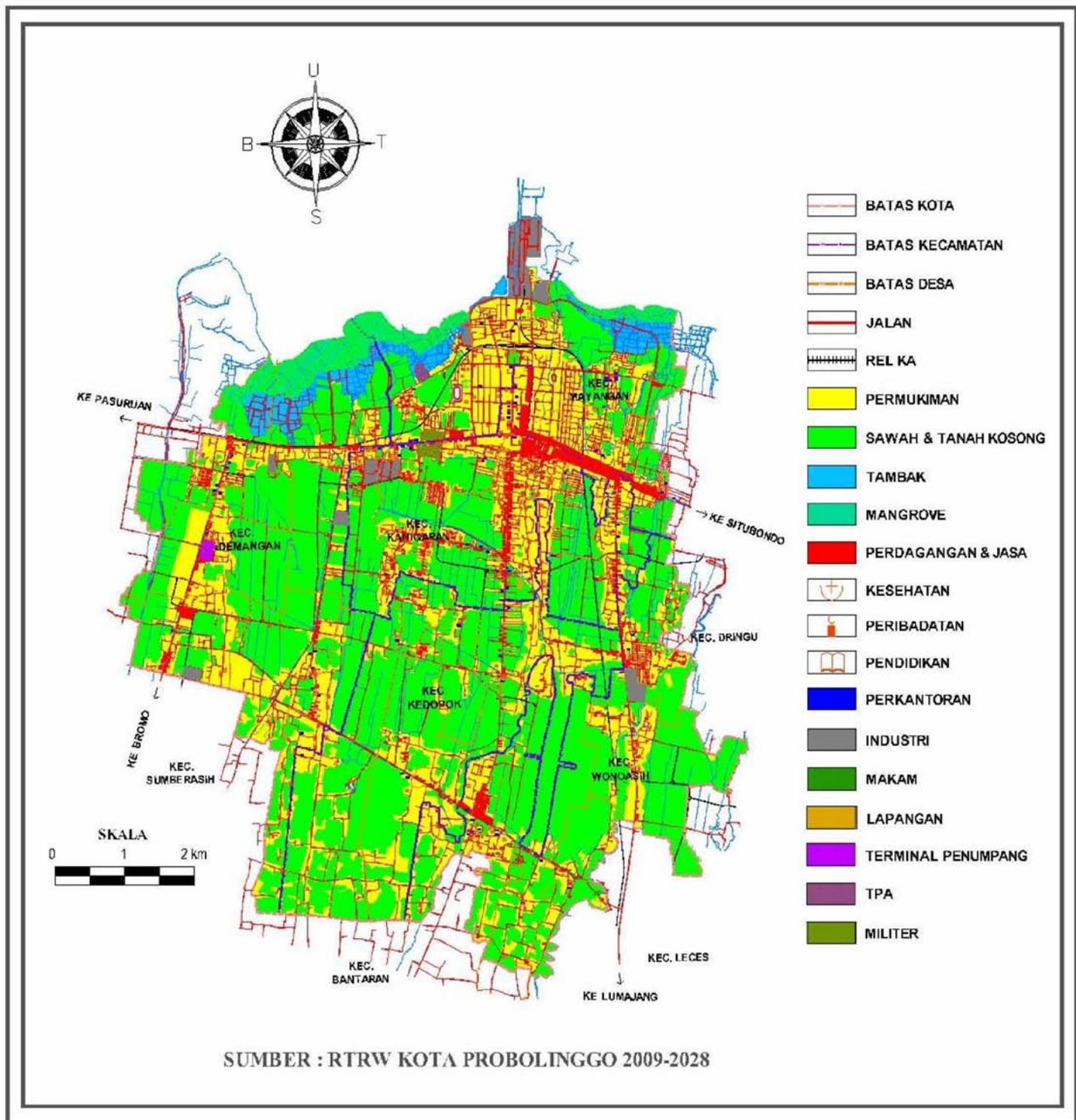
Penggunaan tanah lainnya seperti fasilitas pendidikan, perkantoran, perdagangan maupun industri menjadi terlihat tidak signifikan jika dibandingkan dengan luas lahan pertanian ataupun permukiman. Luas fasilitas permukiman, perkantoran, perdagangan dan industri di Kota Probolinggo berturut-turut adalah sebesar 132,50 Ha (2,34% luas wilayah Kota probolinggo), 108,91 Ha (1,92%), 20,64 Ha (0,36%), dan 90,08 Ha (1,59%).

Tabel 4. 3 Luas dan Jenis Penggunaan Lahan (Ha) di Kota Probolinggo Tahun 2007

No	Penggunaan Lahan	Luas					Total	%
		Mayangan	Kademangan	Kanigaran	Kedopok	Wonoasih		
1	Permukiman	384,16	410,62	474,29	408,73	412,24	2.090,04	36,88
2	Perdagangan	7,41	0,70	11	1,20	0,33	20,64	0,36
3	Pendidikan	34,40	12,70	64	16,65	4,75	132,50	2,34
4	Perkantoran	36,01	5,61	63,38	2,26	1,65	108,91	1,92
5	Industri	74,25	8,54	1,84	0	5,45	90,08	1,59
6	Pertanian	180,99	667,21	368,98	860,98	514,48	2.593,64	45,77
7	Tambak	46,05	50,67	0	0	0	96,72	1,71
8	Hutan Mangrove	5,05	2,33	0	0	0	7,38	0,13
9	Sungai	9,88	56,77	6,42	19,79	91,22	184,08	3,25
10	Rel KA	3,42	2,81	2,48	1,18	1,99	11,88	0,21
11	Jalur SUTT	0	6,46	7,08	4,61	7,15	25,30	0,45
12	Jalan	46,92	33,30	40,30	24,74	46,20	191,46	3,38
13	Lapangan Olahraga	5,05	3,69	6,99	5,92	4,28	25,93	0,46
14	Hutan Kota	17,85	3,50	0	0,94	4,65	26,94	0,48
15	Makam	14,10	13,95	14,05	15,40	3,70	61,20	1,08
	Jumlah	865,54	1275,36	1065,31	136,24	1098,09	5666,7	100

Sumber : RTRW Kota Probolinggo 2009-2028





Gambar 4. 7 Peta Penggunaan Lahan Kota Probolinggo

4.2 Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan arahan pengembangan ruang terbuka hijau antara lain adalah:

1. Kebijakan penetapan ruang terbuka hijau berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2007
2. Kebijakan penetapan ruang terbuka hijau berdasarkan RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009-2028
3. Kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Terbuka Hijau Kota Probolinggo tahun 2007-2026

4.2.1 Kebijakan Penetapan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2007

Mengingat perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Beberapa jenis ruang terbuka hijau yang tercantum dalam peraturan pasal 6 adalah:

1. Taman kota
2. Taman wisata alam
3. Taman rekreasi
4. Taman lingkungan perumahan dan permukiman
5. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial
6. Taman hutan raya
7. Hutan kota
8. Hutan lindung
9. Bentang alam (gunung, bukit, lereng, dan lembah)
10. Cagar alam
11. Kebun raya
12. Kebun binatang
13. Pemakaman umum
14. Lapangan olahraga
15. Lapangan upacara

16. Parkir terbuka
17. Lahan pertanian perkotaan
18. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)
19. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ, dan rawa
20. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian
21. Kawasan dan jalur hijau
22. Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara
23. Taman atap (roof garden)

Selain jenis ruang terbuka hijau, dalam Permendagri no 1 tahun 2007 Bab II secara berturut-turut pada pasal 2, 3, dan 4 menjelaskan mengenai tujuan, fungsi, dan manfaat ruang terbuka hijau, diantaranya adalah:

Tujuan penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah:

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
- b. Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman

Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah:

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
- b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara
- c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati
- d. Pengendali tata air
- e. Sarana estetika kota

4.2.2 Kebijakan Terkait Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009-2028

A. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang ada di Kota Probolinggo yaitu hutan bakau yang berada di bagian Utara kota (BWK A dan BWK C). Perkembangan kegiatan perikanan terutama pembukaan area tambak udang harus dikendalikan dan dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan. Kemungkinan kerusakan akibat pengelolaan pantai untuk tambak (udang), maka kawasan pantai Utara wilayah Kota Probolinggo dengan kondisi eksisting hutan bakau direncanakan untuk tetap dilestarikan sebagai kawasan lindung.

Keberadaan hutan bakau ini sempat terganggu karena perkembangan kegiatan budidaya perikanan yang sedemikian pesat oleh masyarakat setempat, dan kemungkinan besar di masa yang akan datang dengan adanya kegiatan pelabuhan yang berdampak pada perkembangan tata ruang kawasan pada sebelah Utara Kota Probolinggo, akan memberikan pengaruh negatif bagi keberadaan hutan bakau tersebut. Untuk itu perlu adanya suatu ketegasan secara hukum untuk mempertahankan keberadaan hutan mangrove pada wilayah perencanaan yang memiliki fungsi sangat signifikan. Yaitu menjaga keberadaan lahannya dari berbagai kegiatan budidaya di atasnya. Hal ini sangat sesuai mengingat pada wilayah Utara Kota Probolinggo memiliki kondisi fisik dasar berupa pantai dan hutan bakau. Sehingga diharapkan dengan diberlakukannya kawasan tersebut sebagai kawasan lindung akan mampu menjaga ekosistem yang terdapat di lingkungan itu.

Hutan mangrove dikembangkan di kawasan Pantai Kelurahan Ketapang, kawasan Pantai Kelurahan Pilang, kawasan Pantai Kelurahan Sukabumi, kawasan Pantai Kelurahan Mangunharjo dan kawasan Pantai Kelurahan Mayangan. Selain itu perlu upaya pelestarian mata air, yaitu sumber air Umbul di Kelurahan Curahgrinting, sumber air Pilang Renes di Kelurahan Pilang, sumber air Jalil di Kelurahan Ketapang, sumber air di Kelurahan Sumber Wetan, sumber air Pacar di Kelurahan Tisnonegaran, sumber air Ardhi di Kelurahan Kedopok, sumber air Kekok di Kelurahan Tisnonegaran, sumber air Sumber Taman di Kelurahan Sumber Taman, sumber air Jati di Kelurahan Jati, sumber air Ranu Jrebeng kelurahan Jrebeng Wetan, sumber air Langse di Kelurahan Triwung Lor dan sumber air Arum di Kelurahan Mangunharjo.

B. Rencana Pengembangan Sarana Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau

Kebutuhan sarana olah raga dan ruang terbuka di Kota Probolinggo diatur sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Taman untuk 250 penduduk | 250 m ² |
| • Taman untuk 3.000 penduduk | 150 m ² |
| • Taman dan lapangan olah raga untuk 30.000 penduduk | 8.400 m ² |
| • Taman dan lapangan olah raga untuk 120.000 penduduk | 10.000 m ² |
| • Taman dan tempat rekreasi untuk 480.000 penduduk | 30.000 m ² |
| • Jalur hijau | 15 m ² /penduduk |
| • Kuburan, disesuaikan. | |

Pembangunan sarana olah raga yaitu GOR Kota Probolinggo di BWK E (Kedopok) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sarana olah raga dengan skala pelayanan kota. Sedangkan ruang terbuka hijau yang direncanakan berupa jalur hijau, taman kota dan hutan kota. Rencana jalur hijau dilakukan pada jalan arteri sekunder di seluruh Kota Probolinggo, di Terminal Banyuwangga, di kawasan pasar, di kawasan Stasiun Kota Probolinggo, di kawasan Stadion Banyuwangga, di kawasan Pelabuhan serta kawasan perumahan. Taman kota direncanakan di sepanjang Jalan Anggrek, Jalan Brantas, Jalan Mastrip, Jalan Lumajang, Jalan raden Wijaya, Jalan Bromo dan Jalan Basuki Rachmat. Sedangkan hutan kota direncanakan di Aloon-aloon Kota Probolinggo, RTH Eks Joboan, RTH Jalan Mastrip, di TPA Kota Probolinggo, Kelurahan Kademangan, Kelurahan Wonoasih dan Kelurahan Sukabumi.

4.2.3 Kebijakan Terkait Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Produk Rencana Dinas Lingkungan Hidup

Visi lingkungan hidup Kota Probolinggo yaitu “Menuju Probolinggo Kota Bersih, Hijau, Indah dan Lestari” yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kota Bersih, memiliki makna:
 - Kota yang bersih, tidak ada sampah yang tercecer dan masyarakat telah mengadakan pengumpulan sampah di tempat yang sudah disediakan
 - Kota yang memiliki manajemen pengelolaan sampah
- b. Kota Hijau, memiliki makna:
 - Kota yang memiliki kawasan hijau cukup besar dibanding dengan kawasan terbangun
 - Kota yang rindang, memiliki paru-paru kota yang cukup dan masyarakatnya memiliki kepedulian tinggi terhadap penghijauan kota
- c. Kota Indah, memiliki makna:
 - Kota yang memiliki taman yang indah pada setiap sudut kota yang dilengkapi dengan penerangan jalan umum, lampu taman dan lampu hias
 - Warga kota memiliki kesadaran tinggi dalam memanfaatkan lahan pekarangan dengan pembuatan taman
- d. Kota Lestari, memiliki makna:
 - Kondisi bersih, hijau dan indah dapat dipelihara dan dipertahankan terus menerus

Guna mewujudkan visi yang sudah ditetapkan, maka BLH Kota Probolinggo perlu menetapkan misinya. Dengan melihat makna visi tersebut, maka misi dirumuskan sebagai berikut.

1. Mewujudkan peningkatan penanganan kebersihan dan keindahan kota secara partisipatif didukung dengan pengembangan model kemitraan dan sumber daya manusia yang memadai
2. Mewujudkan peningkatan ruang terbuka hijau, keteduhan dan keasrian kota
3. Mewujudkan pengelolaan lingkungan secara terpadu didukung informasi yang handal

Untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui RPJM Kota Probolinggo tahun 2006-2009 dan berdasarkan kebijakan serta program yang ditempuh oleh pemerintah Kota Probolinggo maka Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo memiliki beberapa rencana kerja terkait dengan ruang terbuka hijau, yaitu:

- Peningkatan Taman Wisata Studi Lingkungan
- Operasional UPTD PISLH (Pusat Informasi dan Studi Lingkungan)
- Pemeliharaan dan peningkatan pertamanan kota, penghijauan dan pemakaman
- Peningkatan GPSL (Gerakan Peduli Sadar Lingkungan)
- Peningkatan sarana operasional ruang terbuka hijau (RTH)
- Sarana dan prasarana taman studi lingkungan
- Koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam (SDA)
- Peningkatan RTH kawasan perkotaan
- Pemeliharaan RTH

4.3 Karakteristik dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Probolinggo

4.3.1 Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Kota Probolinggo

Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Ruang terbuka merupakan ruang yang tanpa atau sedikit massa bangunan di atasnya. Berdasarkan kebijakan yaitu Undang-undang Penataan Ruang No.26 tahun 2007 menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari dua jenis yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau (RTH) publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah

sedangkan RTH privat merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat/swasta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa terdapat 23 bentuk ruang terbuka hijau, baik didalamnya termasuk RTH publik dan RTH privat, yang dapat dikembangkan untuk memenuhi proporsi kebutuhan ruang terbuka hijau pada suatu kawasan perkotaan khususnya untuk Kota Probolinggo. Dari 23 bentuk ruang terbuka hijau tersebut, bentuk ruang terbuka hijau yang terdapat di Kota Probolinggo terdiri dari :

1. Taman kota
2. Taman rekreasi
3. Hutan Kota
4. Taman lingkungan perumahan dan permukiman
5. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial
6. Pemakaman umum
7. Lapangan olahraga
8. Lahan pertanian perkotaan
9. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)
10. Sempadan sungai dan pantai
11. Jalur pengaman jalan dan median jalan

Dari kesebelas bentuk ruang terbuka hijau diatas, delapan diantaranya merupakan RTH publik dimana status kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Ruang terbuka hijau yang termasuk kedalam RTH publik Kota Probolinggo antara lain adalah taman kota, taman rekreasi, hutan kota, pemakaman umum, lapangan olahraga, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai dan pantai, dan jalur pengaman jalan. Sedangkan ruang terbuka hijau yang termasuk kedalam ruang terbuka privat antara lain adalah taman lingkungan perumahan, taman lingkungan perkantoran, pemakaman umum, dan lahan pertanian. Pada ruang terbuka hijau berupa pemakaman umum di Kota Probolinggo dikategorikan dalam ruang terbuka hijau publik dan privat karena sebagian lahan, baik pada pemakaman maupun pada lahan pertanian, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat.

A. Taman Kota

Taman kota merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa, sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya atau penggunaannya. Taman kota di Kota Probolinggo terdiri dari taman-taman kecil yang terletak di sepanjang jalan, seperti taman yang terletak di kanan-kiri jalan, seperti taman Jalan Soekarno Hatta, taman Jalan Pahlawan, taman Jalan Panglima Soedirman, taman Jalan KH Mas Mansyur, taman Jalan Basuki Rachmat, taman Jalan Mastrip, taman Jalan Anggrek, taman Jalan Panjaitan, taman perempatan flora, taman Radar Bromo, taman tugu monumen Mastrip, taman rel Mangunharjo, taman Jalan Tengku Umar, taman pojok Citarum, taman Jalan Brantas, taman pertigaan Brantas, taman Kronong, taman jagalan, taman batas timur, taman monumen Jam Sumber Hidup, taman monumen Jam Victori, taman monumen Pahlawan, taman batas selatan, taman pojok Ketapang, taman barat pos polisi Ketapang, taman batas kota barat utara, taman batas kota barat selatan, taman adipura serta taman yang terletak di depan Yon Zipur. Selain itu terdapat alun-alun dan taman manula yang merupakan taman aktif.

Taman aktif yaitu alun-alun dan taman manula sering digunakan sebagai sarana komunikasi sosial, tempat bermain, tempat rekreasi, dan sarana hiburan bagi masyarakat Kota Probolinggo. Sedangkan taman yang lainnya merupakan taman pasif yang memiliki manfaat estetis dalam menjaga keindahan Kota Probolinggo. Taman pasif selain dilengkapi dengan berbagai tanaman hias juga memiliki elemen pelengkap seperti lampu hias. Sebagian besar taman pasif berbentuk linier mengikuti jalan, namun terdapat taman pasif yang berbentuk lingkaran dan persegi empat.

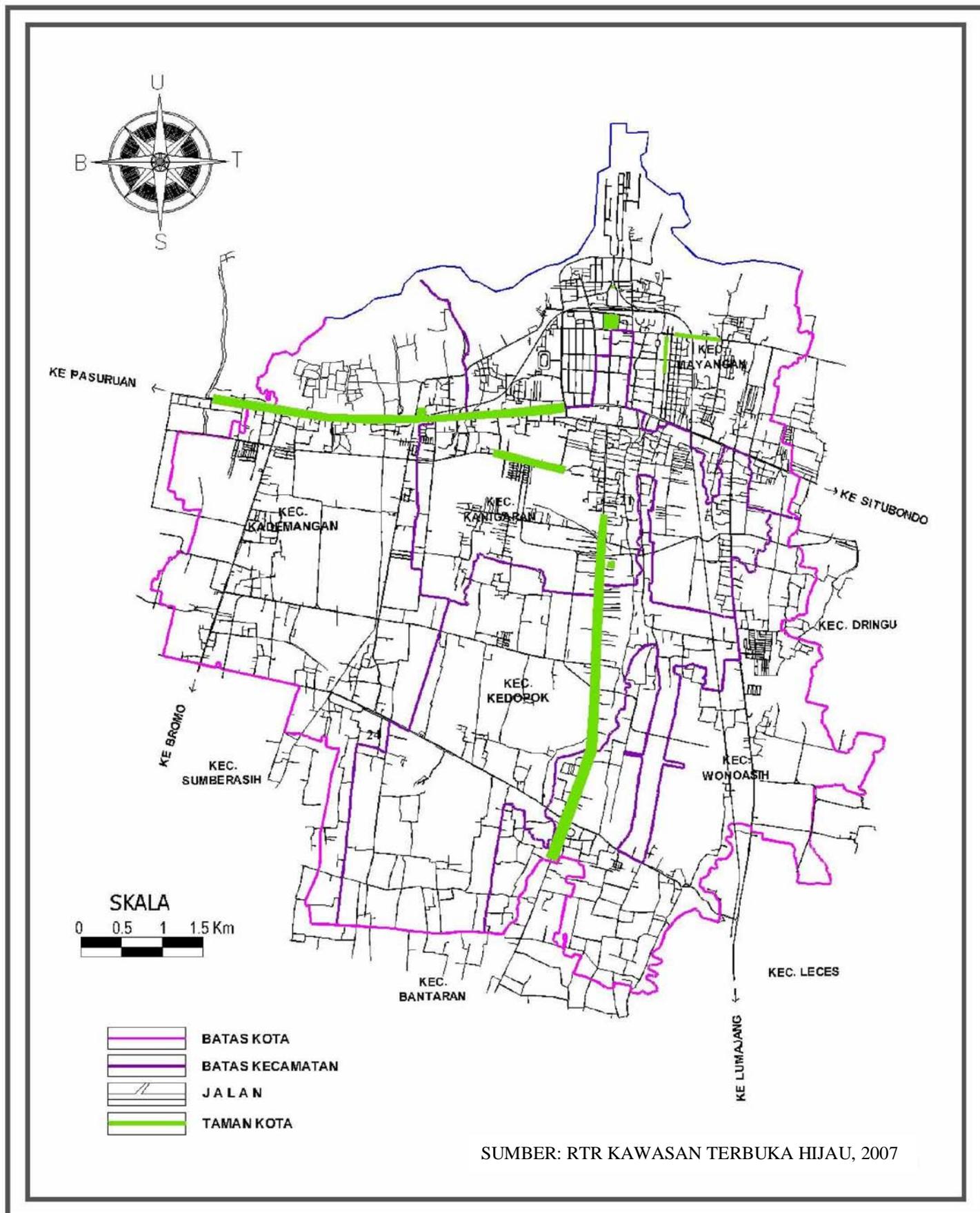
Taman-taman tersebut dibangun oleh beberapa pihak yang terdiri dari pemerintah kota (taman perempatan pilang, taman pojok Citarum, taman Kronong, taman tugu monumen Mastrip), maupun taman yang dibangun dengan pihak *stakeholders* lain (BLH, Bappeda, PKS, Perhutani, UPTD Pasar, SMPN 9, Asuransi Bumi Putera, Surya Raya Motor dan sebagainya). Taman-taman tersebut diisi dengan berbagai jenis vegetasi yang mempunyai berbagai fungsi baik sebagai peneduh, penyegar suasana kota maupun untuk keindahan atau estetika kota. Vegetasi yang dimaksud antara lain Bougenvil, soka, puring, penitian, agave, glodokan, tetean, lamtama, cemara, palem putri, pandan, bayam, krokot, kaktus, mawar, popok bayi, tanjung, varigata, ganyong, sawo kecil, dan sebagainya. Mengenai lokasi dan luas taman di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Luas Taman Kota di Kota Probolinggo

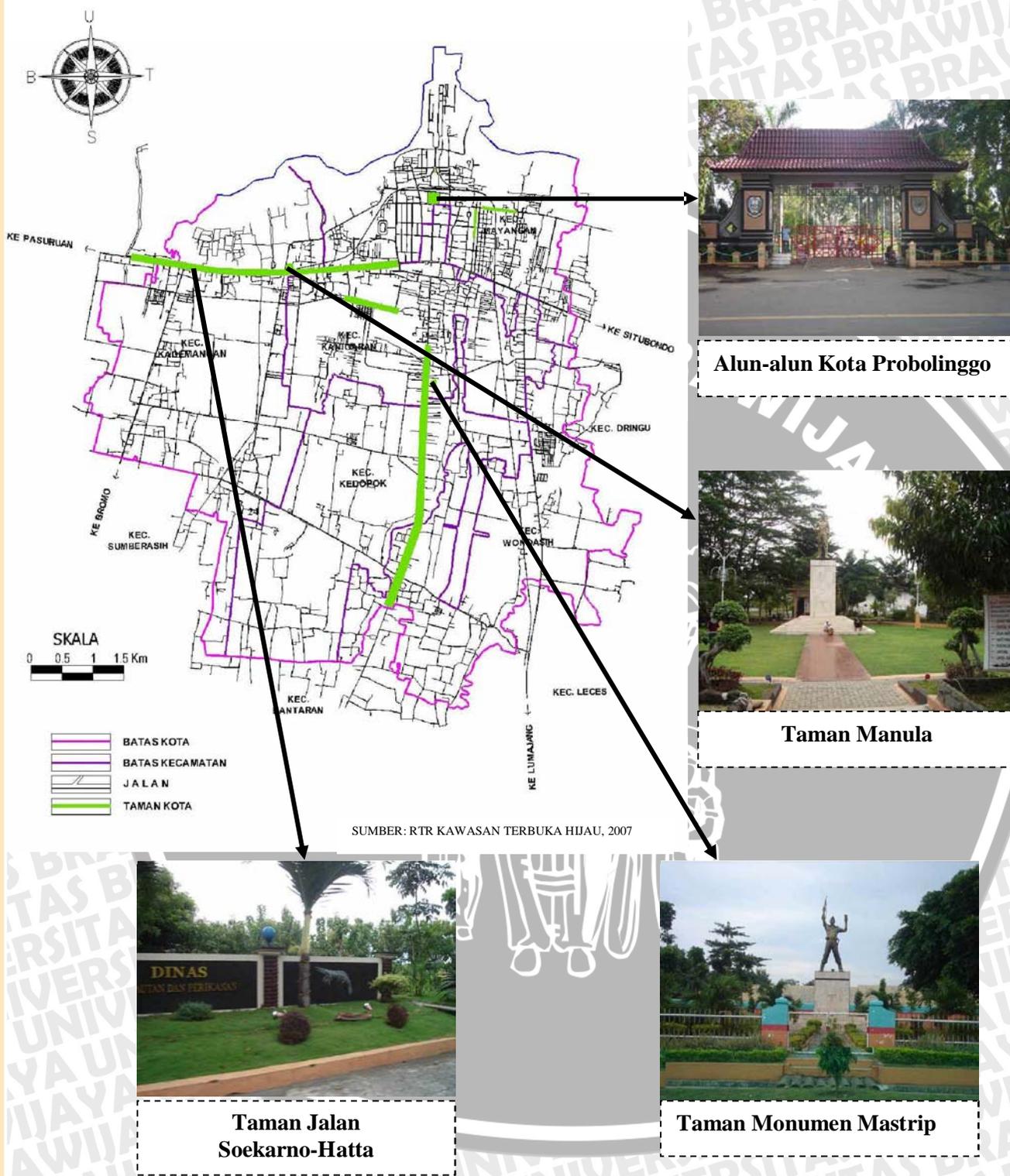
No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Mayangan	3,57
2	Kademangan	0,51
3	Kanigaran	0,32
4	Kedopak	0,71
5	Wonoasih	0,63
JUMLAH		5,74

Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau tahun 2007





Gambar 4. 8 Peta Lokasi Taman Kota Probolinggo



Gambar 4. 9 Taman Kota Probolinggo

B. Taman Rekreasi

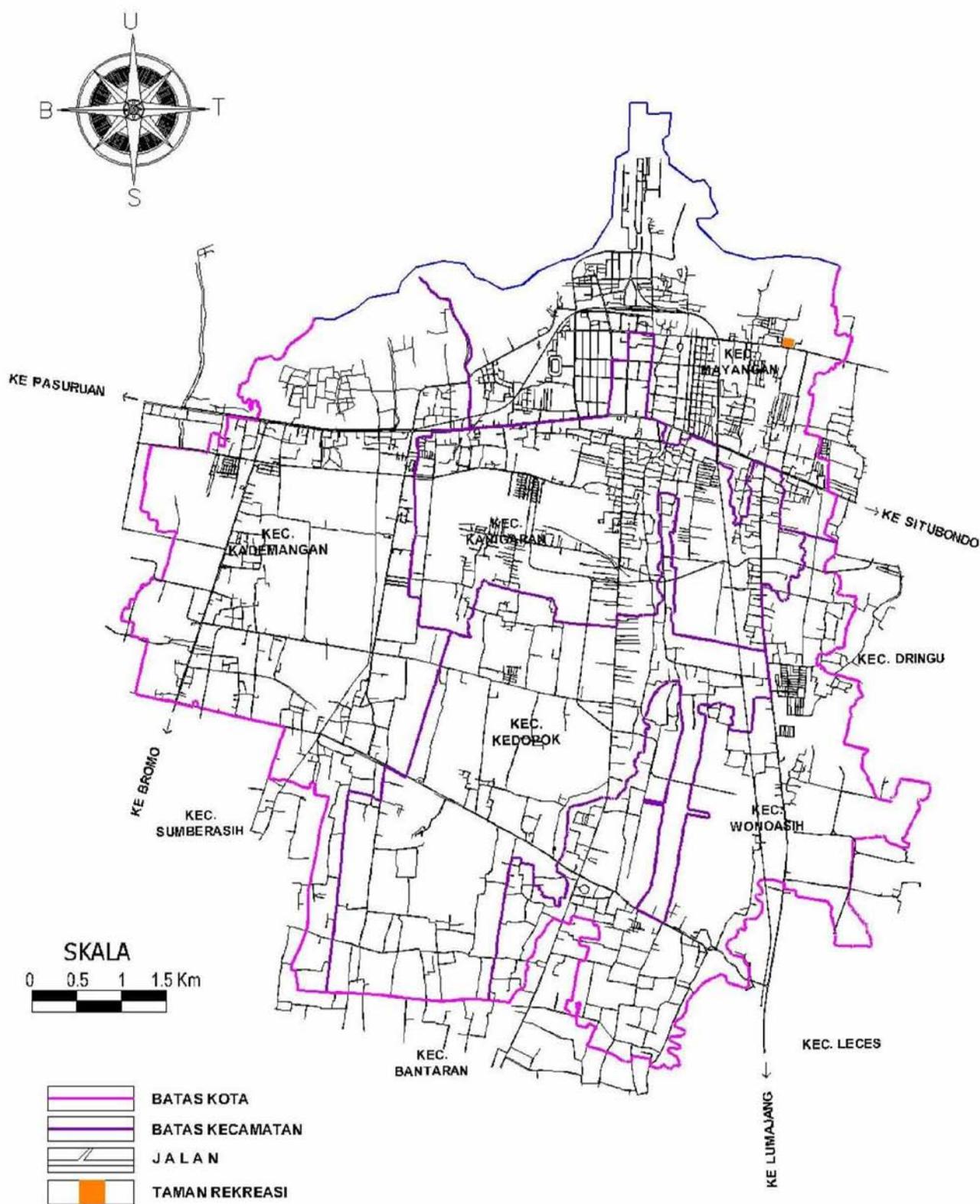
Taman rekreasi merupakan suatu tempat/areal yang dapat menampung kebutuhan dalam berekreasi. Di Kota Probolinggo hanya terdapat satu taman rekreasi yaitu Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) yang terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Taman Wisata Studi Lingkungan pada awalnya merupakan bekas lokalisasi yang terkenal dengan nama Joboan. Lokalisasi Joboan tersebut telah dibongkar sebelumnya, dan lahannya terbengkalai/ tidak dimanfaatkan selama kurang lebih 8 tahun. Tahun 2003 lokasi tersebut diubah oleh Pemerintah Kota Probolinggo bersama pelaku Industri se-Kota Probolinggo yang tergabung dalam IMF (*Informal Meeting Forum*) menjadi hutan kota. Hutan kota tersebut dibuat untuk kepentingan ekologis, edukatif dan sosial kemasyarakatan.

Keberadaan Hutan kota tersebut kemudian dikembangkan menjadi Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Luas Taman Wisata Studi Lingkungan kurang lebih satu hektar. Terdapat kurang lebih dua puluh jenis tanaman tahunan di TWSL antara lain Sengon, Mengkudu, Mahoni, Waru, Rangkang, dan lain sebagainya. Selain berbagai jenis tanaman, di Taman Wisata Studi Lingkungan juga terdapat taman satwa. Keberadaan taman satwa di TWSL, pada awalnya merupakan hasil dari desakan masyarakat yang sangat besar. Taman satwa dapat terwujud karena Pemerintah Kota Probolinggo menyumbangkan satwa dalam jumlah besar untuk mendukung program tersebut, namun sarana dan prasarana taman satwa masih sangat minim.

Taman Wisata Studi Lingkungan memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai penyegaran udara, penyerap air hujan, pengendali banjir, dan pengendali polusi. Selain itu TWSL memiliki fungsi sosial karena merupakan lokasi rekreasi masyarakat Kota Probolinggo yang berupa tempat bermain, tempat bersantai, tempat komunikasi sosial dan juga sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup.



Gambar 4. 10 Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL)



SUMBER: RTR KAWASAN TERBUKA HIJAU, 2007

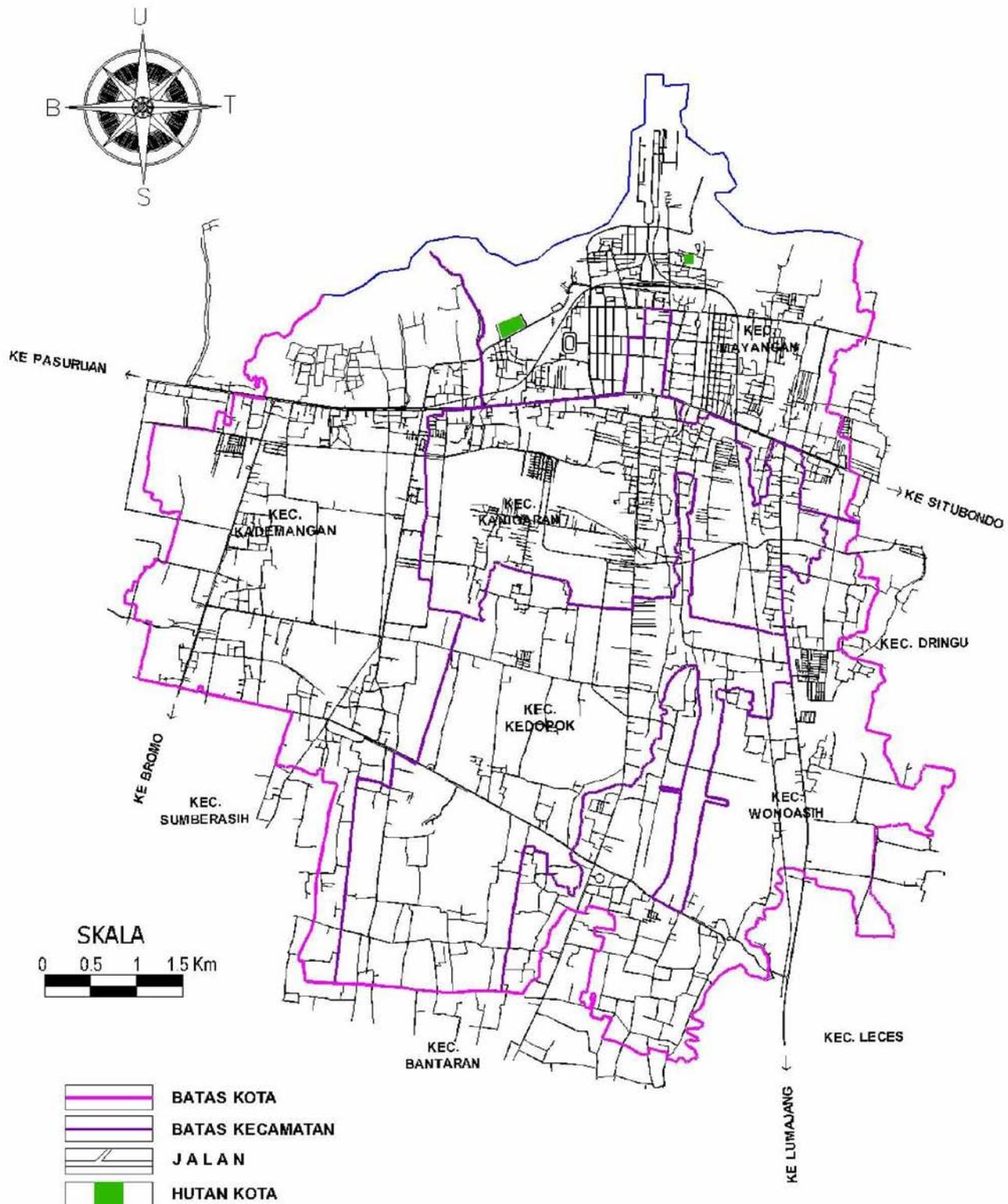
Gambar 4. 11 Peta Lokasi Taman Rekreasi Kota Probolinggo

C. Hutan Kota

Hutan kota merupakan kawasan di dalam kota yang didominasi oleh pepohonan dan habitatnya dibiarkan tumbuh secara alami. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian alami mengandung arti bukan hutan yang tumbuh menjadi hutan yang besar atau rimba, melainkan tidak terlalu diatur seperti taman. Kehadiran hutan di kawasan perkotaan umumnya lebih menarik berbagai aktivitas, bila hutan itu sengaja ditanam dengan tanaman secara teratur jarak tanaman dan jenis pohonnya menjadi obyek wisata atau kegiatan rekreasi, kepramukaan dan kawasan lindung (Nazaruddin, 1996: 26)

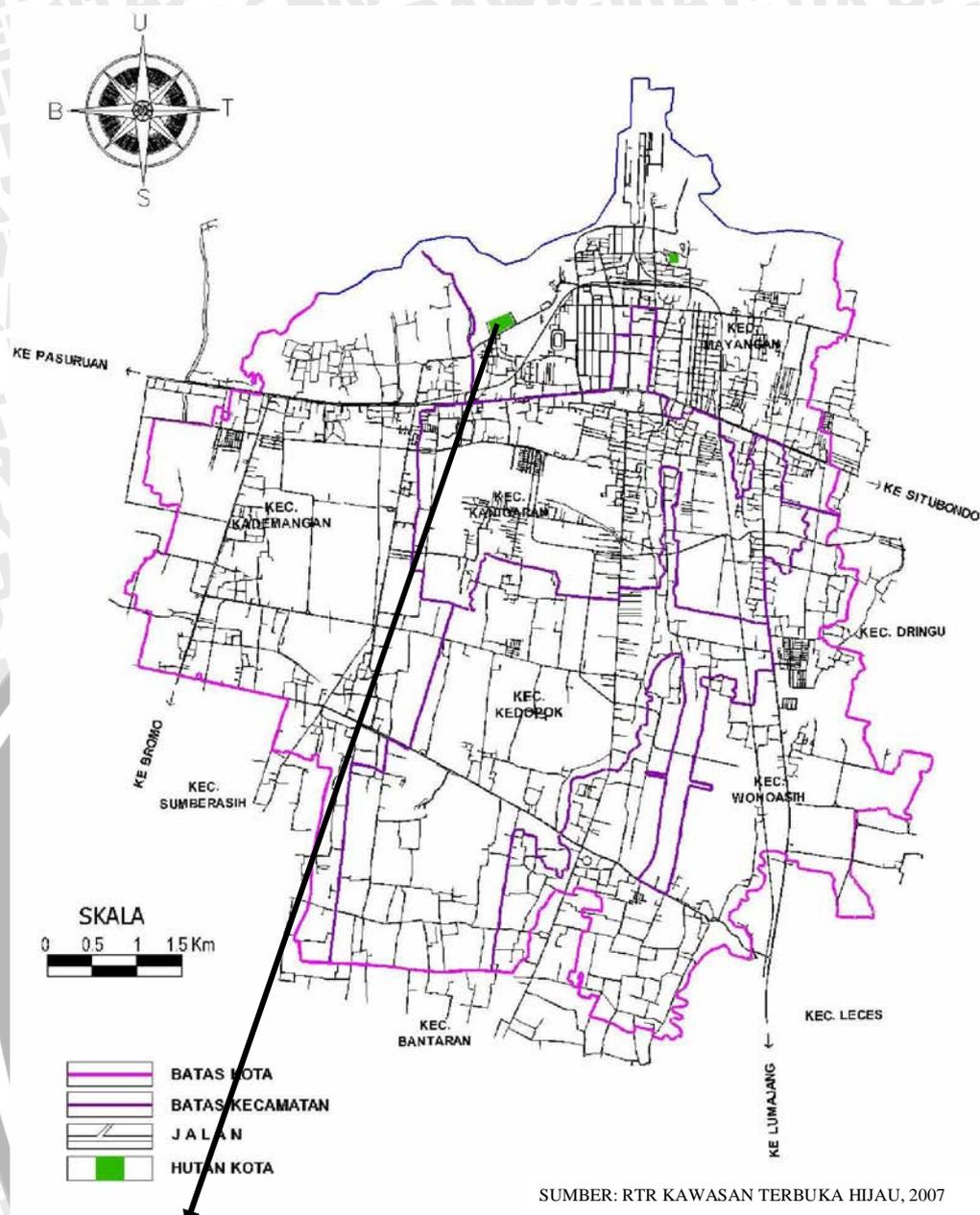
Hutan kota di Kota Probolinggo hanya terdapat dua yaitu di TPA (tempat pembuangan sampah akhir) Jalan Anggrek dan juga hutan di belakang mess KTI (Kutai Timber Indonesia). Untuk hutan kota di TPA Jalan Anggrek memiliki luas 1 (satu) hektar dengan vegetasi berupa pohon Tanjung, Glodokan dan Sawo Kecil. Hutan kota ini terletak di Kecamatan Mayangan, dan hutan kota ini sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan kesan asri dan hijau di sekitar lokasi tempat pembuangan sampah akhir. Sedangkan hutan kota KTI terletak di Kecamatan Mayangan, memiliki luas 0,48 hektar dengan vegetasi berupa pohon Tanjung dan Sawo Kecil.

Hutan Kota Probolinggo memiliki fungsi ekologis yang dapat ditunjukkan dengan adanya berbagai jenis tanaman yang terdapat didalamnya. Dalam memberikan fungsi ekologis, tanaman tersebut berfungsi sebagai penyegaran udara, penyerap air hujan, pengendali banjir, dan pengendali polusi.



SUMBER: RTR KAWASAN TERBUKA HIJAU, 2007

Gambar 4. 12 Peta Lokasi Hutan Kota Probolinggo



TPA Kota Probolinggo

Gambar 4. 13 Hutan Kota Probolinggo

D. Lapangan Olahraga

Olahraga adalah gerak badan untuk menyehatkan, menguatkan badan, pembentukan watak dan kepribadian serta sportifitas, dengan demikian akan tercipta manusia Indonesia yang berkualitas. Untuk membantu kebijakan memasyarakatkan olahraga, maka diperlukan lapangan olahraga terbuka guna meningkatkan aktivitas olahraga baik di lingkungan sekolah-sekolah, universitas maupun di kawasan permukiman. Fungsi ruang terbuka hijau kota lapangan olahraga ini antara lain sebagai wadah berbagai jenis kegiatan olahraga yang relevan dengan jenis lapangan olah raga, yaitu sepak bola, golf dan lainnya. Jadi peran lapangan terbuka olah raga selain menyediakan fasilitas olah raga dan pertemuan juga meningkatkan lingkungan sebagai paru-paru kota.

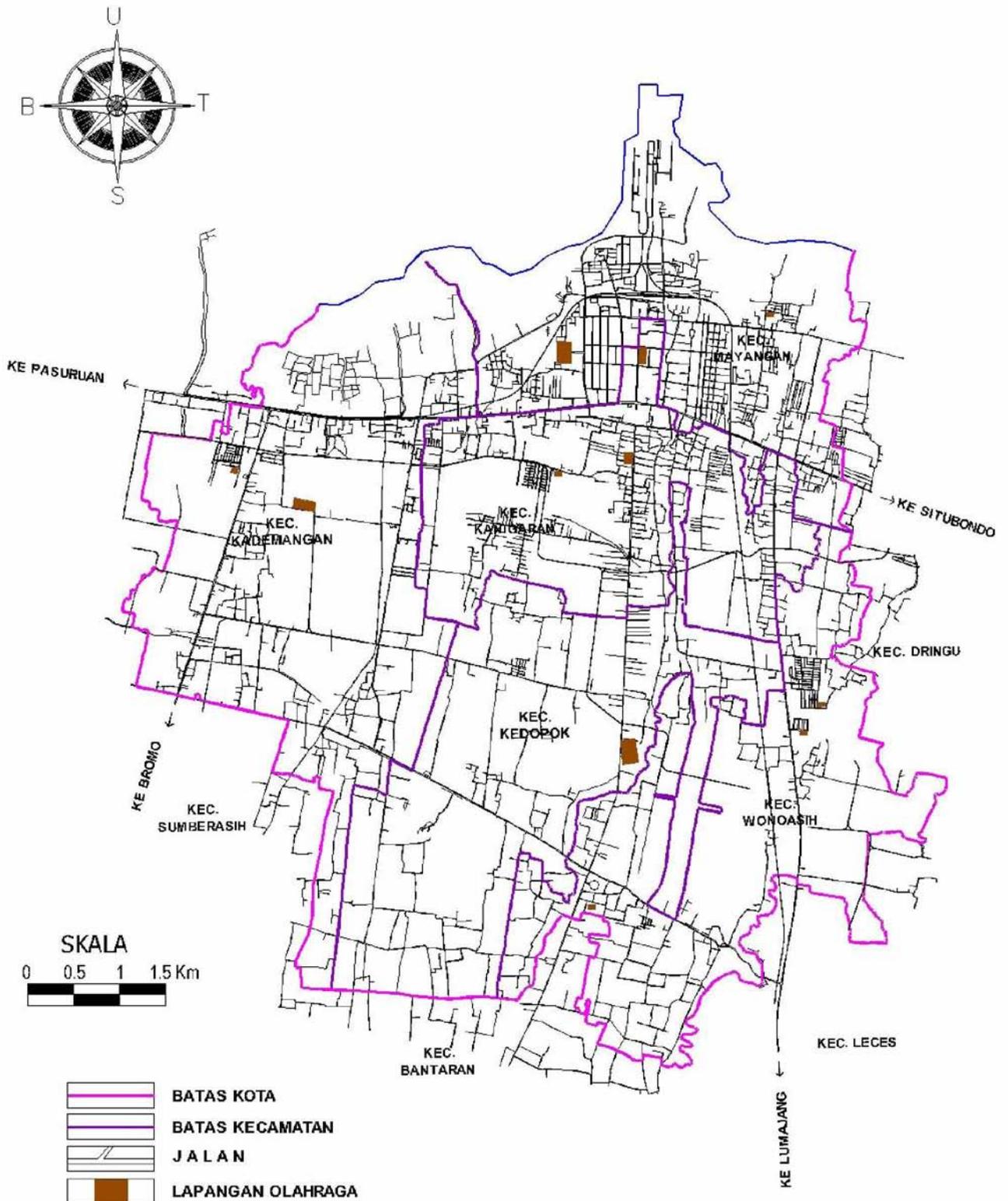
Lapangan terbuka dan lapangan olah raga di Kota Probolinggo selain GOR Kedopok dan Stadion Bayuwangga juga terdapat lapangan terbuka dan olah raga yang tersebar pada beberapa kelurahan. Luasan untuk masing-masing lapangan olahraga berkisar antara 600-800 m² untuk lapangan voli dan 3.000-10.000 m² untuk lapangan sepakbola. Luas ruang terbuka hijau untuk tiap lapangan terbuka dan olah raga di Kota Probolinggo rata-rata mencapai \pm 70% dari luas total lapangan tersebut. Lapangan olahraga di Kota Probolinggo baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat telah sesuai. Hal ini dapat dilihat pada luasan lapangan olahraga yang cukup luas sehingga mampu menampung berbagai kegiatan olahraga masyarakat. Sedangkan tanaman/vegetasi yang berada di dalamnya berupa semak dan rerumputan dapat berfungsi secara maksimal dalam penghijauan kota.

Adapun luas RTH lapangan terbuka dan olah raga per kecamatan di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Luas RTH Lapangan Terbuka dan Olah Raga di Kota Probolinggo

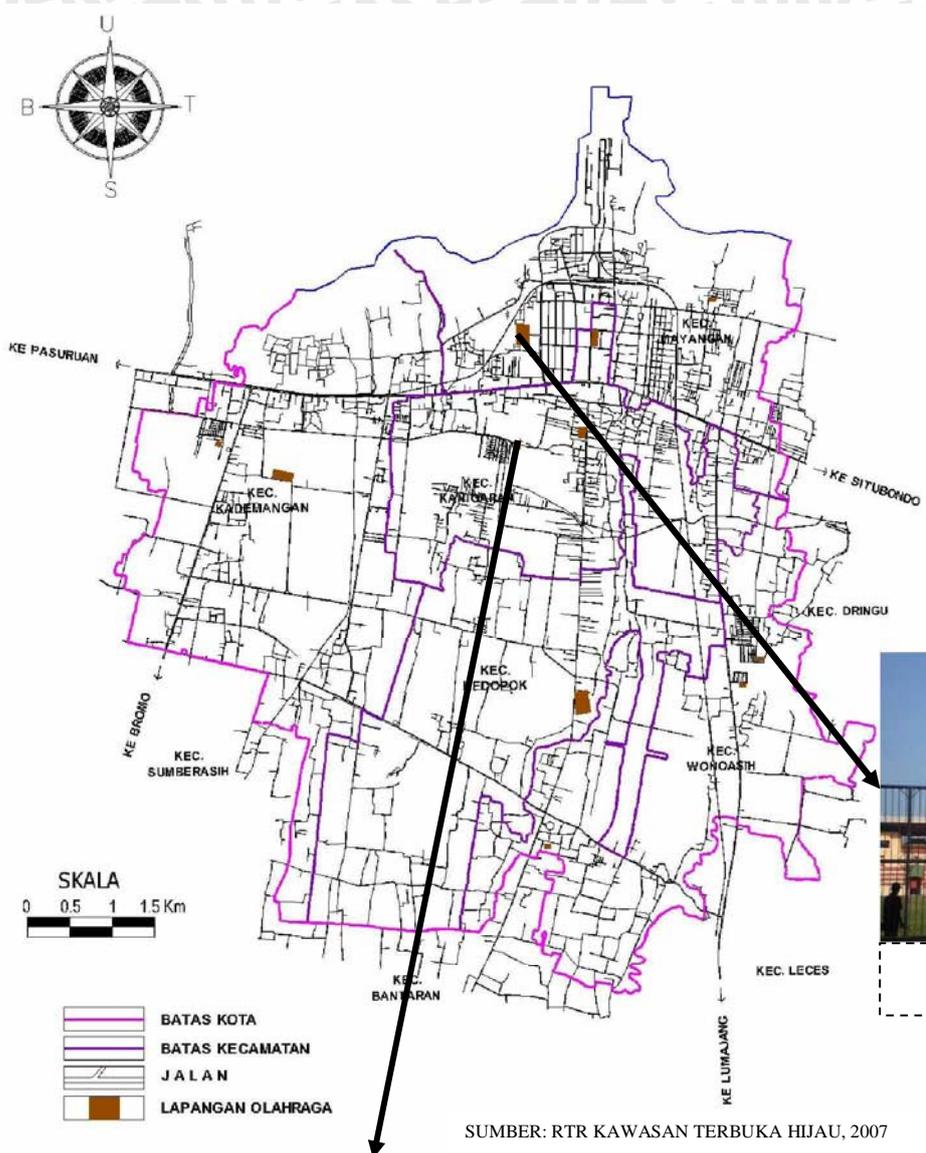
No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Mayangan	3,54
2	Kademangan	2,58
3	Kanigaran	4,89
4	Kedopok	4,14
5	Wonoasih	3,00
JUMLAH		18,15

Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau tahun 2007



SUMBER: RTR KAWASAN TERBUKA HIJAU, 2007

Gambar 4. 14 Peta Lokasi Lapangan Olahraga Kota Probolinggo



Stadion Bayuangga



Lapangan Olahraga Asabri

Gambar 4. 15 Lapangan Olahraga Kota Probolinggo

E. Jalur Pengaman Jalan, Median Jalan, Rel Kereta Api

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap jalan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas (UU No. 38/2004). Di samping kiri-kanan jalan bahkan median jalan perlu ditanami pepohonan, rerumputan dan tanaman perdu pada pinggiran jalur pergerakan

Dengan demikian setiap pembangunan jalan baru di perkotaan akan menambah cakupan hijau pepohonan yang ditanam di atas manfaat jalan, median jalan dan jalur pemisah yang sekaligus menyerap sisa pembakaran, debu maupun sebagai perlindungan dari teriknya panas matahari, sehingga akan memberikan kenyamanan bagi orang yang lewat atau berteduh di bawah pepohonan tersebut. Jaringan jalan berdasarkan fungsinya terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.

Pada jalur hijau di tepi jalan di Kota Probolinggo selain berupa taman juga berupa penanaman pohon di tepi jalan. Luasan ruang terbuka hijau jalur jalan pada jalan-jalan di Kota Probolinggo rata-rata mencapai $\pm 30\%$. Elemen pengisi jalur hijau tepi jalan berupa pohon Sono, Pohon angšana, Palembang, Mahoni, Glodokan Tiang, Cakar Emas dan sebagainya. Jalur pengaman jalan memiliki fungsi ekologis yang dapat dilihat dengan adanya tanaman pada sisi kiri dan kanan jalan. Fungsi ekologis tersebut diantaranya adalah sebagai penyegar udara, penyerap air, pengendali banjir, dan penyerap polusi. Adapun luas RTH jalur pengaman jalan dan median jalan per kecamatan di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4. 6 Luas RTH Jalur Pengaman Jalan dan Median Jalan di Kota Probolinggo

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Mayangan	14,08
2	Kademangan	9,99
3	Kanigaran	12,09
4	Kedopok	7,42
5	Wonoasih	13,86
JUMLAH		57,44

Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau tahun 2007

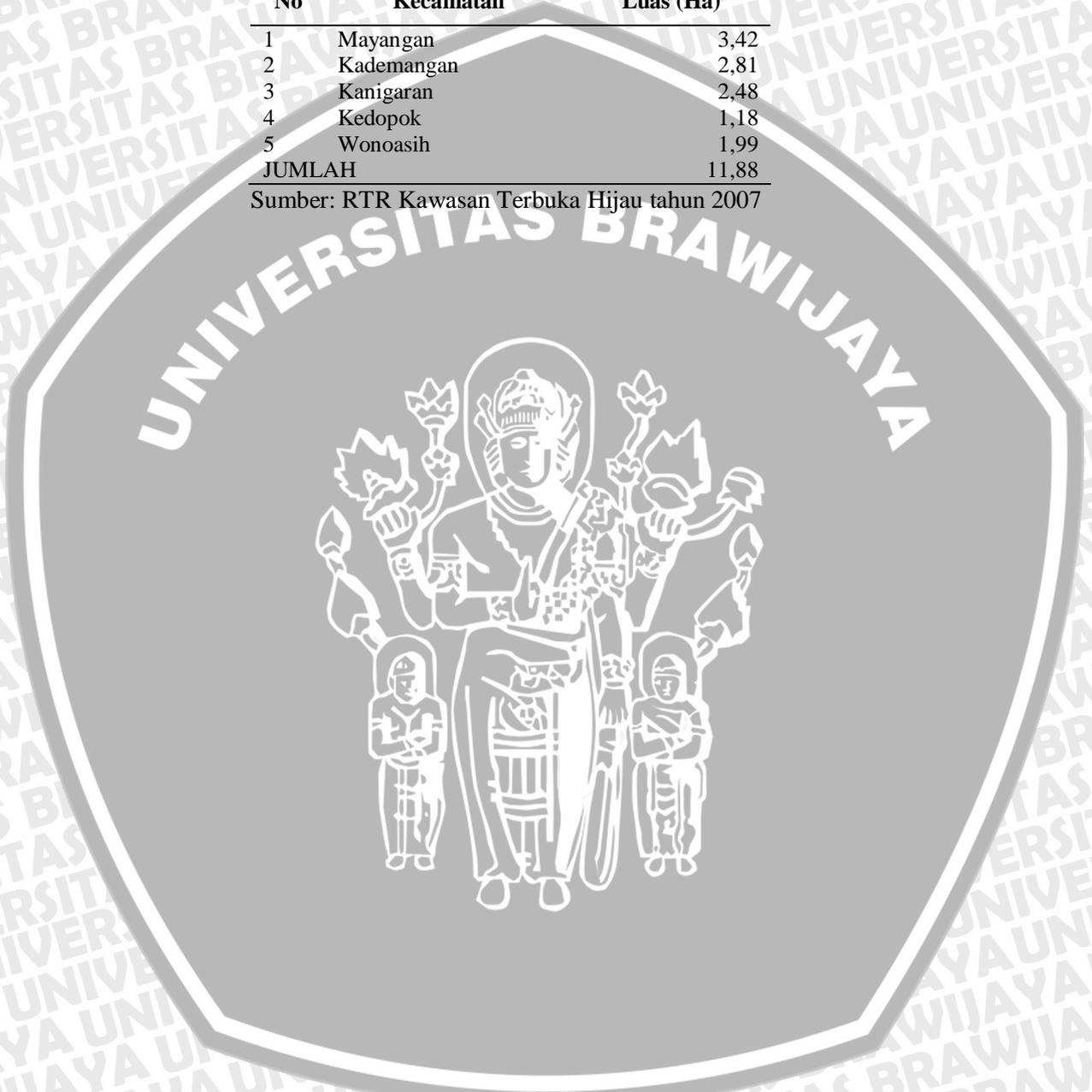
Ruang terbuka hijau di sekitar jalur kereta api selain berupa taman juga terdapat penghijauan tanaman lindung misalnya pohon angšana, sono, pohon jarak dan pohon asem. Rata-rata ruang terbuka hijau di sekitar rel kereta api Kota Probolinggo berjarak 12 meter dari badan rel kereta api (jarak antara badan rel KA sampai rumah). Namun kondisi demikian tidak berlaku untuk Kecamatan Mayangan dimana rata-rata ruang terbuka hijau di sekitar rel kereta api Kota Probolinggo berjarak 3,5 meter dari badan rel

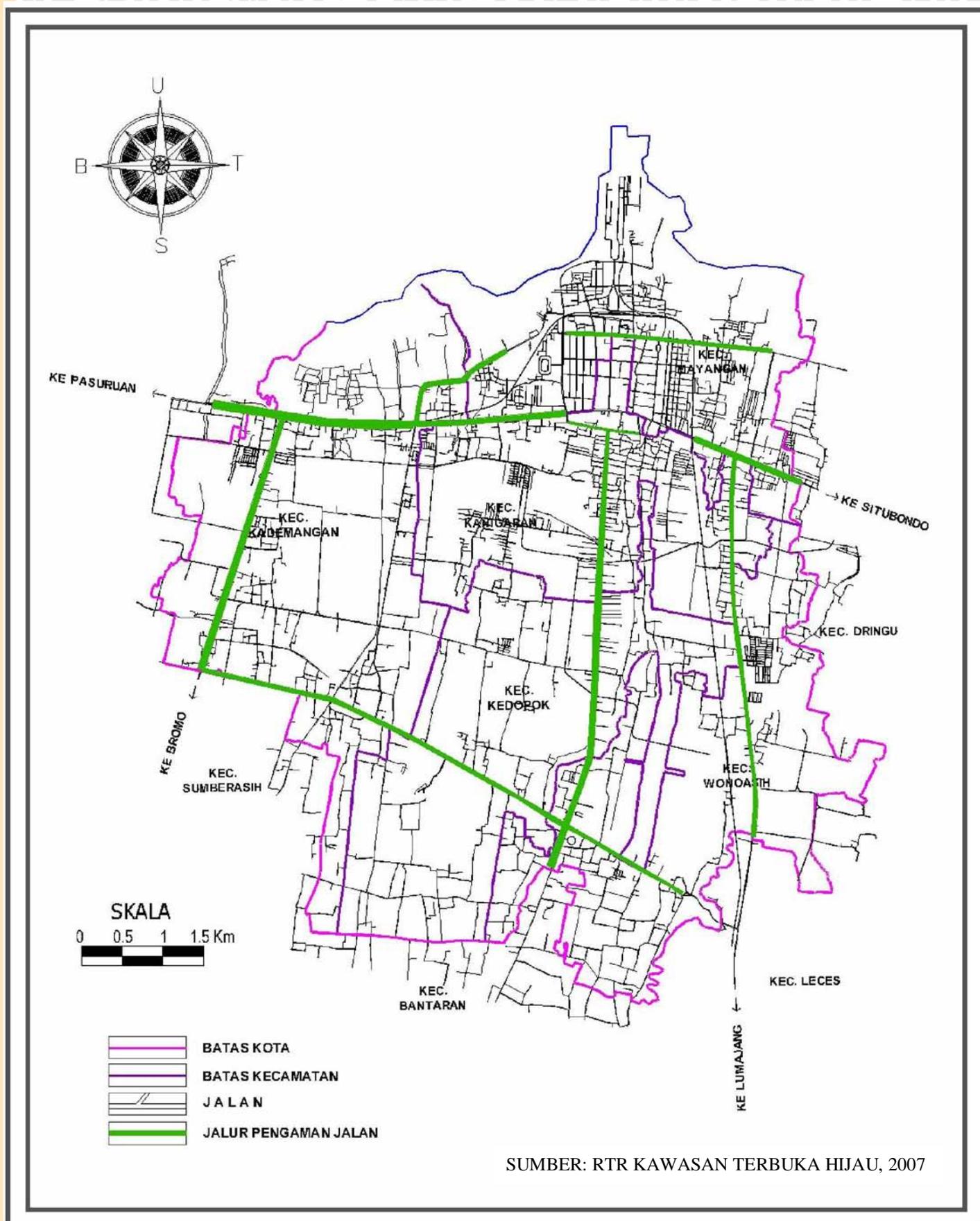
kereta api. Fungsi ruang terbuka hijau sekitar rel kereta api adalah fungsi ekologis sebagai penyegar udara, penyerap air, pengendali banjir, dan penyerap polusi. Adapun luas RTH jalur rel kereta api per kecamatan di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Luas RTH Jalur Hijau Rel Kereta Api di Kota Probolinggo

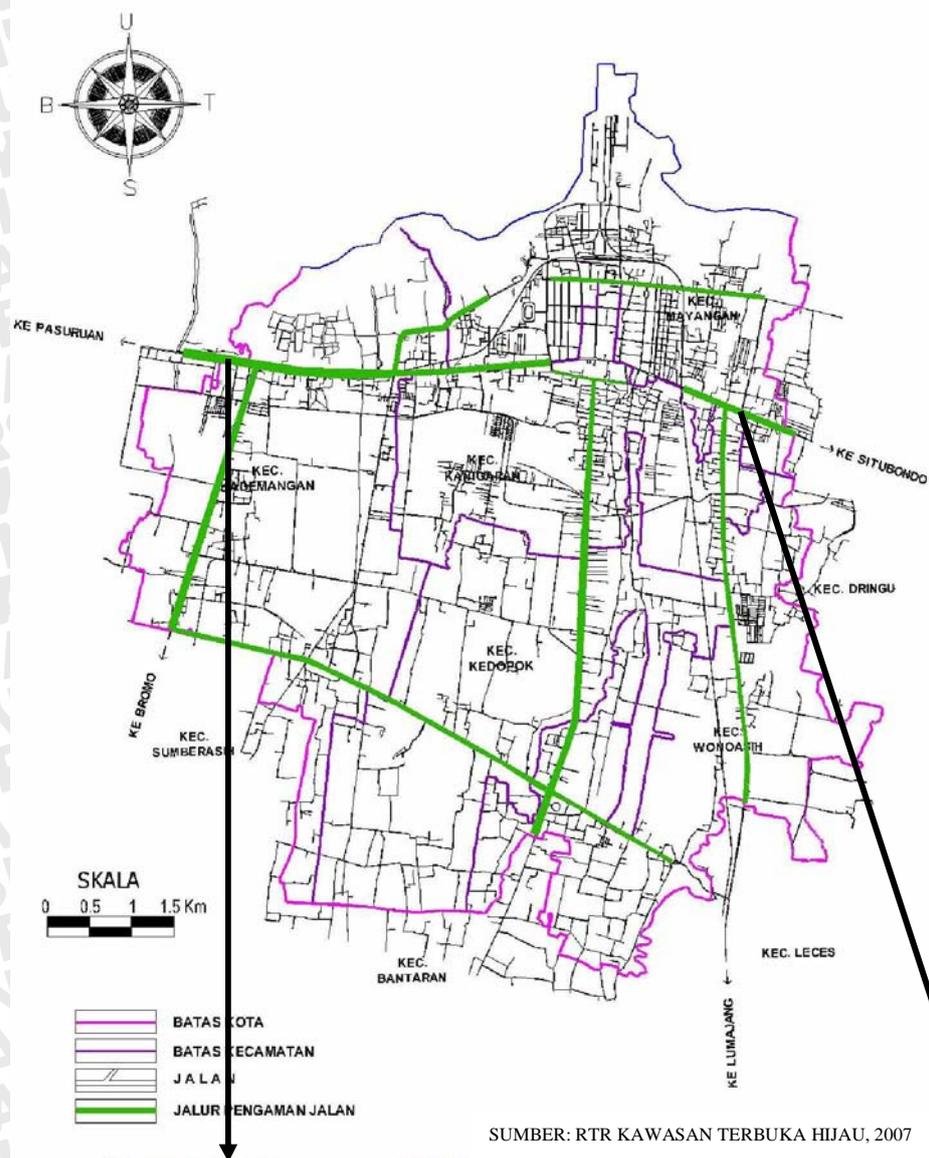
No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Mayangan	3,42
2	Kademangan	2,81
3	Kanigaran	2,48
4	Kedopok	1,18
5	Wonoasih	1,99
JUMLAH		11,88

Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau tahun 2007





Gambar 4. 16 Peta RTH Jalur Pengaman Jalan

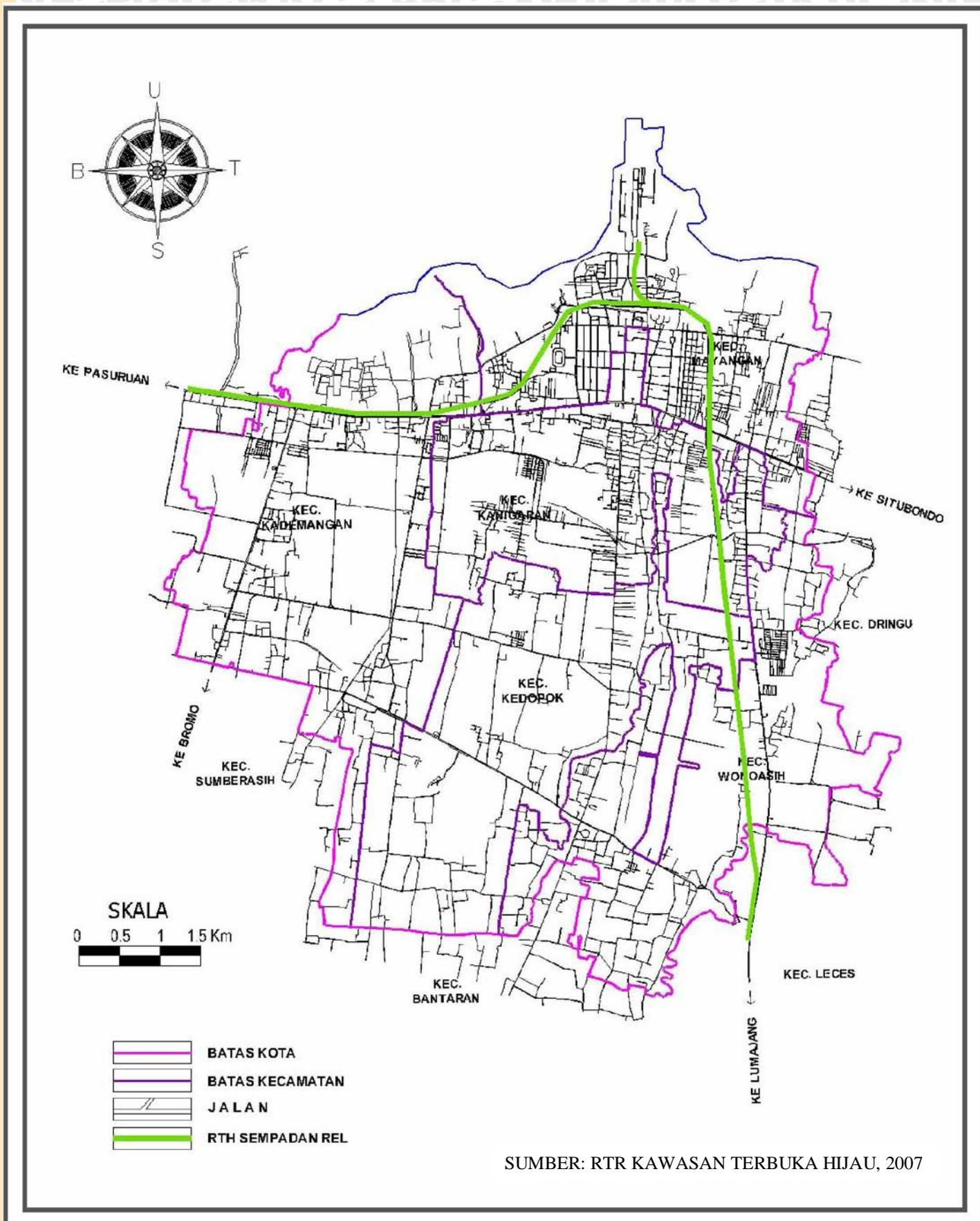


Jalan Soekarno Hatta



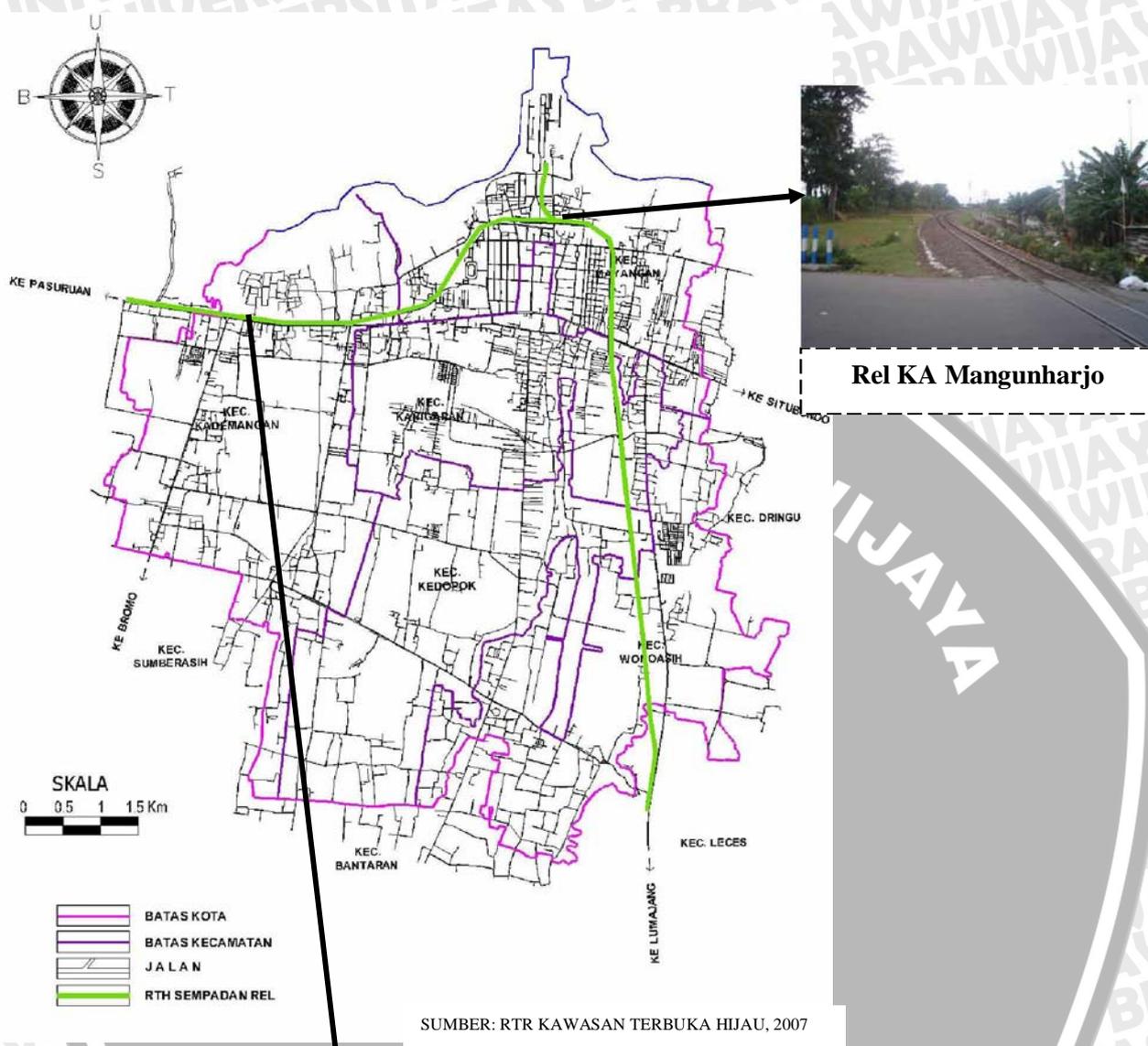
Jalan Panglima Sudirman

Gambar 4. 17 RTH Jalur Pengaman Jalan dan Median Jalan Kota Probolinggo



SUMBER: RTR KAWASAN TERBUKA HIJAU, 2007

Gambar 4. 18 Peta RTH Jalur Pengaman Rel Kereta Api Kota Probolinggo



Rel KA Mangunharjo



Rel KA di Jalan Soekarno Hatta

Gambar 4. 19 RTH Jalur Pengaman Rel Kereta Api Kota Probolinggo

F. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)

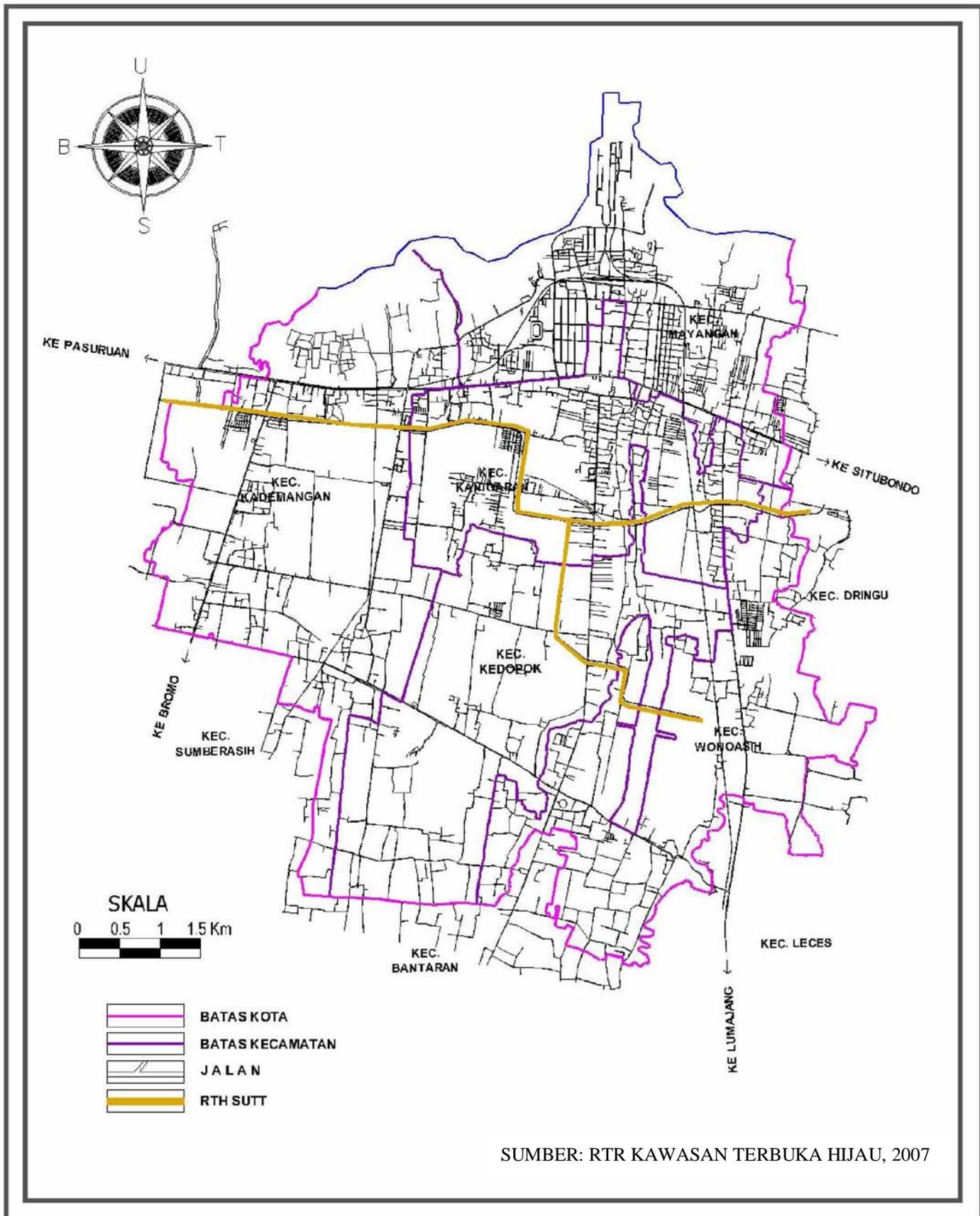
Salah satu utilitas yang terpenting adalah jaringan listrik. Jaringan listrik tegangan tinggi diusulkan menjadi satu dengan jaringan listrik tegangan rendah. Tanaman yang ditanam pada daerah di bawah jalur kawat listrik tegangan tinggi diusahakan menggunakan tanaman yang rendah atau boleh menggunakan tanaman yang dapat menjulang tinggi, namun pada batas ketinggian tertentu harus diberikan pemangkasan. Fungsi ekologis RTH jalur di bawah tegangan tinggi diantaranya adalah sebagai penyegar udara, penyerap air, pengendali banjir, dan penyerap polusi.

Tanaman disekitar jalur SUTT di Kota Probolinggo berupa rumput, pohon sono, mangga, pohon asem, pohon pete, pohon jarakan. Pohonnya rata-rata memiliki ketinggian 5-7 meter. Jarak antara SUTT dengan permukiman penduduk di Kota Probolinggo umumnya rata-rata berjarak \pm 12 meter dari sisi kanan/ kiri. Luas RTH jalur SUTT per kecamatan di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel 4.8.

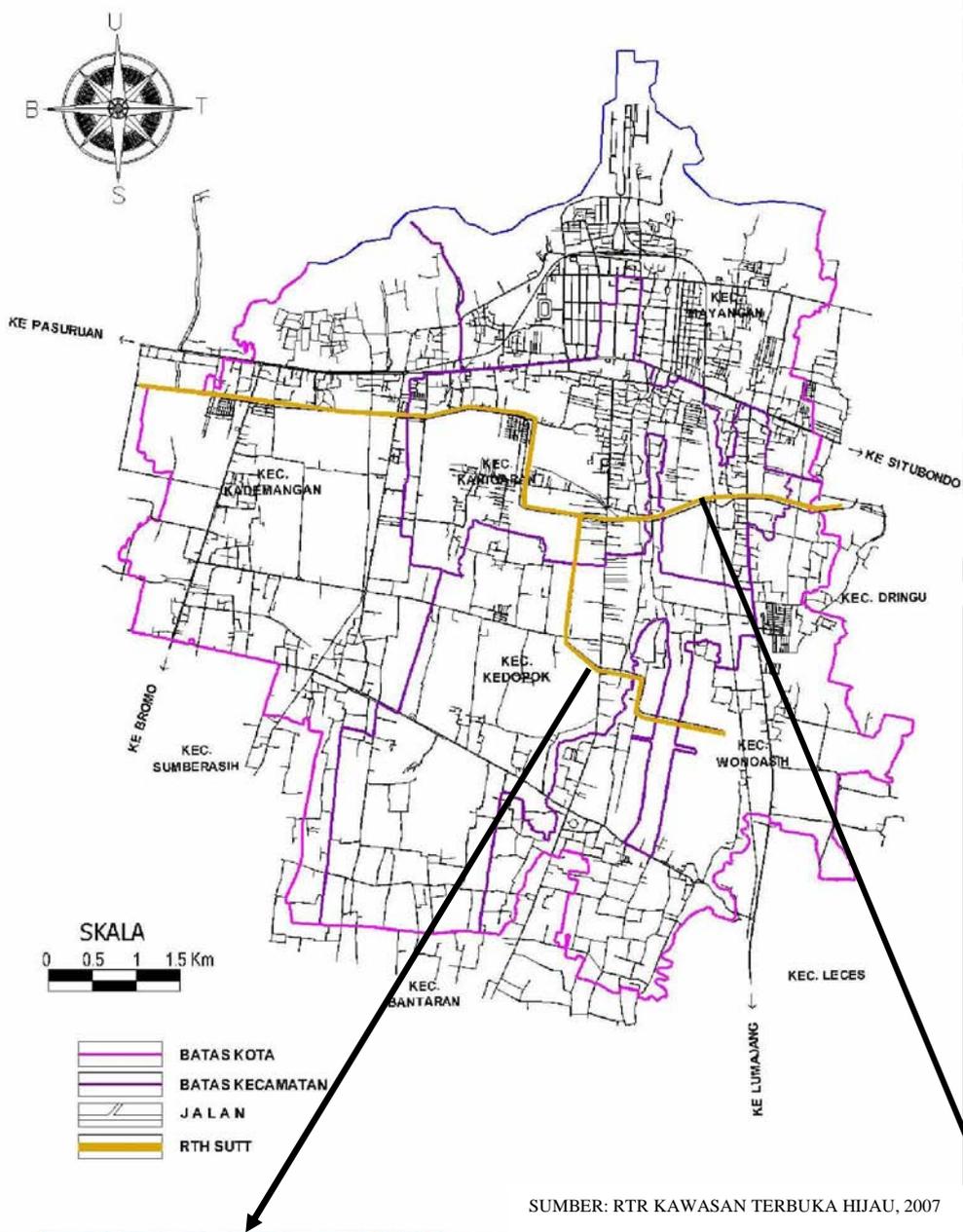
Tabel 4. 8 Luas RTH Jalur di Bawah Tegangan Tinggi di Kota Probolinggo

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Mayangan	-
2	Kademangan	6,46
3	Kanigaran	7,06
4	Kedopok	4,61
5	Wonoasih	7,15
JUMLAH		25,30

Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau tahun 2007



Gambar 4. 20 Peta RTH Jalur di Bawah SUTT Kota Probolinggo



Gambar 4. 21 RTH Jalur di Bawah SUTT



G. Sempadan Pantai dan Sungai

Di Kota Probolinggo desa yang mempunyai pesisir pantai adalah Kelurahan Ketapang, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Mayangan, Kelurahan Pilang dan Kelurahan Mangunharjo. Di sekitar pesisir pantai tersebut ditanami mangrove. Seperti halnya di daerah lainnya, maka peran ekosistem hutan mangrove adalah sebagai daerah asuhan, daerah mencari makanan dan daerah pemijahan berbagai biota laut. Hutan mangrove di Kota Probolinggo mempunyai kemampuan memberikan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, perumahan dan obat-obatan. Mangrove di Kota Probolinggo merupakan persediaan protein hewani dan nabati disamping mempunyai fungsi konstruksi lain seperti sebagai penopang, kaso, balok, panel, atap, pagar, papan dan perekat serta untuk berbagai pengobatan.

Pada tahun 2005, PT Kutai Timber Indonesia telah menghibahkan penanaman sebanyak \pm 5.000 bibit mangrove dan pada tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo melakukan penanaman sebanyak \pm 20.000 bibit mangrove. Luas RTH hutan mangrove di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4. 9 Luas RTH Hutan Mangrove di Kota Probolinggo

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Mayangan	51,10	49,00
2	Kademangan	53,00	51,00
3	Kanigaran	-	-
4	Kedopok	-	-
5	Wonoasih	-	-
JUMLAH		104,10	100,00

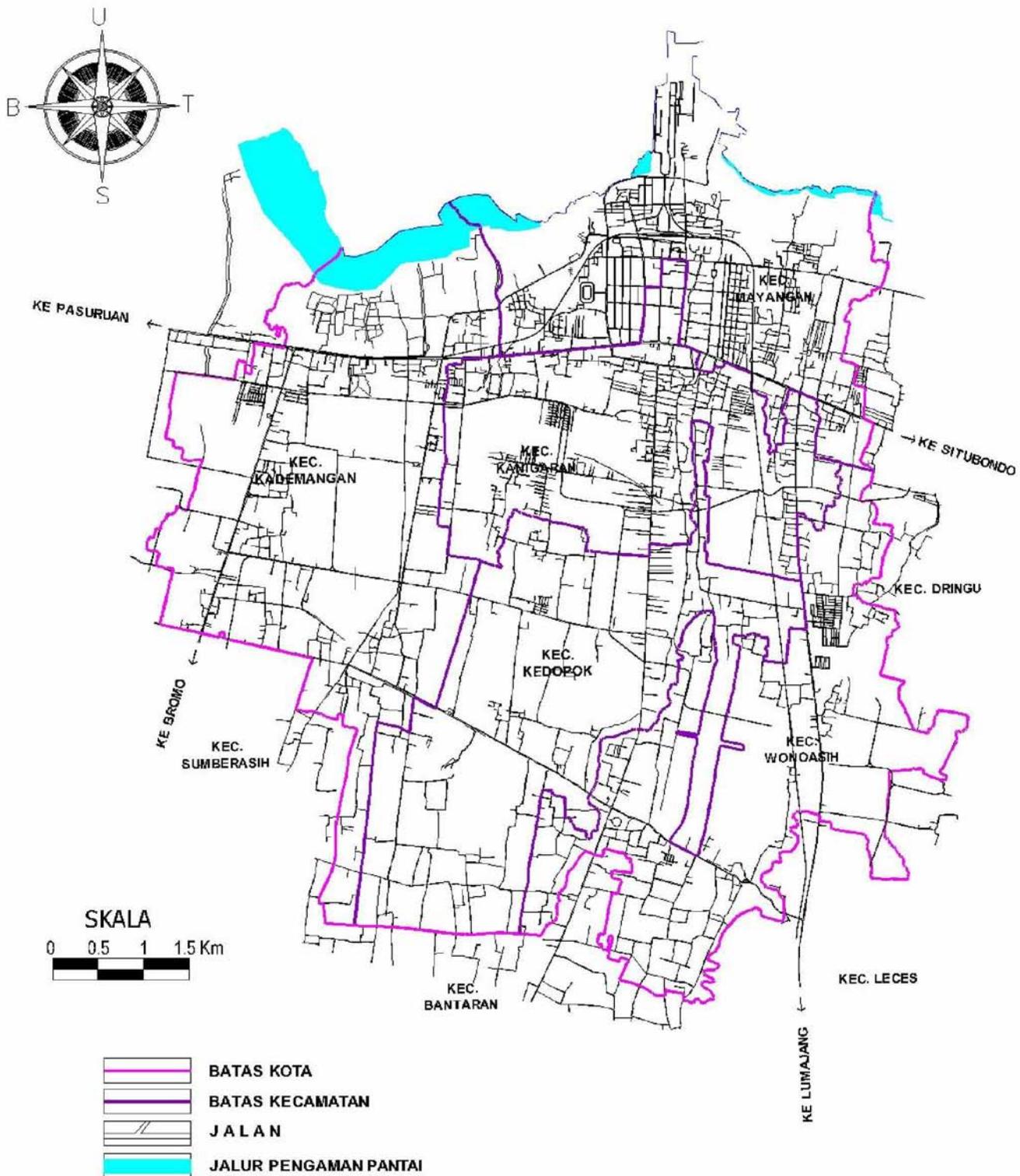
Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau tahun 2007

Adapun kondisi hutan mangrove di Kota Probolinggo, khususnya terkait hutan mangrove yang termasuk dilindungi, dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Kondisi Hutan Mangrove di Kota Probolinggo

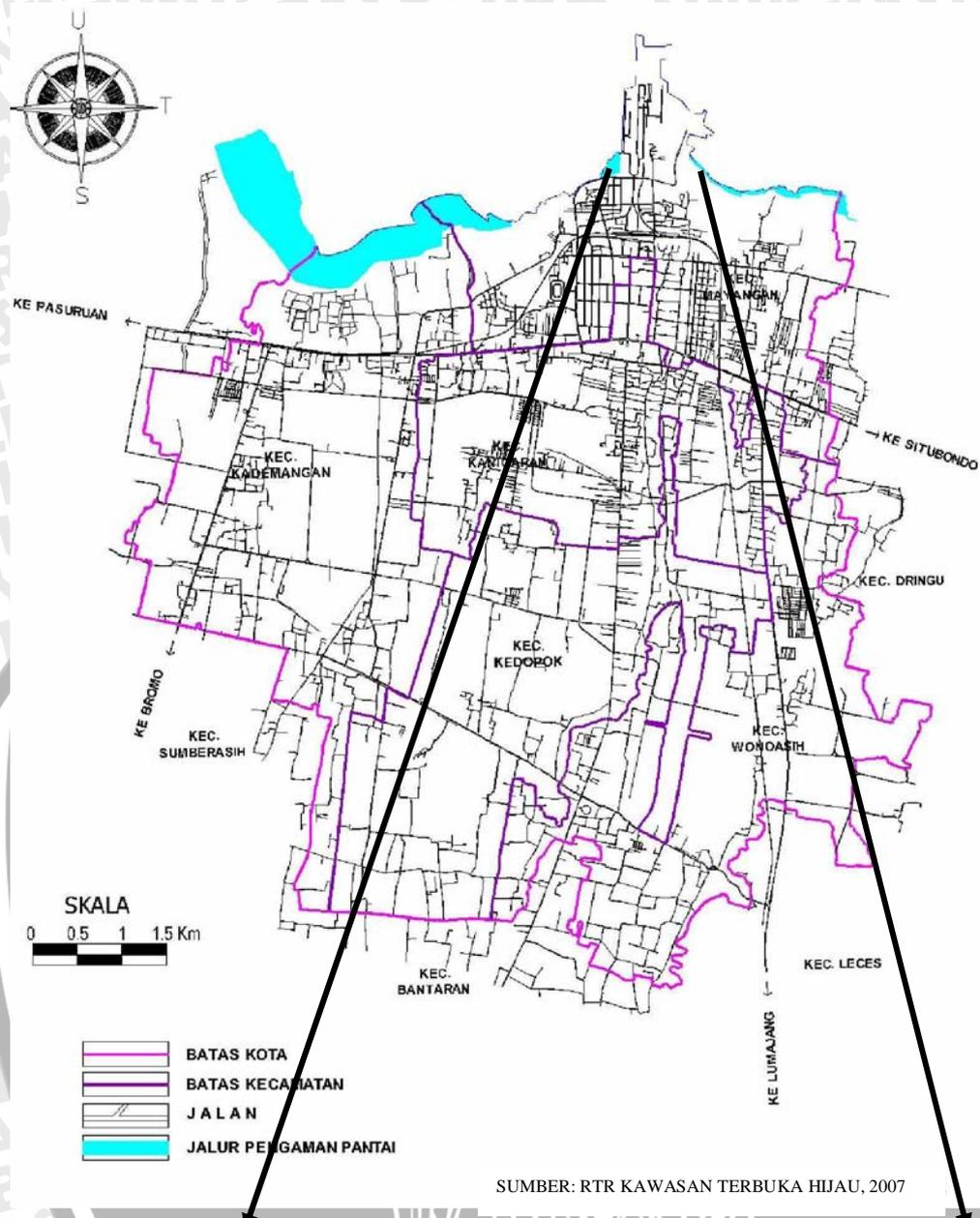
No	Lokasi	Luas Pada Awal Tahun (km ²)	Perubahan Bersih Selama Satu Tahun	Luas Dilindungi (km ²)
1	Mangunharjo	2,03	0,01	2,04
2	Mayangan	0,1	0	0,1
3	Sukabumi	1,54	0,01	1,55
4	Pilang	0,77	0,03	0,8
5	Ketapang	1,52	0,01	1,53
JUMLAH		5,96	0,06	6,02

Sumber: Status Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2006



SUMBER: RTR KAWASAN TERBUKA HIJAU, 2007

Gambar 4. 22 Peta RTH Sempadan Pantai Kota Probolinggo



SUMBER: RTR KAWASAN TERBUKA HIJAU, 2007



Gambar 4. 23 Sempadan Pantai di Kota Probolinggo



Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Daerah sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai (PerMen PU No. 63/1993). Kawasan sempadan sungai ini merupakan kawasan perlindungan setempat. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, melindungi kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Jadi bagi sempadan sungai yang telah digunakan dan bertentangan dengan tujuan itu perlu ditanggulangi agar penggunaan sempadan sungai dapat mendukung tujuan perlindungan kawasan.

Mengingat air merupakan salah satu unsur alam yang selalu mengalir ke daerah yang lebih rendah adan agar aliran tidak terganggu, maka perlu dilakukan pengamanan di daerah aliran sungai (DAS) dengan cara pengamanan sempadan sungai sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas kota dan menghijaukan jalur kiri kanan sempadan sungai secara teratur. Tanaman di sekitar sempadan sungai di Kota Probolinggo berupa pohon angkana, pohong, mangga, bambu, pohon randu, pohon jarakan serta tanaman perdu. Untuk Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kanigaran area ruang terbuka hijau jalur hijau sempadan sungai berjarak rata-rata 10 meter dari pinggir badan sungai sampai rumah. Sedang tiga kecamatan lainnya (Kecamatan Kedopok, Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Wonoasih), rata-rata mempunyai jarak berkisar 50 meter dari pinggir badan sungai sampai rumah.

Tabel 4. 11 Nama Sungai dan Panjangnya di Kota Probolinggo

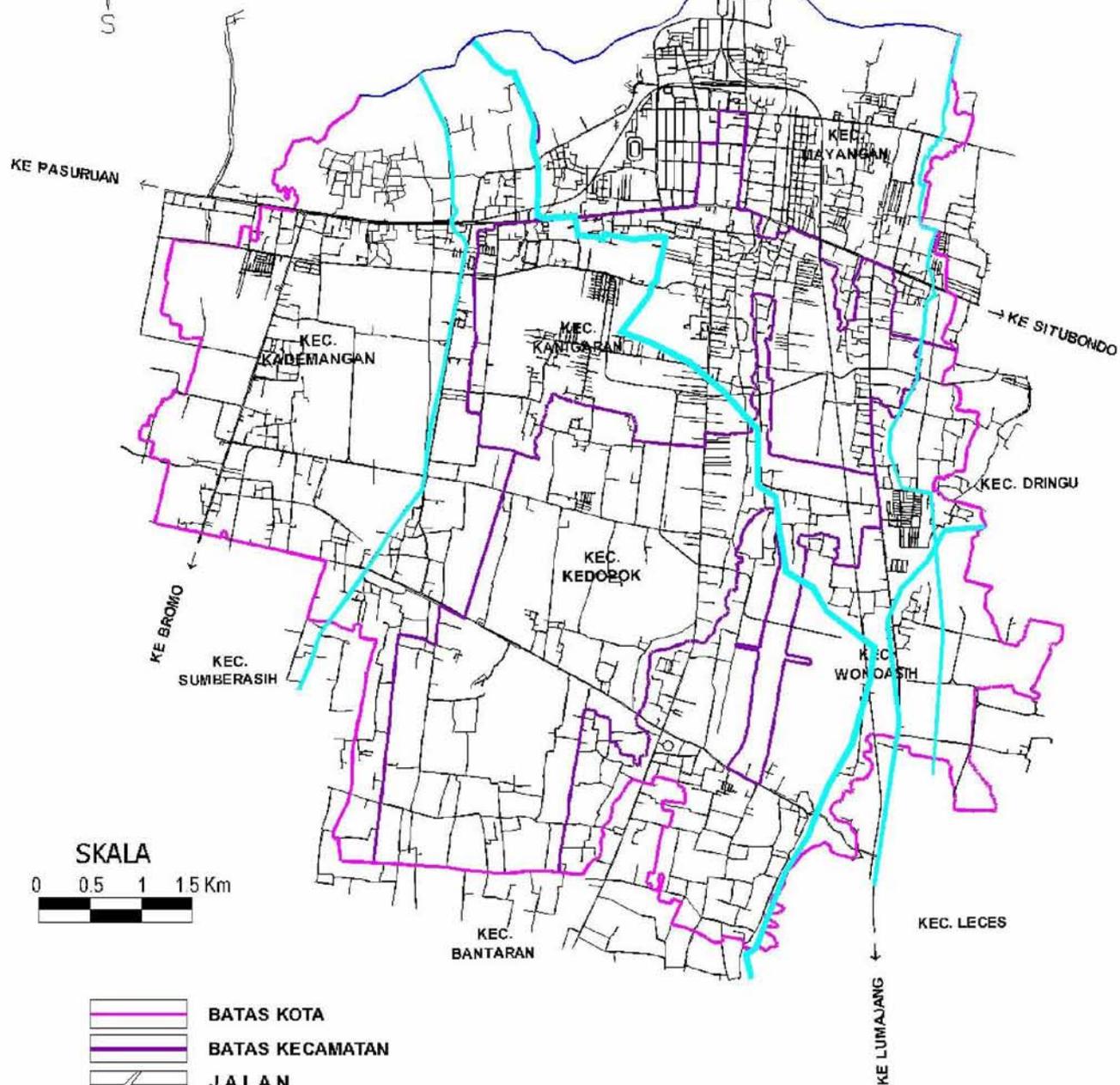
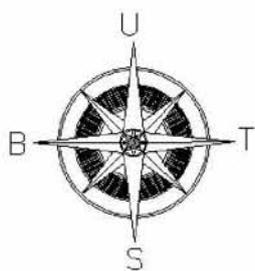
No	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Kali Kedunggaleng	3,40
2	Kali Umbul	4,35
3	Kali Banger	6,40
4	Kali Legundi	6,30
5	Kali Kasbah	6,00
6	Kali Pancur	3,20

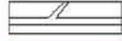
Sumber: RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009-2028

Tabel 4. 12 Luas RTH Sempadan Sungai di Kota Probolinggo

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Mayangan	9,88
2	Kademangan	56,77
3	Kanigaran	6,42
4	Kedopok	19,79
5	Wonoasih	91,21
JUMLAH		184,07

Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau, tahun 2007

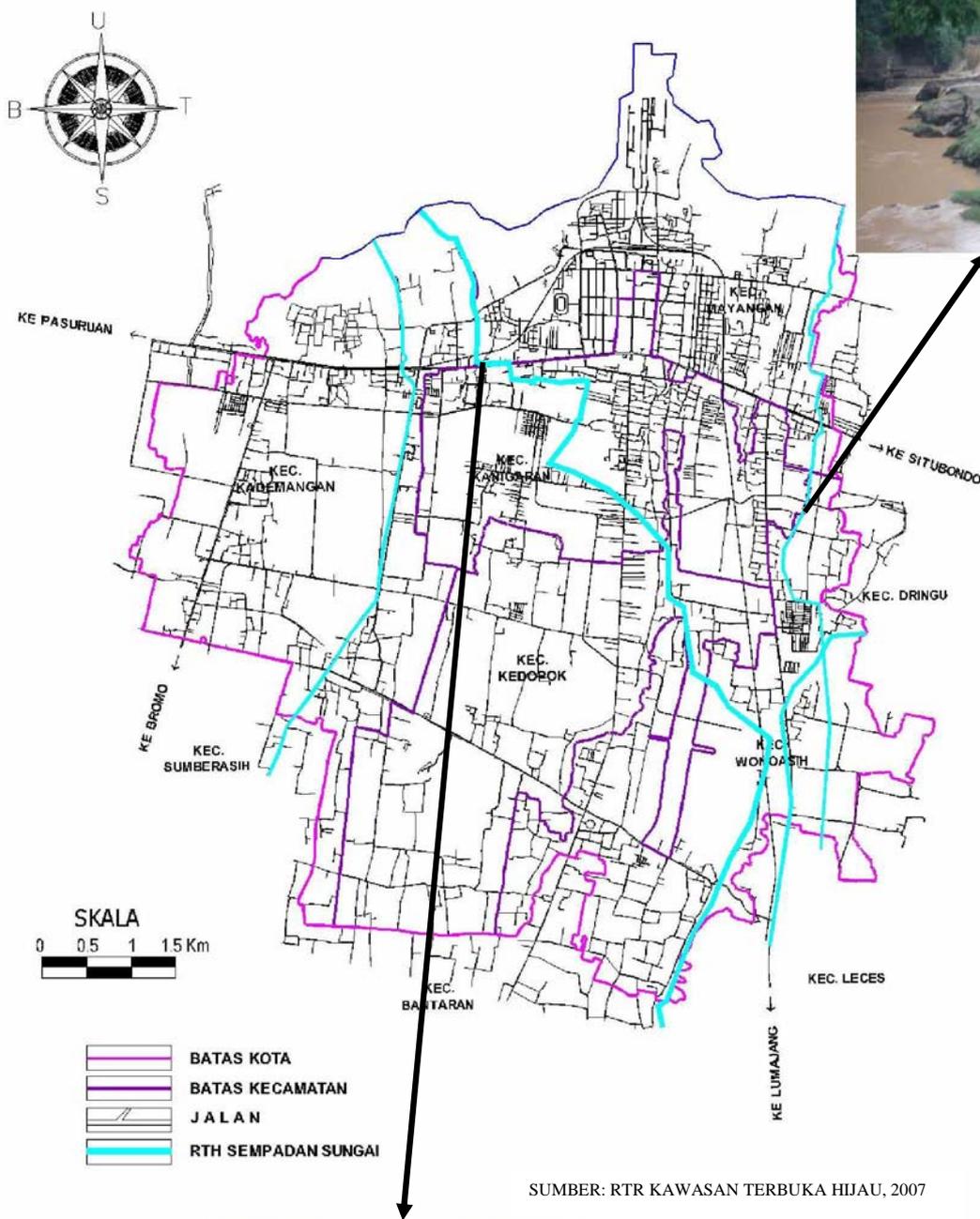


-  BATAS KOTA
-  BATAS KECAMATAN
-  JALAN
-  RTH SEMPADAN SUNGAI

SUMBER: RTR KAWASAN TERBUKA HIJAU, 2007

Gambar 4. 24 Peta RTH Sempadan Sungai Kota Probolinggo





Gambar 4. 25 Sempadan Sungai Kota Probolinggo

H. Pemakaman Umum

Tempat pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan tempat pemakaman jenazah bagi setiap orang, dikategorikan atas 5 macam yaitu makam umum, makam Islam, makam Kristen, makam Tionghoa dan makam Pahlawan. Sesuai dengan standar pemakaman sebagai ruang terbuka hijau, kondisi beberapa pemakaman di Kota Probolinggo masih sesuai dengan PP No. 9/1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Beberapa elemen yang kurang sesuai adalah kurang tersedianya lampu penerangan pada areal pemakaman.

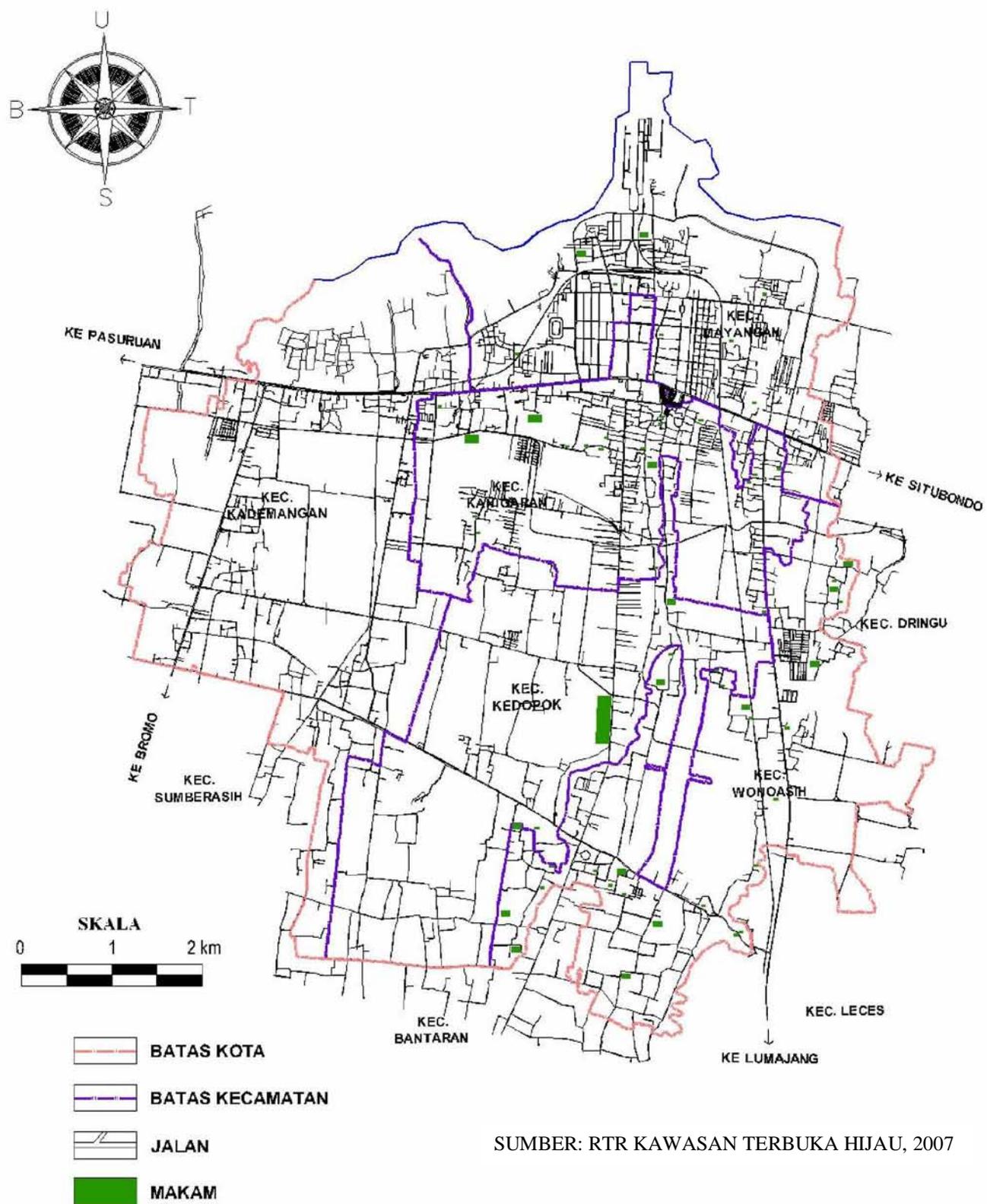
Pemakaman di Kota Probolinggo lebih banyak merupakan pemakaman milik swasta atau milik pribadi masyarakat. Dari 24 unit makam, hanya 3 unit diantaranya yang merupakan makam milik pemerintah. Makam milik pemerintah tersebut antara lain makam pahlawan, makam kristen, dan makam Wonoasih (*Kong Hu Chu/ Cina*). Pemerintah kota khususnya dari Badan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa selama ini pemerintah banyak menemui kesulitan dalam hal lahan untuk membuka areal pemakaman. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat membuat sendiri pemakaman lingkungan yang dibangun diatas lahan milik pribadi warga.

Elemen RTH pada makam antara lain berupa pohon kamboja, beringin dan sebagainya. Vegetasi-vegetasi tersebut tidak ditanam di seluruh areal pemakaman, sehingga hanya sekitar 40% dipergunakan untuk tempat makam (kuburan). Adapun luas makam per kecamatan di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel 4.13.

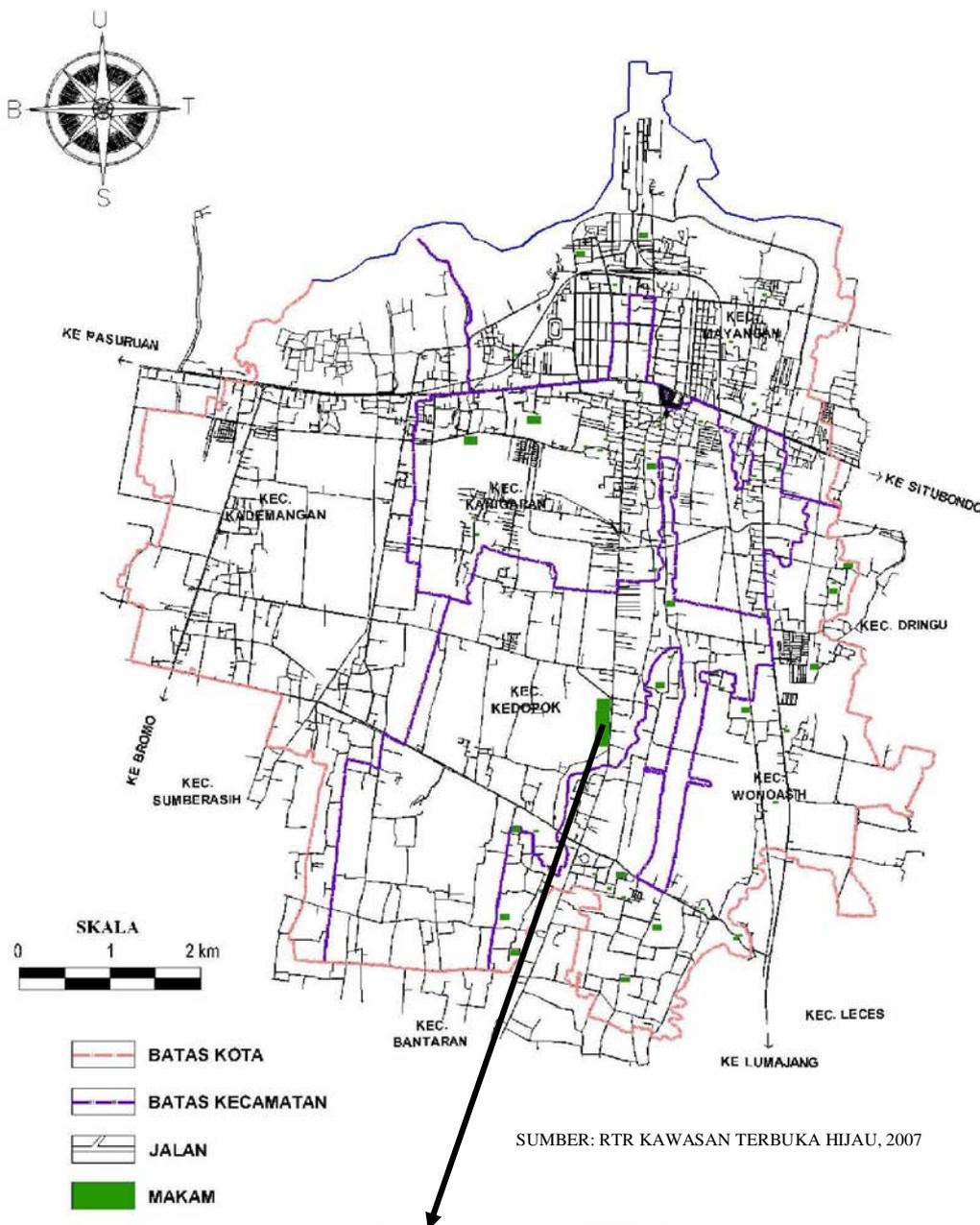
Tabel 4. 13 Luas RTH Makam di Kota Probolinggo

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Mayangan	8,46
2	Kademangan	8,37
3	Kanigaran	8,43
4	Kedopak	9,24
5	Wonoasih	2,22
JUMLAH		36,72

Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau tahun 2007



Gambar 4. 26 Peta Lokasi Pemakaman Kota Probolinggo



Makam Cina

Gambar 4. 27 Pemakaman di Kota Probolinggo

I. Taman Lingkungan Perumahan

Kawasan perumahan merupakan kawasan yang paling dominan diantara kawasan yang terbangun di Kota Probolinggo, sebagian besar dari daerah perumahan ini juga berlokasi di pusat kota. Pola perkembangan kawasan permukiman di Kota Probolinggo terbagi menjadi tiga kawasan permukiman yaitu kampung, real estate dan bukan real estate. Pola perkembangan kampung di Kota Probolinggo yaitu mengikuti pola jaringan jalan utama maupun jalan lokal yang ada di Kota Probolinggo. Kampung yang berada di Kota Probolinggo kecenderungan perkembangannya dominan ke arah selatan dan barat kota. Pola perkembangan real estate di Kota Probolinggo berkembang ke arah barat dari Kota Probolinggo menempati lahan yang kosong dan menyediakan jalan sendiri. Sedangkan permukiman bukan *real estate* terdapat di sekitar pusat kota terutama di sebelah timur dan barat, berkembang di sebelah selatan pusat kota. Kawasan ini berkembang mengikuti pola jaringan jalan yang ada.

Kondisi taman lingkungan perumahan dan permukiman di Kota Probolinggo sangat minim. Tidak banyak permukiman dan perumahan yang memiliki fasilitas taman lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya lahan dan semakin banyaknya jumlah rumah di lingkungan tersebut. Taman lingkungan pada kawasan permukiman dan perumahan umumnya merupakan taman pasif yang berfungsi untuk memperindah kawasan.

Pekarangan rumah dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau walaupun luasnya relatif kecil, akan tetapi penilaian fungsi sebagai ruang terbuka hijau dapat dilihat dalam sudut pandang makro pada tiap kelurahan, kecamatan atau kawasan tertentu. Sisa lahan pada tiap pekarang rumah yang memanfaatkan sebagai ruang terbuka jika dilihat sebagai satu kesatuan wilayah, maka akan dapat memberikan ketersediaan ruang terbuka hijau bagi suatu kota. Luasan ruang terbuka hijau pekarangan perumahan di Kota Probolinggo berbeda untuk lima kecamatan yang ada. Luasan ruang terbuka hijau pekarangan perumahan di Kota Probolinggo beragam, dimana untuk wilayah yang tergolong padat (Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kanigaran) luas areal ruang terbuka hijau mencapai $\pm 20\%$ dari luas rumah. Sementara itu untuk Kecamatan Kademangan, Kedopok dan Wonoasih; luas areal ruang terbuka hijaunya mencapai $\pm 35\%$ dari luas per rumah. Luas RTH pekarangan perumahan di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4. 14 Luas RTH Pekarangan Perumahan di Kota Probolinggo

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Mayangan	76,83
2	Kademangan	143,72
3	Kanigaran	94,86
4	Kedopak	143,06
5	Wonoasih	144,28
JUMLAH		602,75

Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau, tahun 2007

J. Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial

Seluruh taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial di Kota Probolinggo merupakan taman pasif. Umumnya berbentuk linear di sepanjang bangunan gedung. Hal ini berfungsi untuk memperindah lansekap bentuk bangunan. Kantor walikota Probolinggo merupakan kompleks perkantoran yang berada di Kecamatan Kanigaran tepatnya di Jalan Panglima Sudirman. Komplek perkantoran ini terdiri dari bangunan yang tidak rapat sehingga dapat menyisakan beberapa lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai taman lokal. Kondisi taman lokal yang terdapat di area ini sudah terawat baik, mulai dari tanaman perdu sampai pohon-pohon yang besar. Jenis vegetasi yang berada di komplek perkantoran ini juga bervariasi dari palem, angšana, cemara serta terdapat beberapa tanaman penghias pada tiap-tiap kota.

Kawasan perkantoran dan tempat latihan militer yang terdapat di Kelurahan Tisnonegaran tepatnya di Jalan Soekarno Hatta juga menyediakan ruang terbuka hijau yang luas. Kondisi bangunan pada kawasan militer tersebut tidak penuh dan jarak antar bangunan renggang, sehingga banyak menyisakan lahan kosong. Lahan kosong yang ada dimanfaatkan sebagai lapangan, vegetasi didominasi oleh rumput untuk penutup tanah serta terdapat pohon di sekelilingnya. Vegetasinya meliputi mangga, cemara, angšana serta beberapa tanaman hias. Taman lingkungan pada kawasan perkantoran dan gedung komersial umumnya merupakan taman pasif yang berfungsi untuk memperindah kawasan.

Selain komplek perkantoran yang besar seperti disebutkan di atas, juga masih terdapat kawasan perkantoran dalam skala kecil yang terdapat di Kota Probolinggo yang masih mempertahankan KDB maksimal sampai 70%, misalnya kawasan perkantoran di Jalan Hayam Wuruk, Mastrip, Jl. Suroyo. Luasan ruang terbuka hijau pekarangan kantor di Kota Probolinggo rata-rata mencapai $\pm 30\%$ dari luas area per kantor. Adapun luas RTH pekarangan perkantoran di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4. 15 Luas RTH Pekarangan Perkantoran di Kota Probolinggo

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Mayangan	10,80
2	Kademangan	1,68
3	Kanigaran	19,01
4	Kedopak	0,68
5	Wonoasih	0,50
JUMLAH		32,67

Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau, tahun 2007

Kondisi ruang terbuka hijau yang terdapat di area ini terawat cukup baik, mulai dari tanaman perdu sampai pohon-pohon yang besar. Jenis vegetasi yang berada di kompleks perkantoran ini juga bervariasi dari palem, angkana, cemara serta terdapat beberapa tanaman penghias.

Kawasan pusat perdagangan eceran (pertokoan) pada saat ini menempati areal yang diantaranya berlokasi di sekitar Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Pahlawan yang menjual barang-barang kebutuhan primer, sekunder dan tersier dan mempunyai skala pelayanan kota dan regional.

Pola perkembangan kawasan perdagangan di Kota Probolinggo terpusat di pusat kota mengikuti jaringan jalan berbentuk linier di sepanjang jalan arteri primer, misal Jalan Raya Bromo, Jalan Mastrip, Jalan KH Mansyur, Jalan Teuku Umar, Jl. Dr Sutomo, Jl. Brigjen Katamso dan Jl. Gatot Subroto. Kawasan perdagangan pada umumnya tidak memiliki ruang terbuka hijau (0%), sehingga seluruh area lahannya difungsikan untuk ruang terbangun (bangunan).

Kawasan industri/ pergudangan di Kota Probolinggo berada di sebelah utara terletak di sekitar pelabuhan dan berkembang di sekitar pinggiran pantai dekat pertambakan. Secara umum penyebaran pola kawasan industri/ gudang di Kota Probolinggo menyebar tetapi orientasinya masih mengikuti pada kemudahan pencapaian, terutama jalan. Untuk pergudangan dan industri berada di sebelah utara orientasinya adalah Pelabuhan Probolinggo dimana untuk memudahkan pengangkutan terutama orientasinya transportasi laut selain transportasi darat. Lokasi industri di kota Probolinggo terpusat di dua (2) lokasi yaitu sekitar pelabuhan dan di sekitar Jalan Brantas. Orientasinya adalah untuk memudahkan perangkutan baik tenaga kerja maupun hasil produksi.

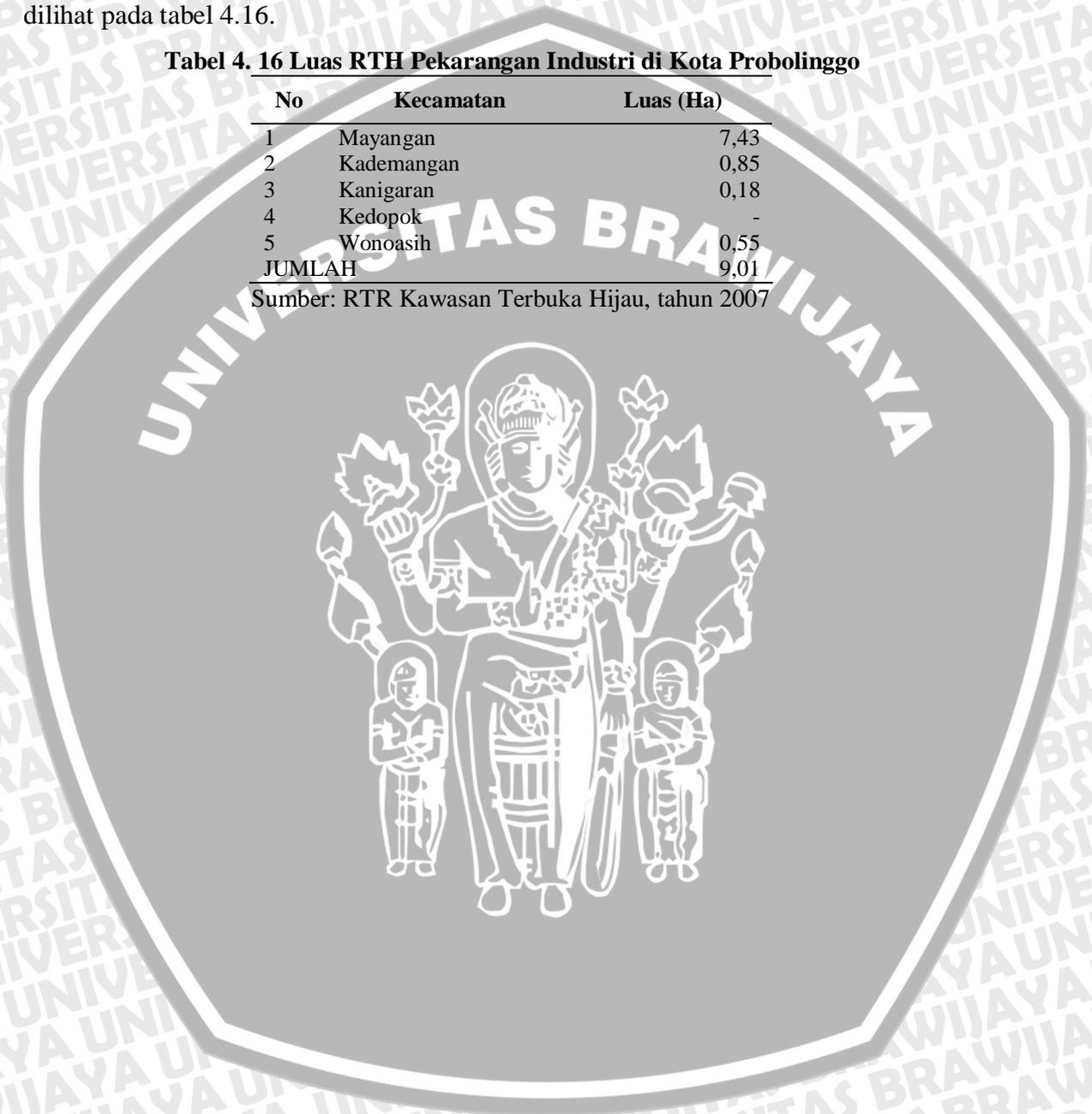
Kawasan industri ini memberikan lahan yang dapat difungsikan sebagai ruang terbuka hijau yang disesuaikan dengan anjuran pemerintah untuk kawasan industri. Ruang terbuka hijau yang terdapat di kawasan ini berupa taman yang tertata rapi di dalam area pabrik. Kawasan industri ini belum mempunyai RTH yang mengelilingi

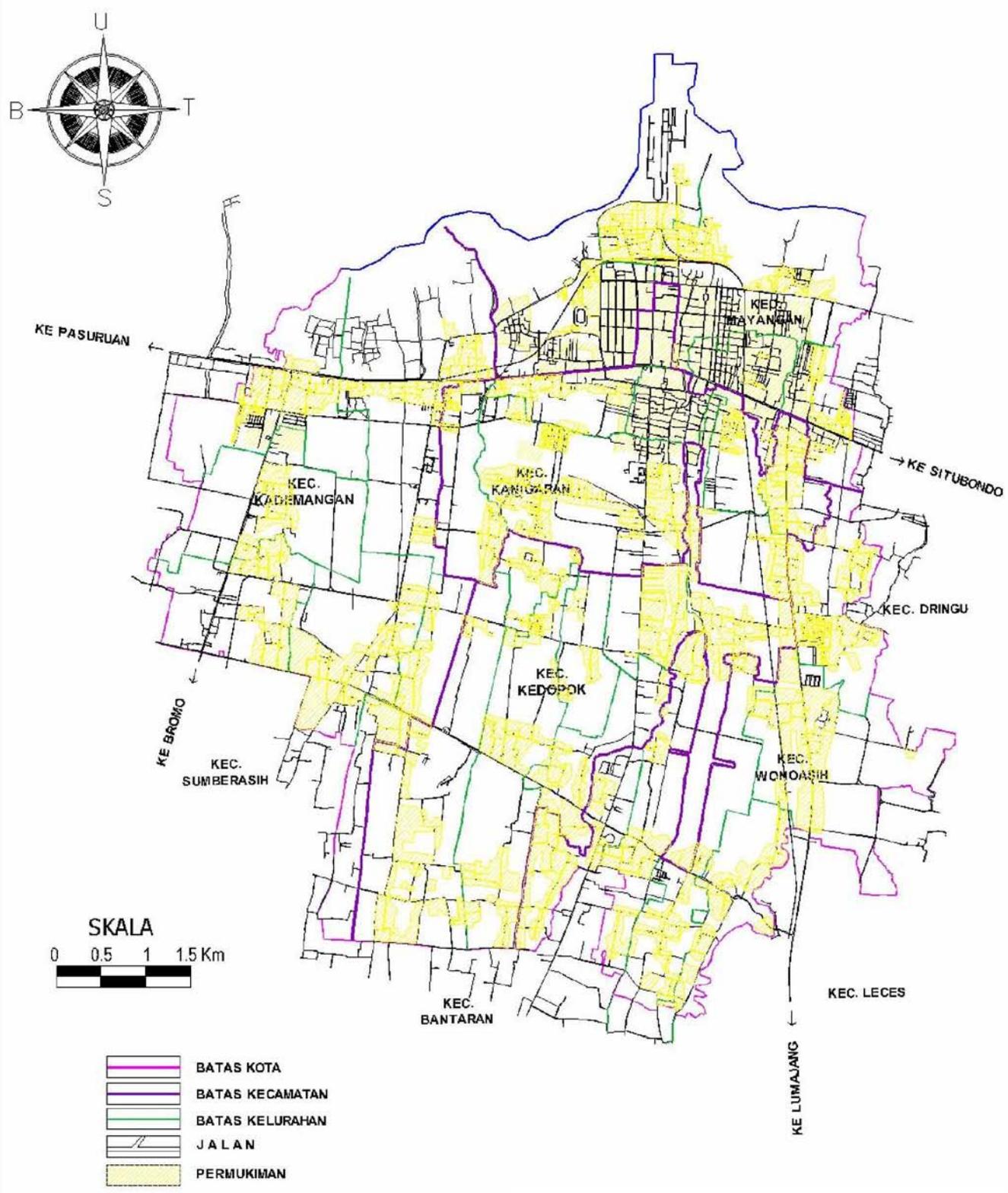
kawasan industri sebagai *buffer area* yang berfungsi untuk pembatas. Jenis vegetasi yang terdapat ditanam tersebut antara lain pohon angkana, mahoni serta beberapa tanaman perdu. Luas bangunan tiap industri yang ada di Kota Probolinggo rata-rata hampir mencapai $\pm 90\%$ dari total luas lahan, sehingga luasan ruang terbuka hijau tergolong kecil. Adapun luas RTH pekarangan industri di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4. 16 Luas RTH Pekarangan Industri di Kota Probolinggo

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Mayangan	7,43
2	Kademangan	0,85
3	Kanigaran	0,18
4	Kedopak	-
5	Wonoasih	0,55
JUMLAH		9,01

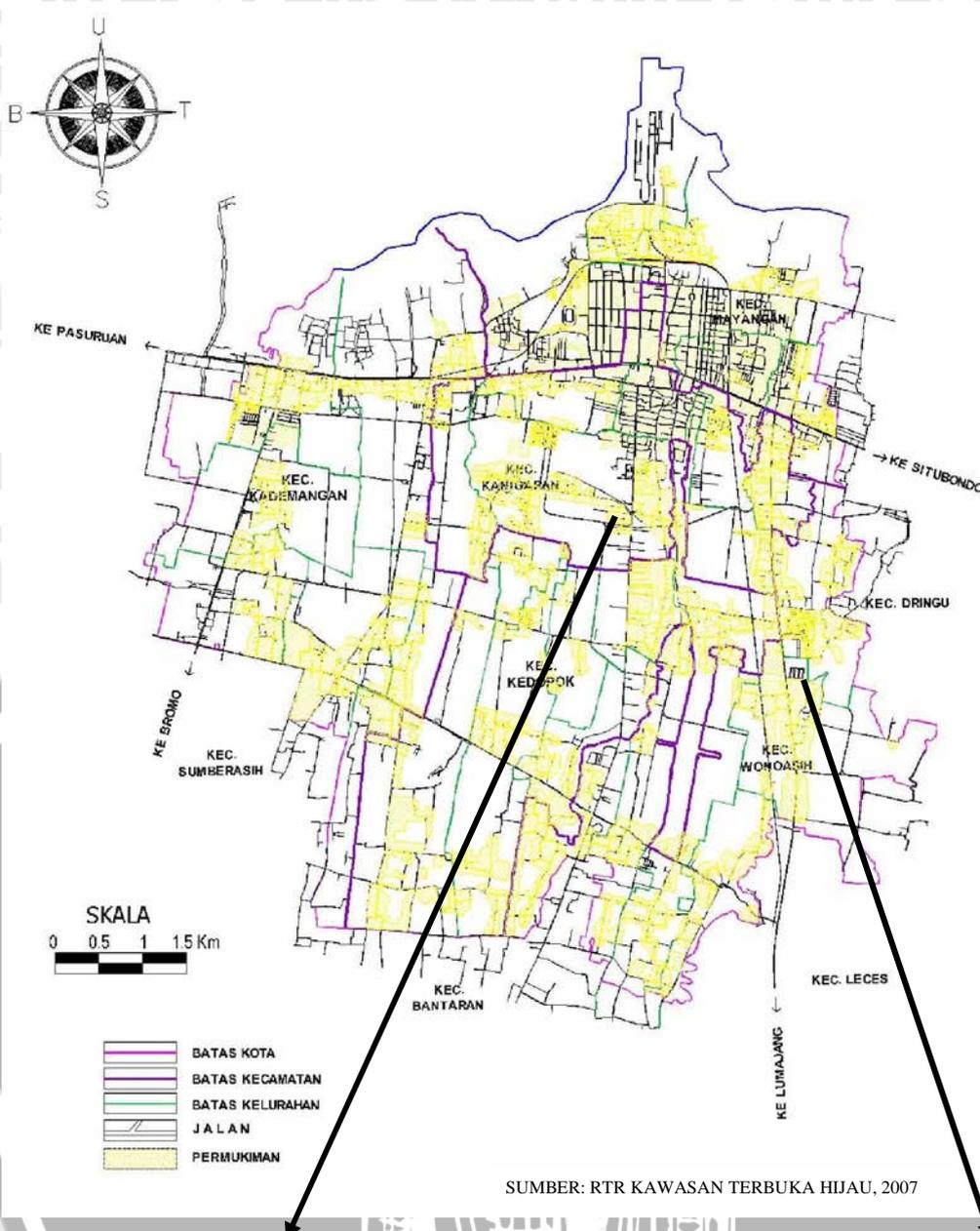
Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau, tahun 2007





SUMBER: RTR KAWASAN TERBUKA HIJAU, 2007

Gambar 4. 28 Peta Perumahan Kota Probolinggo

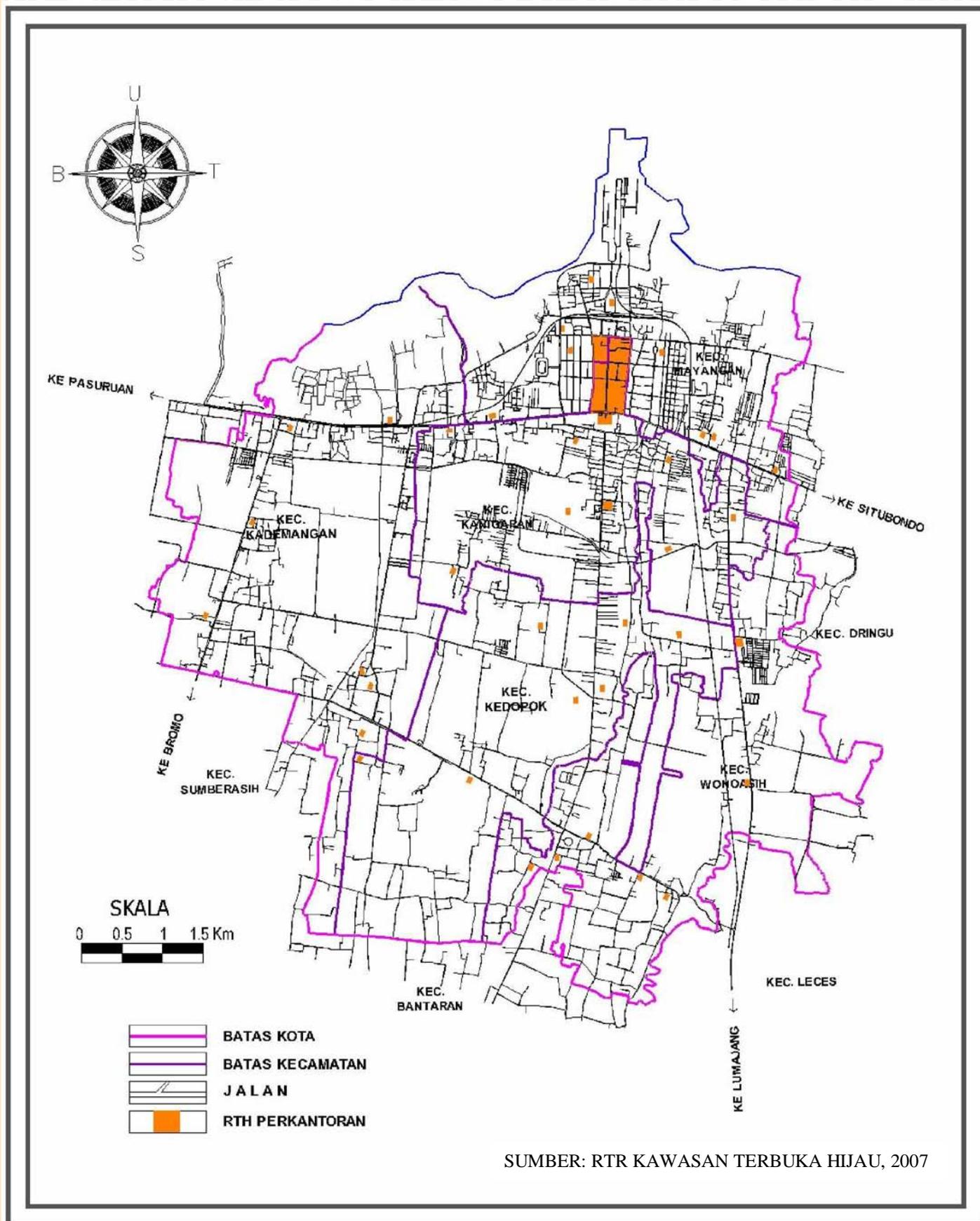


Perumahan Kedopok

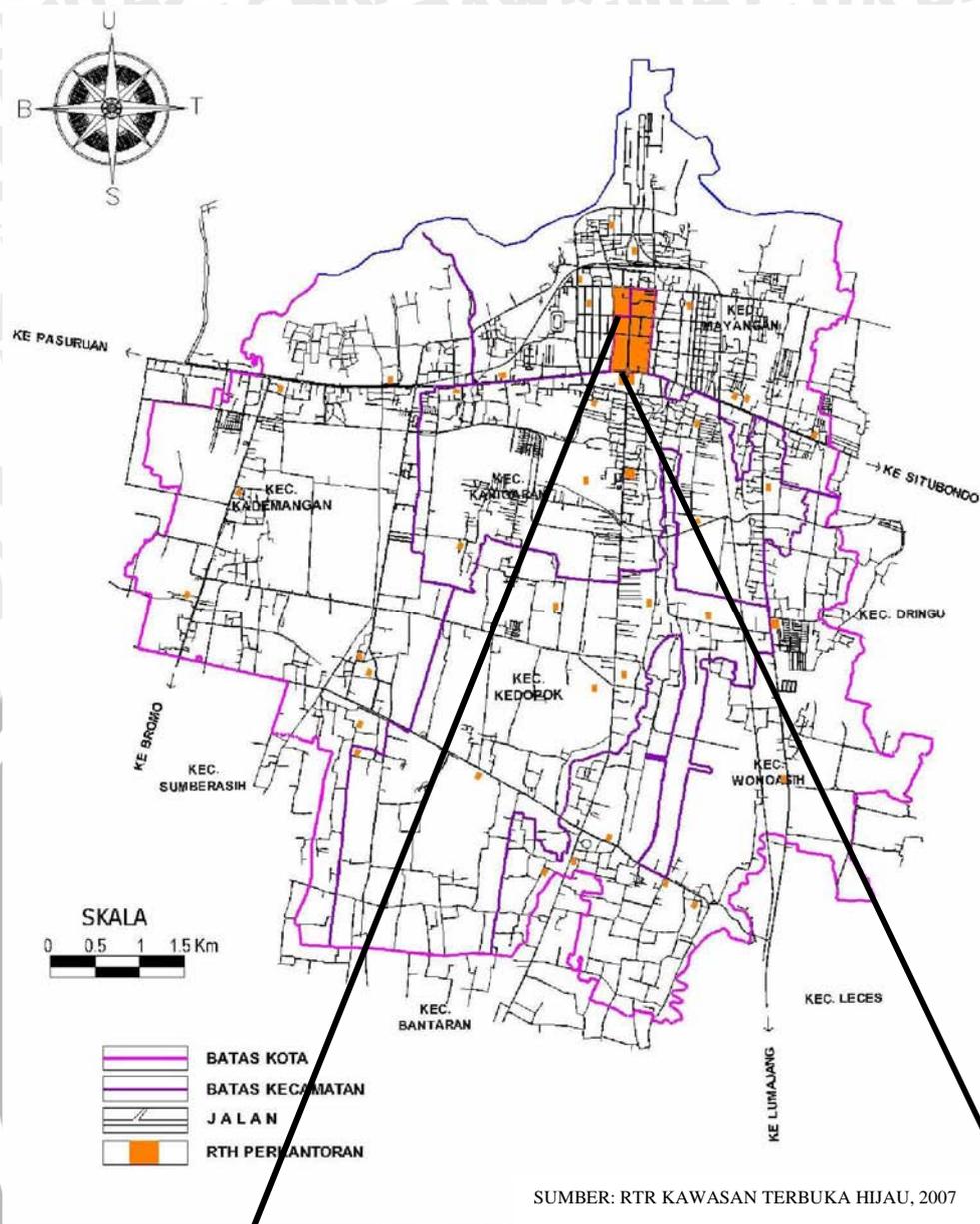


Perumahan Sumber Taman

Gambar 4. 29 Taman Lingkungan Permukiman



Gambar 4. 30 Peta Kawasan Perkantoran Kota Probolinggo

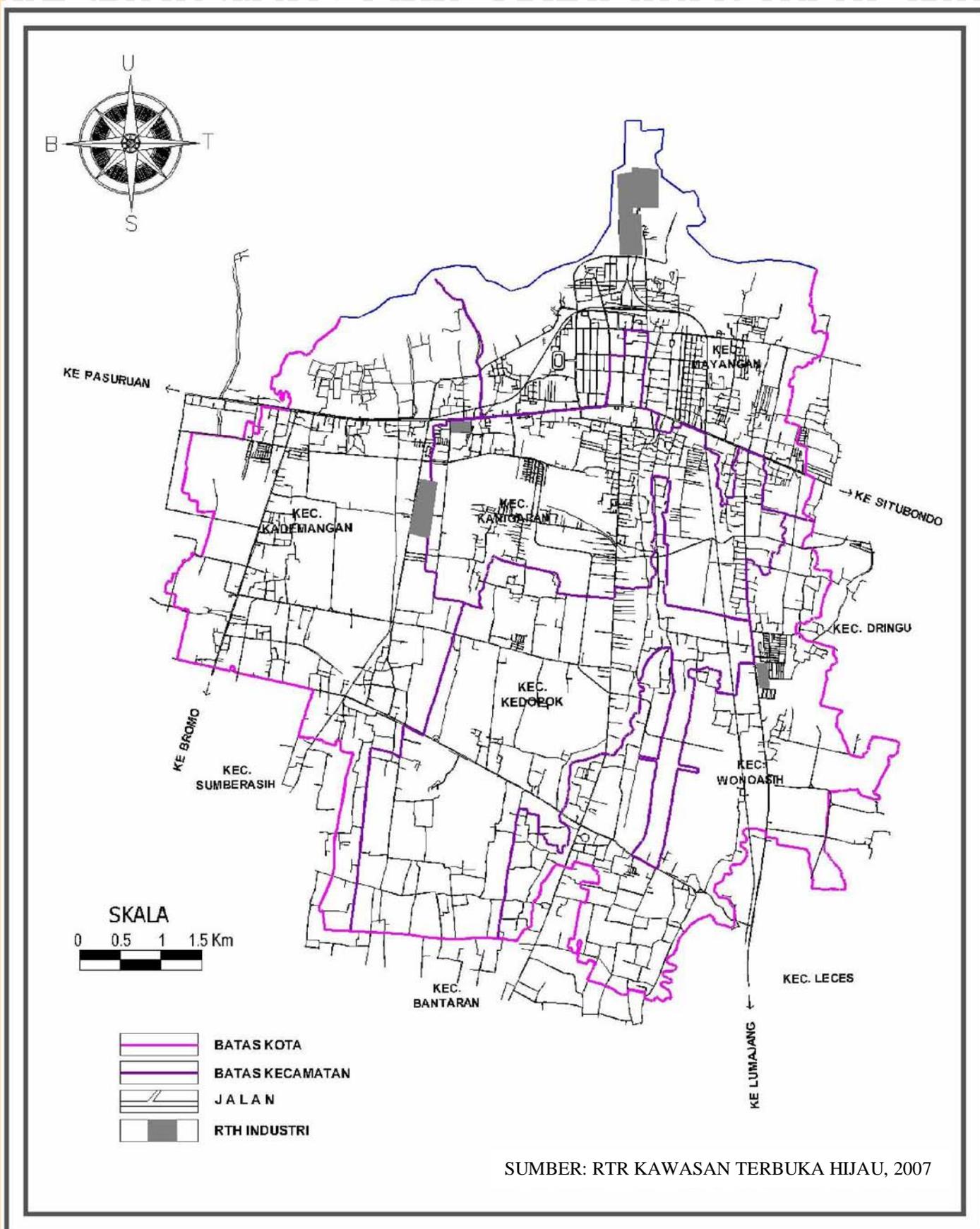


Taman Lingkungan Perkantoran DPRD Kota Probolinggo

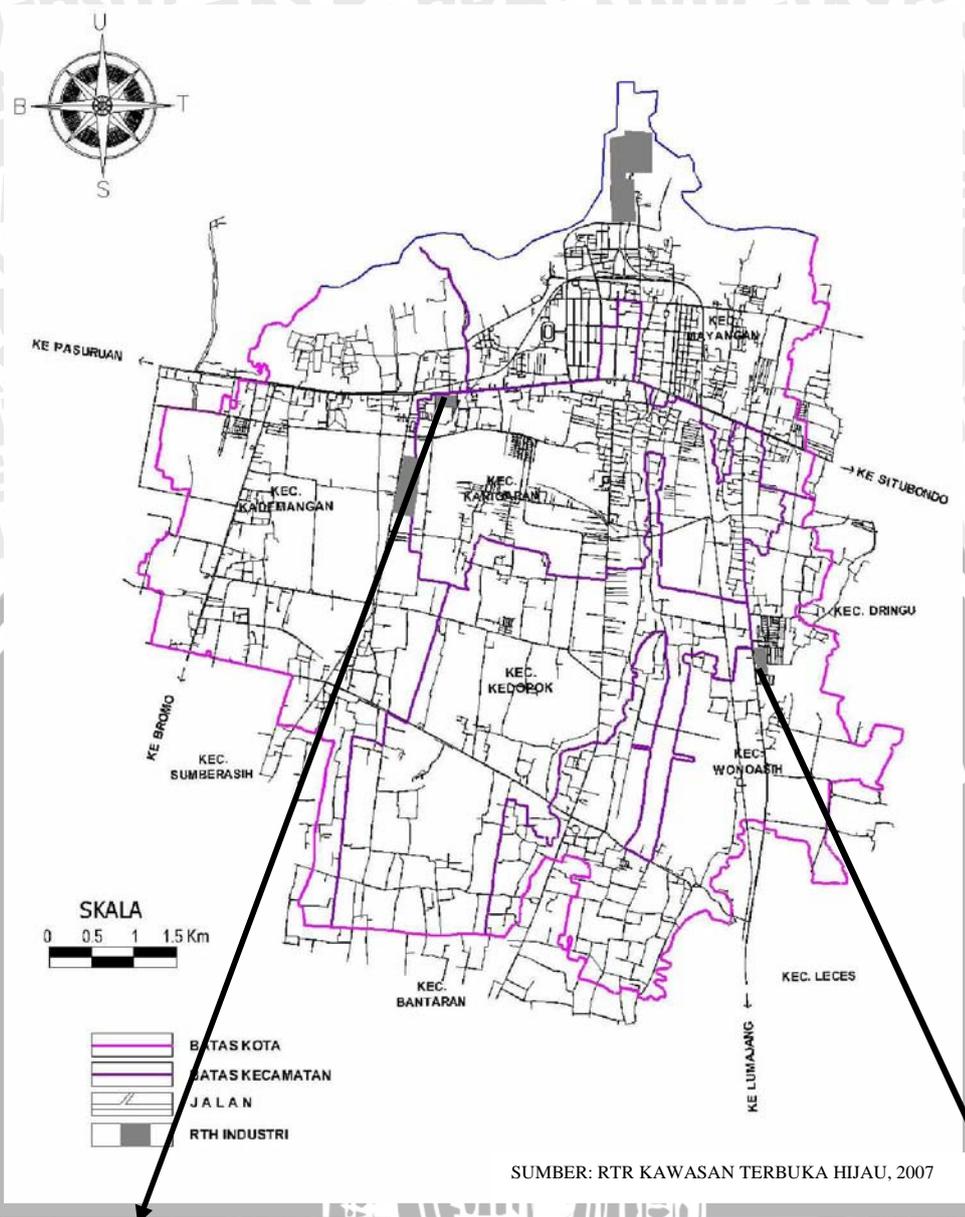


Taman Lingkungan Kantor Walikota Probolinggo

Gambar 4. 31 Taman Lingkungan Perkantoran Kota Probolinggo



Gambar 4. 32 Peta RTH Lingkungan Industri Kota Probolinggo



SUMBER: RTR KAWASAN TERBUKA HIJAU, 2007



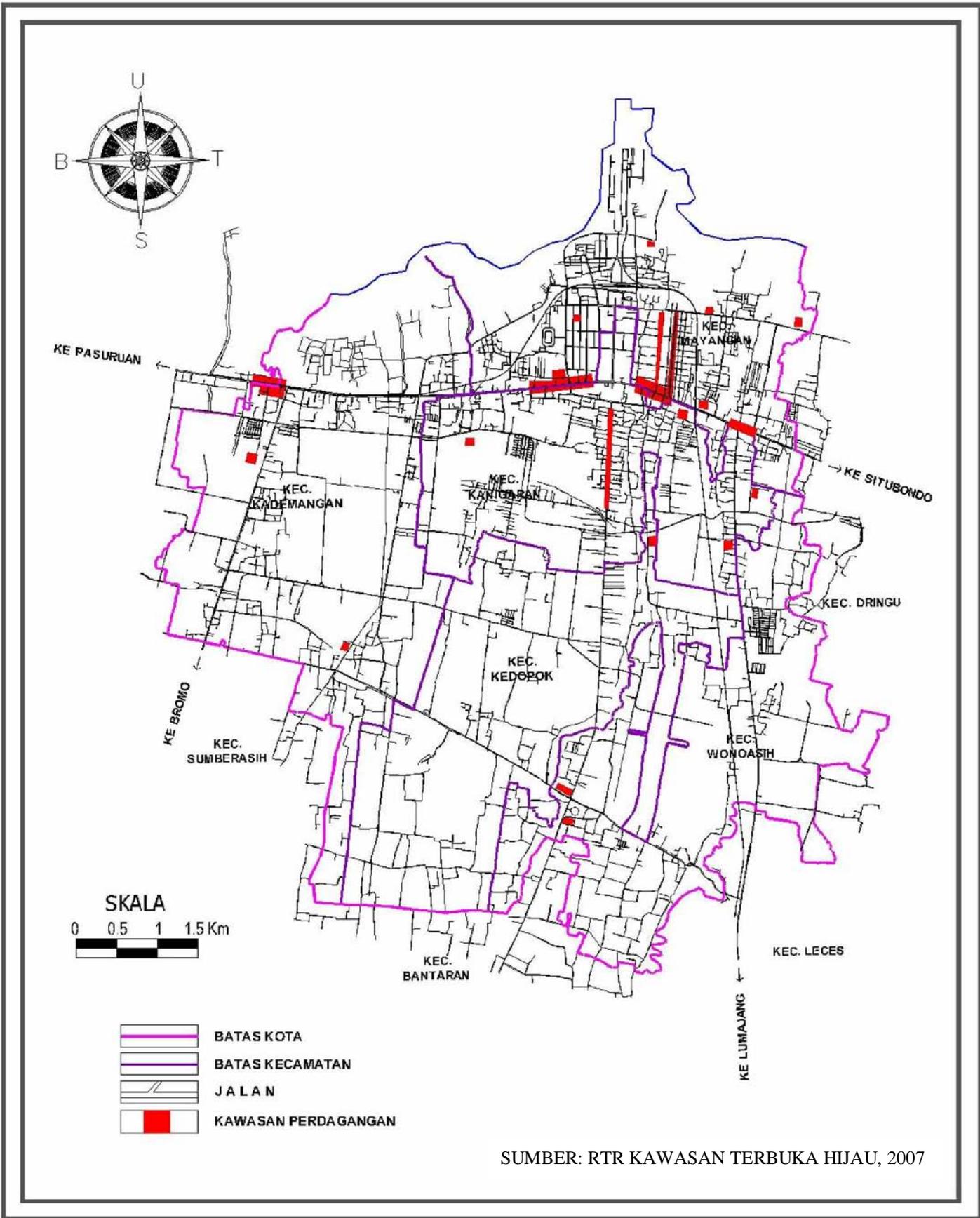
Kawasan Industri Eratex



Pabrik SKI Keramik

Gambar 4. 33 Kawasan Industri Kota Probolinggo

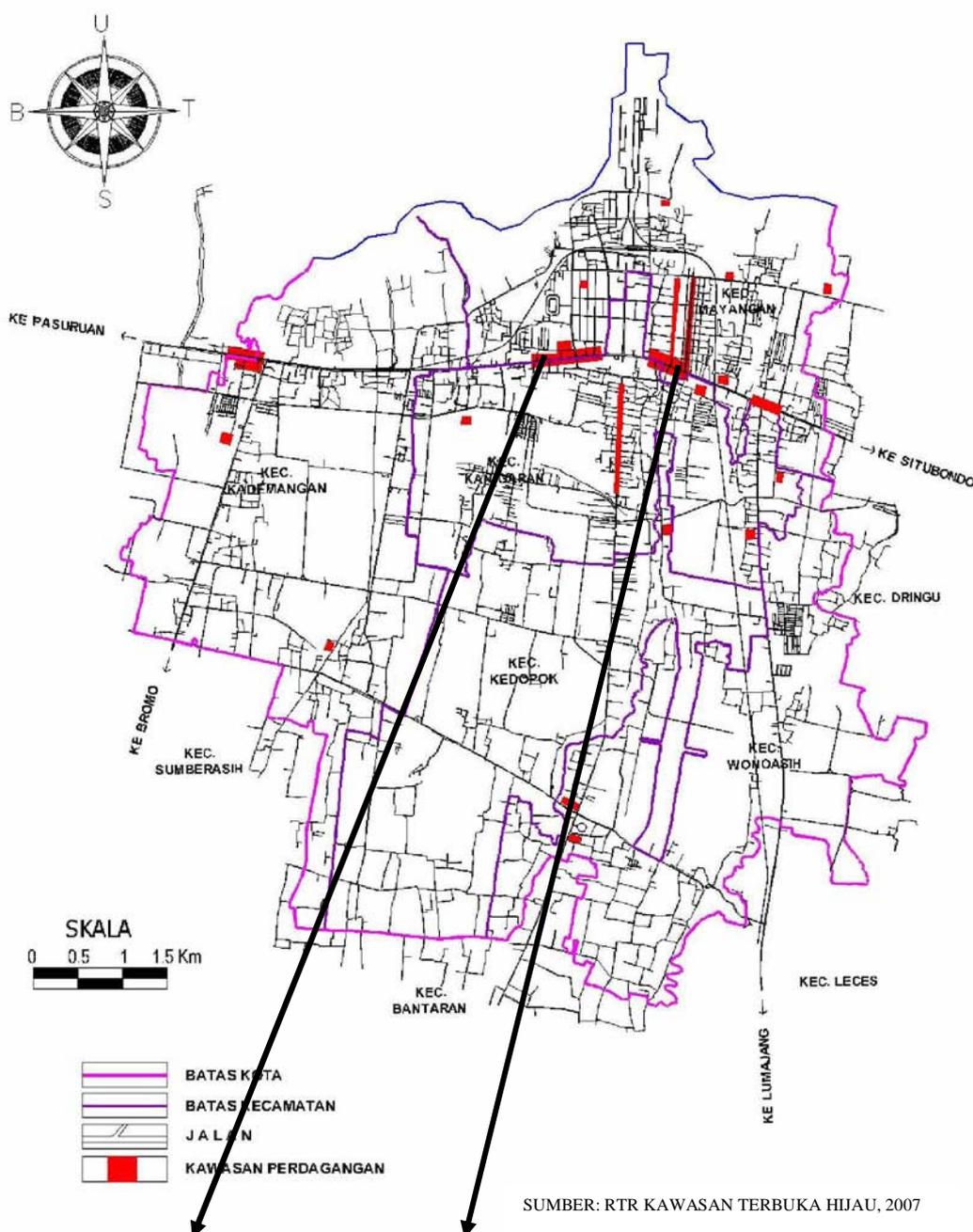




SUMBER: RTR KAWASAN TERBUKA HIJAU, 2007

Gambar 4. 34 Peta Kawasan Perdagangan Kota Probolinggo





Kawasan Perdagangan Jalan Soekarno Hatta



Kawasan Perdagangan Pasar Baru

Gambar 4. 35 Kawasan Perdagangan Kota Probolinggo

K. Lahan Pertanian Perkotaan

Penggunaan lahan kota ditentukan oleh jumlah penduduk dan aktivitasnya. Sebagian besar penduduk kota bekerja di sektor tersier (*service*) dan sekunder (manufaktural) yaitu pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Aktivitas penduduk kota di sektor primer berupa budidaya pertanian, pengembangan bibit bunga dan buah-buahan serta perikanan. Aktivitas pertanian lahan basah diutamakan pada lahan produktif. Lahan pertanian difungsikan sebagai green belt yang diusulkan sebagai kawasan hijau permanen yang menjadi bagian integral dari kota (Howard, 1965: 34). Pertumbuhan penduduk kota yang cepat biasanya menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Bila keadaan itu tidak dikendalikan dan juga tidak diimbangi dengan pengembangan ruang terbuka hijau jenis lainnya maka suatu kota akan mengalami kekurangan ruang terbuka hijau kota.

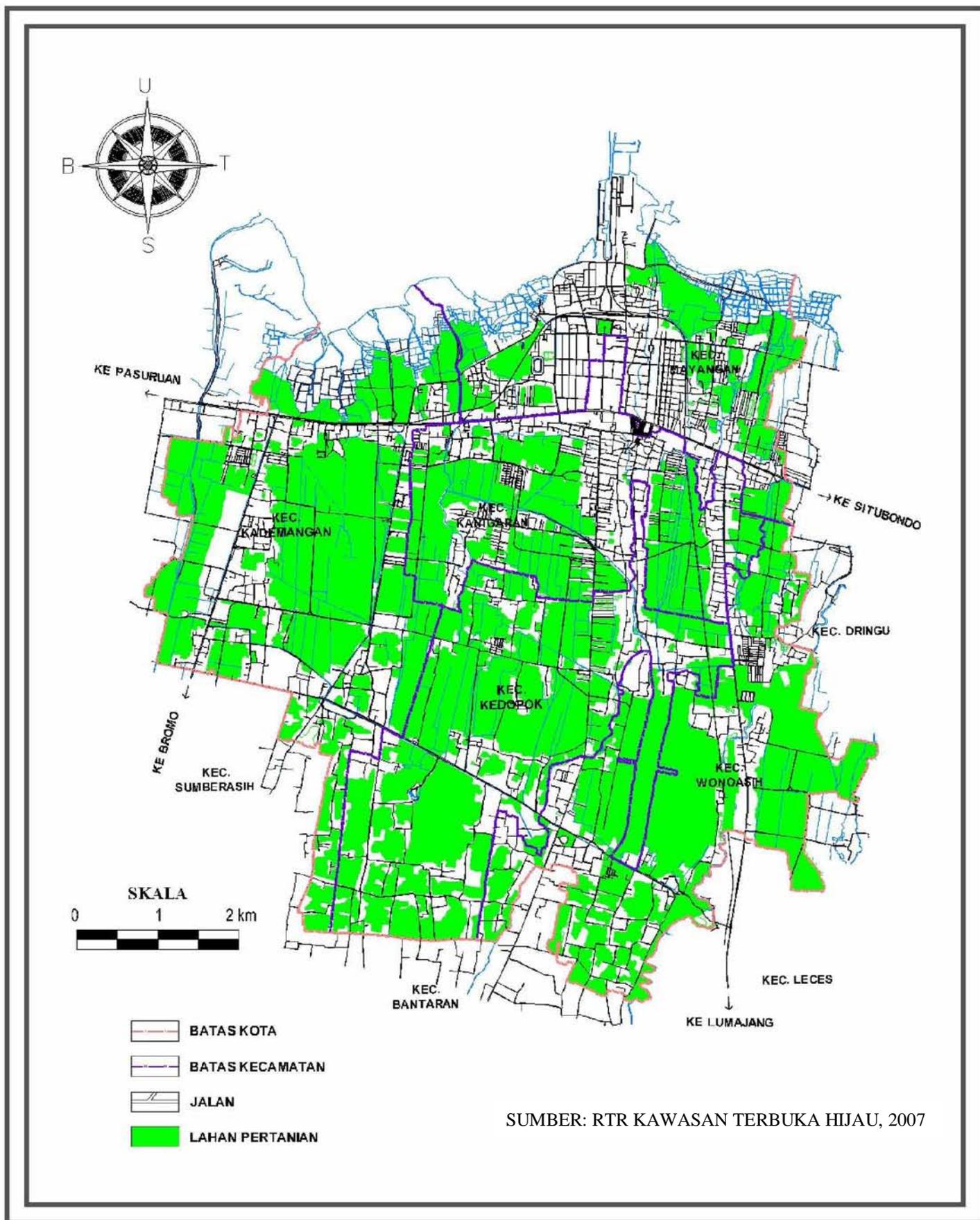
Pola persebaran kawasan pertanian dan tegalan cenderung mengikuti pola sistem DAS yang ada. Pertanian sawah di Kota Probolinggo masih berkembang di wilayah bagian tengah sebelah selatan dan masih tersebar di daerah-daerah berupa tegalan. Selain dari pertanian kawasan tegalan di Kota Probolinggo sebagian besar terdapat di bagian selatan, dalam hal ini sangat berpotensi bagi pengembangan konservasi lahan. Perkembangan kawasan pertanian dan tegalan untuk areal perkotaan sangat berpotensi terutama untuk pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana kota juga untuk kebutuhan konservasi, fasilitas maupun utilitas kota, dari itu bahwa kawasan pertanian akan semakin menyusut dipergunakan oleh aktivitas perkotaan.

Adapun luas lahan produktif per kecamatan di Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel 4.17.

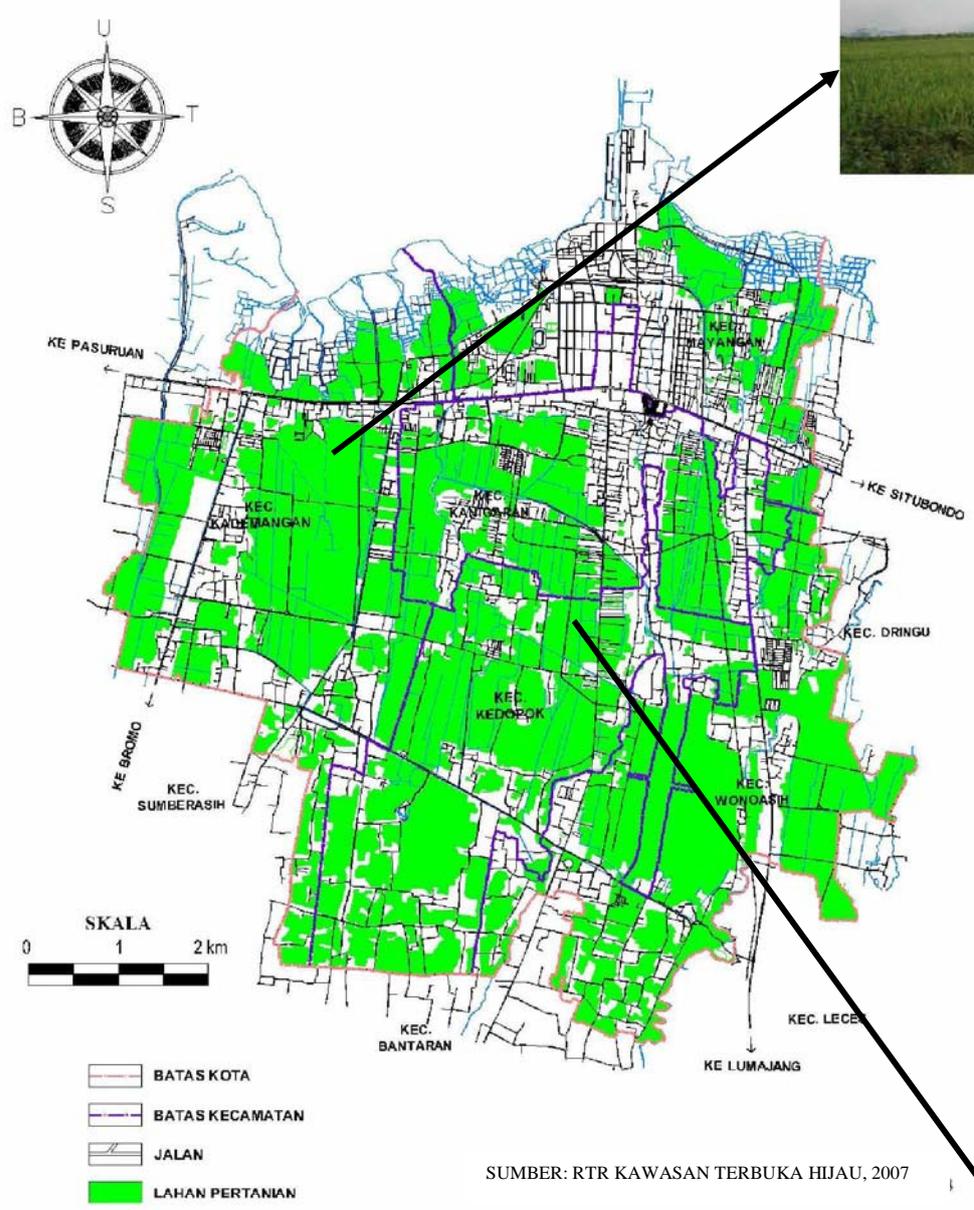
Tabel 4. 17 Luas RTH Lahan Produktif di Kota Probolinggo

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Mayangan	180,99
2	Kademangan	667,21
3	Kanigaran	369,96
4	Kedopok	860,98
5	Wonoasih	514,48
JUMLAH		2593,64

Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau, tahun 2007



Gambar 4. 36 Peta Lokasi Lahan Pertanian Perkotaan Kota Probolinggo



Gambar 4. 37 Lahan Pertanian Perkotaan Kota Probolinggo



4.3.2 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Probolinggo

A. Perencanaan

Perencanaan tata ruang wilayah perkotaan berperan sangat penting dalam pembentukan ruang-ruang publik terutama RTH di perkotaan. Rencana tata ruang perkotaan secara ekologis dan planologis harus terlebih dahulu mempertimbangkan komponen-komponen RTH maupun ruang terbuka publik lainnya dalam pola pemanfaatan ruang kota agar dapat mencegah terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau yang pada gilirannya dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan.

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka kota dan merupakan salah satu komponen penjaga keseimbangan ekosistem kota. Keseimbangan ekologi di wilayah perkotaan sangat diperlukan karena pembangunan fisik kota terus meningkat. Untuk perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Probolinggo yang dituangkan dalam beberapa dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Master Plan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dan Rencana Tata Ruang Kawasan Terbuka Hijau.

Rencana Tata Ruang Kawasan Terbuka Hijau adalah suatu rencana yang memiliki keterkaitan yang cukup luas, yang merupakan perencanaan khusus ruang terbuka hijau yang pada prinsipnya mengikuti alur perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun, sehingga secara teknis merupakan rencana tindak lanjut dari pola penghijauan yang ada dan telah siap dijadikan pegangan dari pelaksanaan pembangunan di lapangan serta menjadi instrumen pengendalian pola penghijauan kota bagi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Rencana Tata Ruang Kawasan Terbuka Hijau memperhatikan masalah ekologi dan ekosistem alam agar dapat masuk kepada produk kebijakan atau tata guna lahan yang memperhatikan keseimbangan, kebutuhan pelayanan dan pemeliharaan sumber alam agar mampu menyajikan lingkungan hidup manusia yang fungsional dan estetis. Rencana Tata Ruang Kawasan Terbuka Hijau Kota Probolinggo dapat digunakan sebagai landasan penyusunan RTRW, RDTRK dan RTRK. Dengan kata lain, Rencana Tata Ruang Kawasan Terbuka Hijau Kota Probolinggo tidak hanya sekedar pelengkap suatu

Rencana Umum Tata Ruang Kota, namun dapat berperan dan berfungsi sebagai alat kendali kerusakan (fisik) lingkungan lebih lanjut yang terjadi di Kota Probolinggo.

Rencana Tata Ruang Kawasan Terbuka Hijau Kota Probolinggo dibuat untuk dapat memberikan keseimbangan fungsi fisiologis, psikologis dan ekologis kehidupan kota dengan memperhatikan kerekayasaan yang tepat dan potensi kondisi setempat. Dalam masalah perkotaan, RTH merupakan bagian atau salah satu sub sistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar RTH.

1. Pengembangan RTH Kota Probolinggo Jangka Pendek

Konsep pengembangan RTH Kota Probolinggo jangka pendek, antara lain sebagai berikut.

- a. Refungsionalisasi dan pengamanan jalur-jalur hijau alami, seperti di sepanjang tepian jalan raya, bantaran kali, tepian pantai, bantaran rel kereta api, jalur SUTT, tempat pemakaman umum (TPU/ makam) dan lapangan olah raga dari okupansi permukiman liar.
- b. Mengisis dan memelihara taman-taman kota yang sudah ada, sebaik-baiknya dan berdasar pada prinsip fungsi pokok RTH (identifikasi dan keindahan) masing-masing lokasi.
- c. Memberikan ciri-ciri khusus pada tempat-tempat strategis seperti batas-batas kota dan alun-alun kota.
- d. Memotivasi dan memberikan insentif secara material (subsidi) dan moral terhadap peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan RTH secara optimal, baik melalui proses perencanaan kota maupun gerakan-gerakan penghijauan.
- e. Prasarana penunjang dalam pengembangan RTH yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga teknisi yang bisa menyampaikan konsep, ide serta pengalamannya dalam mengelola RTH, misalnya pada acara penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).
- f. Dibutuhkan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat umum secara luas.

2. Pengembangan RTH Kota Probolinggo Jangka Panjang

Konsep pengembangan RTH Kota Probolinggo jangka panjang antara lain dengan melakukan penyuluhan pengembangan RTH yang dapat dilakukan melalui

instansi pemerintah daerah yang secara resmi ditunjuk dan erat kaitannya dengan penghijauan kota, mulai dari tingkat kota/ kabupaten, camat, lurah/ kepala desa, hingga RT/ RW, dewan legislatif, organisasi-organisasi kemasyarakatan, sekolah, pramuka, rumah sakit, perkantoran dan berbagai bentuk media massa cetak (surat kabar, majalah, buletin) serta media elektronik (radio, televisi, internet).

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, standar RTH di wilayah perkotaan menetapkan bahwa minimal 30% dari luas wilayah dan 20% dari luas wilayah untuk RTH publik. Kebutuhan ruang terbuka hijau dengan standar tersebut untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.18.

Tabel 4. 18 Kebutuhan RTH Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007

Kecamatan	Luas (Ha)	Standar Luas		Kebutuhan (Ha)	
		RTH	RTH Publik	RTH	RTH Publik
Mayangan	865,54	30%	20%	1700,02	1133,35
Kademangan	1275,4				
Kanigaran	1065,3				
Kedopok	1362,4				
Wonoasih	1096,1				
Total	5666,74				

Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau tahun 2007

Kesesuaian kebutuhan ruang terbuka hijau pada tahun 2006 diketahui berdasarkan kondisi eksisting kawasan hijau yang diperoleh dari analisis penutupan lahan. Luas lahan eksisting kawasan hijau dan selisih antar kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 4.19.

Tabel 4. 19 Selisih Kebutuhan RTH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dan Kondisi Eksisting Kawasan Hijau Tahun 2006

Eksisting (Ha)		Kebutuhan Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 (Ha)		Selisih (Ha)	
RTH	RTH Publik	RTH	RTH Publik	RTH	RTH Publik
3742,37	575,38	1700,02	1133,35	2042,35	-557,97

Sumber: RTR Kawasan Terbuka Hijau tahun 2007

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, luas RTH di Kota Probolinggo masih memenuhi standar minimal luas RTH suatu kota yaitu 30% dari luas kota yaitu luas RTH Kota Probolinggo saat ini 3742,37 Ha atau 66% luas lahan Kota Probolinggo. Ada kecenderungan kekurangan RTH lebih cepat dibanding dengan kecamatan lain yaitu Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kanigaran yang merupakan pusat Kota Probolinggo. Pengembangan kegiatan perkotaan di masa mendatang diarahkan pada tiga kecamatan. Untuk Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kanigaran di masa mendatang perlu dibatasi. Namun terdapat kekurangan

RTH publik, dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, luas RTH publik adalah 20% dari luas wilayah, di Kota Probolinggo hanya terdapat 575,35 Ha RTH publik, masih dibawah standar yaitu 1133,35 Ha. Untuk perencanaan selanjutnya, perlunya pembangunan RTH publik untuk memenuhi kekurangan luasan RTH publik di Kota Probolinggo.

Dalam perencanaan ruang terbuka hijau yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo hingga saat ini, belum melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat hanya pada pemeliharaan ruang terbuka hijau terutama untuk pemeliharaan taman lingkungan perumahan dan permukiman.

Perencanaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui beberapa proses. Bappeda yang akan merencanakan ruang terbuka hijau memiliki rekanan yaitu konsultan perencana. Dimana dalam proses penentuan rekanan konsultan, dilakukan proses tender. Dimana nantinya hanya terdapat satu konsultan yang memenangkan tender. Untuk selanjutnya, konsultan perencana membuat dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Terbuka Hijau Kota Probolinggo yang dipresentasikan di depan instansi-instansi yang terkait dengan ruang terbuka hijau. Apabila hasil dokumen yang dibuat oleh konsultan masih terdapat kesalahan, maka perlu untuk direvisi sebelum dipresentasikan lagi. Namun apabila hasil dokumen yang dibuat konsultan telah disetujui, maka dokumen tersebut kemudian ditetapkan oleh Walikota Probolinggo.

Perencanaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo juga memiliki beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain penentuan lokasi yang digunakan untuk pengembangan dan pembangunan ruang terbuka hijau yang baru. Hal ini berkaitan dengan status kepemilikan lahan yang akan digunakan untuk ruang terbuka hijau. Dalam pengembangan ruang terbuka hijau, status lahan yang akan dikembangkan harus merupakan lahan negara atau lahan milik pemerintah kota. Apabila status kepemilikan lahannya merupakan milik pribadi, maka lahan tersebut terlebih dahulu harus dibeli oleh pemerintah kota (proses pembebasan lahan). Sehingga dalam perencanaan ruang terbuka hijau, harus benar-benar diketahui secara pasti status kepemilikan lahan yang akan dikembangkan.

B. Kelembagaan

Beberapa lembaga yang terkait dengan ruang terbuka hijau yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Bappeda sebagai perencana ruang terbuka hijau sedangkan BLH sebagai pelaksana pembangunan dan pengelola ruang terbuka hijau terutama ruang terbuka hijau publik.

Dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan ruang terbuka hijau, Bappeda sebagai pihak yang paling berwenang harus mendiskusikan rencana pengembangan ruang terbuka hijau kepada Bappeda dan juga Badan Pertanahan Kota Probolinggo. Sehingga nantinya tidak ada permasalahan terutama mengenai status kepemilikan lahan. Untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sepenuhnya dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup. Tidak campur tangan dari instansi lainnya.

Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, Badan Lingkungan Hidup merupakan instansi yang paling berwenang dan memegang peranan penting dalam keberhasilan maupun kegagalan program pengembangan ruang terbuka hijau. Pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh BLH antara lain pembangunan ruang terbuka hijau baru, pemeliharaan dan perawatan ruang terbuka hijau yang meliputi penanaman bibit, penyiraman, pemangkasan, dan pemotongan pohon yang tumbang apabila ada bencana angin puting beliung.

Penghijauan (penanaman bibit) di Kota Probolinggo selain dilakukan sendiri oleh Badan Lingkungan Hidup, juga melibatkan beberapa stakeholder terutama yang bergerak dalam bidang industri. Beberapa industri yang terlibat dalam penghijauan kota antara lain:

1. PT Kutai Timber Indonesia
2. PT Indopherin Jaya
3. PT Pamolite Adhesive Industry
4. PT Sumbertaman Keramik Industry
5. PT Aneka Food Tatarasa Industry
6. PT Southern Marine Product
7. PT Eratex Djaja
8. PT Rimba Sempana
9. CV Sumber Setia
10. PT Lingga Mas

11. PT Utama Tirta Bestari

12. PT Sulindo

Setiap berakhirnya program pengelolaan ruang terbuka hijau, Badan Lingkungan Hidup mengadakan evaluasi mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil yang direncanakan dengan kondisi setelah pelaksanaan program. Apabila hasil yang diinginkan telah tercapai maka program dikatakan berhasil. Namun apabila hasil yang diinginkan belum sesuai maka perlu tindak lanjut untuk memperbaiki program tersebut. Lain halnya dengan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda, dimana evaluasi dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali, atau evaluasi juga dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam perencanaan ruang terbuka hijau. Evaluasi yang dilakukan Bappeda juga melihat antara rencana pengembangan ruang terbuka hijau dengan kondisi eksisting ruang terbuka hijau yang ada, sehingga dapat diketahui apakah perencanaan ruang terbuka hijau sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum.

Permasalahan yang terjadi dalam kelembagaan pada pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo yaitu kurang dilibatkannya pihak kecamatan maupun kelurahan, sehingga kecamatan dan kelurahan di Kota Probolinggo kurang mengetahui informasi-informasi dan permasalahan-permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau karena kewenangan sepenuhnya berada pada Badan Lingkungan Hidup.



Gambar 4. 38 Struktur Organisasi BLH



Gambar 4. 39 Struktur Organisasi Bappeda

C. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo berasal dari Badan Lingkungan Hidup, terutama untuk pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau dan juga pemeliharaan atau perawatan ruang terbuka hijau publik. Badan Lingkungan Hidup dalam struktur kelembagaannya, memiliki sub bidang konservasi keanekaragaman hayati dan pertamanan, dan sub bidang kebersihan lingkungan yang bertugas untuk melakukan pengembangan serta perawatan ruang terbuka hijau publik di Kota Probolinggo. Untuk pemeliharaan dan perawatan ruang terbuka hijau yang meliputi penyiraman, pemangkasan dan penebangan pohon-pohon yang rawan menyebabkan bencana, Badan Lingkungan Hidup memiliki tenaga-tenaga terlatih yang bertugas di lapangan yang berjumlah kurang lebih 40 orang.

Tabel 4. 20 Jumlah Pegawai BLH Per Bidang

No	Bidang	Jumlah Pegawai
1	Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan	81 orang
2	Bidang Pelestarian, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	71 orang
3	Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup	63 orang
4	Bidang Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup	138 orang
Jumlah		383 orang

Tabel 4. 21 Jumlah Pegawai BLH Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	6 orang
2	S1	166 orang
3	Diploma	79 orang
4	SMA	107 orang
5	SMP	25 orang
Jumlah		383 orang

Pengadaan peralatan dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo masih minim, hanya terdapat beberapa peralatan yang tersedia di Badan Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.22.

Tabel 4. 22 Peralatan Pemeliharaan RTH yang Tersedia di Badan Lingkungan Hidup

No	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Mesin pemotong rumput	3 unit
2	Truk tangki penyimpanan air	2 unit
3	Truk angkut	1 unit
4	Mesin pemotong pohon	1 unit
5	Cangkul	18 buah
6	Garu	15 buah

Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengelola ruang terbuka hijau, setiap akhir tahun Badan Lingkungan Hidup mengadakan pelatihan atau diklat. Pelatihan tersebut diikuti oleh pegawai-pegawai dari sub bidang konservasi keanekaragaman hayati dan pertamanan, dan sub bidang kebersihan lingkungan termasuk juga tenaga lapangan Badan Lingkungan. Selain itu Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan penyuluhan di tiap-tiap kecamatan yang bertujuan agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik dengan menjaga kelestariannya.

Kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan ruang terbuka hijau adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang lingkungan hidup terutama ruang terbuka hijau, sehingga masih banyak tenaga-tenaga di instansi tersebut yang bukan dari disiplin ilmu lingkungan hidup. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian ruang terbuka hijau baik ruang terbuka hijau privat maupun ruang terbuka hijau publik

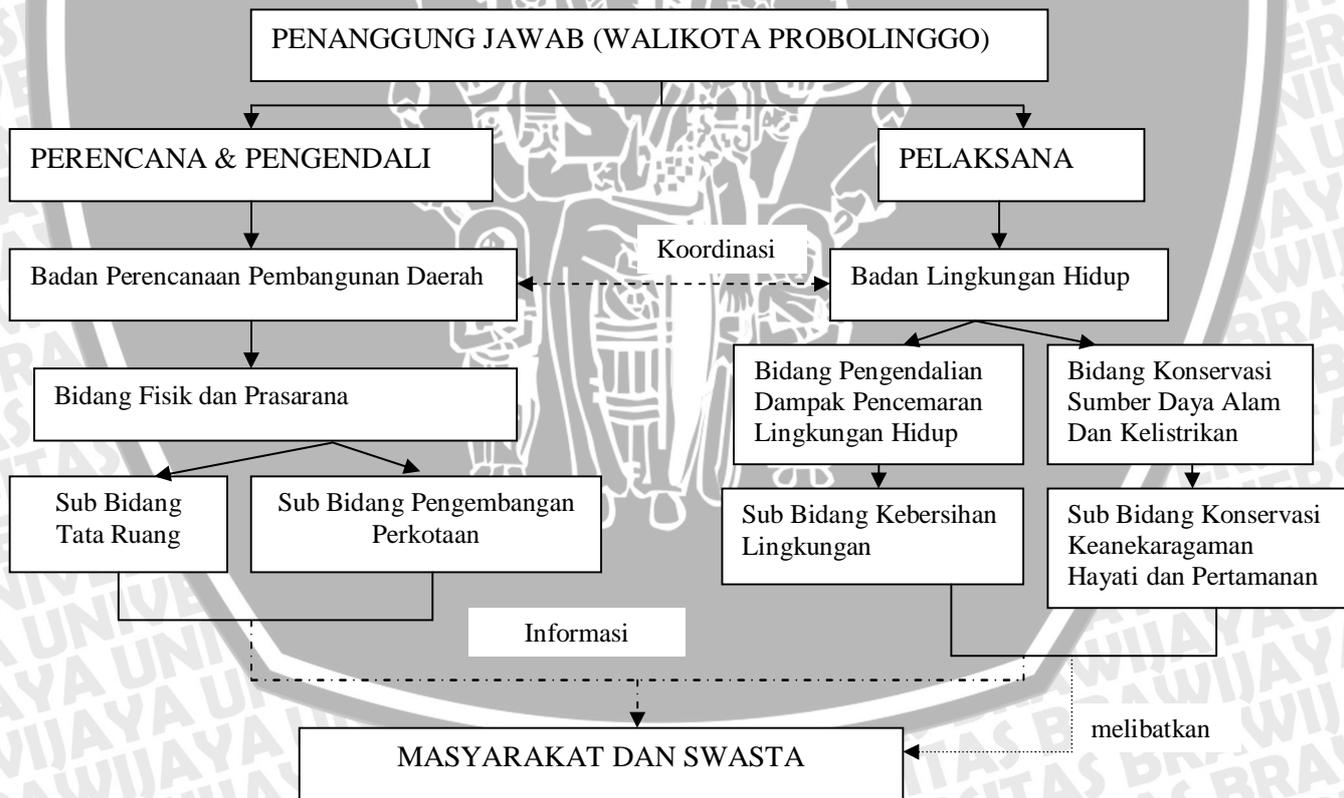
D. Koordinasi

Pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo hingga saat ini menggunakan lahan aset pemerintah kota, terutama untuk ruang terbuka hijau publik. Sedangkan ruang terbuka hijau privat dikembangkan pada lahan-lahan privat pada tiap-tiap permukiman penduduk. Untuk perumahan baru, pengembang harus melepas 30% lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan untuk fasilitas umum yang berupa jalan, tempat ibadah, taman perumahan dan lain sebagainya. Perubahan guna lahan untuk ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo berasal dari lahan kosong maupun lahan pertanian yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo dan Rencana Tata Ruang Kawasan Terbuka Hijau Kota Probolinggo. Tahun 2009 ini, Badan Lingkungan Hidup memfokuskan pengembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kedopok dan Taman Wisata Studi Lingkungan.

Pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo telah terstruktur, dimana terdapat dua instansi yang terlibat langsung yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Tugas tiap-tiap instansi berbeda, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membuat perencanaan terkait pengembangan ruang terbuka hijau sedangkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengelola ruang terbuka hijau publik dengan melakukan pembangunan ruang terbuka hijau serta perawatan atau

pemeliharaan ruang terbuka hijau. Koordinasi yang dilakukan oleh dua instansi tersebut salah satunya berupa adanya rapat antar pimpinan instansi yang dilakukan di kantor Walikota Probolinggo. Dalam pengambilan keputusan, instansi-instansi tersebut tidak saling terlibat, hanya saja dalam pengambilan keputusan tersebut tetap menggunakan pedoman dan rencana yang telah dibuat serta tiap instansi saling koordinasi agar pengembangan yang dilakukan tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo, pemerintah daerah setempat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, baik pada ruang terbuka hijau publik maupun ruang terbuka hijau privat. Selain mengadakan penyuluhan di tiap-tiap kecamatan, pemerintah juga menginformasikan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan terutama ruang terbuka hijau melalui media cetak dan radio. Informasi-informasi yang disampaikan berupa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah Kota Probolinggo dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti kerja bakti dan lomba lingkungan hidup.



Gambar 4. 40 Bagan Koordinasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Probolinggo

E. Pendanaan

Dana yang digunakan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Probolinggo berasal dari dana alokasi khusus (DAU) dan dana lain-lain. Besar dana yang dianggarkan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo kurang lebih sebesar 6 (enam) milyar, yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 4. 23 Pendanaan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Probolinggo

Uraian	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
Pemeliharaan RTH	784.620.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
Pengembangan taman rekreasi	2.203.750.000,00	
Pemeliharaan dan peningkatan pertamanan dan penghijauan kota	710.560.000,00	
Sarana dan prasarana taman wisata studi lingkungan	2.741.250.000,00	
Peningkatan operasional taman	34.500.000,00	
Peningkatan kota hijau dan bebas polusi	60.000.000,00	
Jumlah	6.534.680.000,00	

Berdasarkan APBD Kota Probolinggo tahun 2009, jumlah anggaran belanja daerah adalah sebesar Rp 430 Milyar, terbagi atas belanja tidak langsung (gaji pegawai) sebesar Rp 232 Milyar dan belanja langsung sebesar Rp 221 Milyar. Jumlah dana yang dialokasikan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau yaitu sebesar Rp 6 Milyar atau 1,4% dari total anggaran belanja daerah atau 2,7% dari anggaran belanja langsung. Sedangkan dana pengelolaan ruang terbuka hijau berasal dari dana alokasi umum Kota Probolinggo, dengan DAU sebesar Rp 226.917.680.800,00, maka pengelolaan ruang terbuka hijau menghabiskan dana sebesar 2,88% dari total dana alokasi umum Kota Probolinggo.

F. Permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Probolinggo

Secara umum terdapat beberapa permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo yaitu:

- Pelaksanaan operasional pemeliharaan dan perawatan ruang terbuka hijau menemui kendala baik dari segi biaya maupun kelengkapan peralatan pemeliharaan. Kondisi tersebut diakibatkan karena tidak adanya standar atau aturan baku yang mengatur pengelolaan dan pelaksanaan operasional pemeliharaan RTH.
- Berkurangnya vegetasi ruang terbuka hijau dan berkurangnya tanaman di sekitar DAS (daerah Aliran Sungai). Kondisi ini disebabkan terjadinya praktek-praktek pengrusakan vegetasi RTH, khususnya oleh masyarakat awam seperti penebangan tanaman/ pohon peneduh, pencabutan tanaman/ bunga untuk RTH.

- Berkurangnya luasan RTH yang diakibatkan beberapa hal terkait dengan penggunaan lahan di Kota Probolinggo seperti peralihan peruntukkan/ penggunaan lahan, penyerobotan tanah untuk RTH dan penggunaan tanah (kosong) secara liar.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai RTH yang disebabkan beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:
 - Kurangnya pendidikan dan pengetahuan mengenai RTH di masa lalu, sehingga banyak dari anggota masyarakat yang masih belum mengenai dan mengerti tentang RTH.
 - Akses informasi mengenai RTH masih lemah sehingga pengetahuan masyarakat mengenai RTH hanya bersumber dari media konvensional seperti radio, koran dan belum sepenuhnya beralih ke media yang lebih modern seperti internet.
- Manfaat keberadaan RTH kurang dirasakan dan disadari oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain sebagai berikut:
 - Informasi mengenai RTH kurang diminati masyarakat, karena dianggap tidak terkait langsung dengan kebutuhan sehari-hari.
 - Informasi mengenai RTH tidak menyebar secara merata ke seluruh pelosok masyarakat termasuk yang ada di pedesaan, sehingga pemahaman terhadap RTH pun menjadi sangat terbatas dan tidak mendalam sehingga sebagian masyarakat masih memandang sebelah mata keberadaan RTH di lingkungan sekitar mereka.

4.4 Penerapan Konsep *Good Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Probolinggo

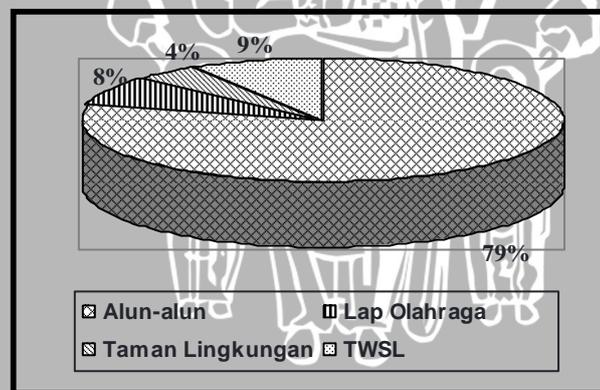
Konsep *good governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan pada studi meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Penerapan konsep *good governance* tersebut, dapat diketahui melalui kuisisioner yang disebar untuk masyarakat Kota Probolinggo dan instansi terkait.

Studi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Good Governance* di Kota Probolinggo melibatkan masyarakat sebagai sampel penelitian. Jumlah sampel ditentukan sebesar 160 orang yang tersebar pada 29 kelurahan yang ada di Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil kuisisioner, ruang terbuka hijau yang sering dikunjungi responden adalah alun-alun yaitu 126 responden. Sisanya sebesar 21% sering

mengunjungi ruang terbuka hijau lainnya yaitu lapangan olahraga, taman lingkungan perumahan dan Taman Wisata Studi Lingkungan. Untuk alasan responden berkunjung ke ruang terbuka hijau tersebut bermacam-macam. Sebanyak 23% responden menyatakan bahwa alasan berkunjung ke ruang terbuka hijau adalah untuk refresing dan melepas kejenuhan setelah beraktivitas. Sedangkan sebanyak 16% responden beralasan untuk jalan-jalan, olahraga serta merasa sejuk, asri dan nyaman berada di ruang terbuka hijau. Ramai dan kemudahan aksesibilitas juga merupakan alasan responden mengunjungi ruang terbuka hijau dengan masing-masing persentase sebanyak 11% dan 7%. Sisanya sebanyak 11% memiliki alasan lainnya untuk berkunjung ke ruang terbuka hijau. Alasan tersebut meliputi ruang terbuka hijau yang bersih dan indah, mengenalkan lingkungan pada anak-anak, gratis untuk masuk serta terdapat hotspot di area ruang terbuka hijau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.24 dan tabel 4.25 serta gambar 4.41 dan gambar 4.42.

Tabel 4. 24 Ruang Terbuka Hijau yang Sering Dikunjungi Responden

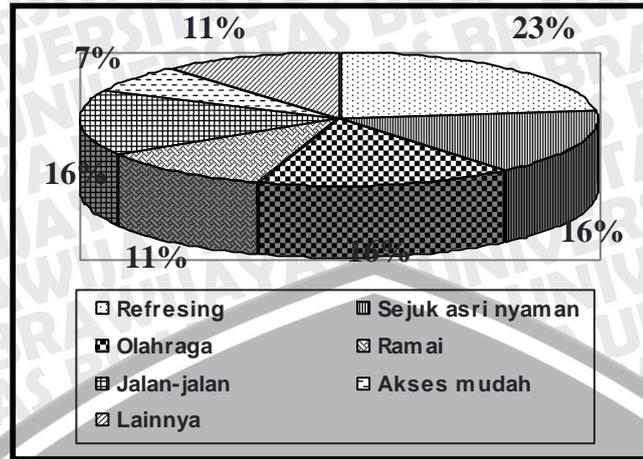
RTH yang Sering Dikunjungi	Jumlah Responden	Persentase
Alun-alun	126	79%
Lapangan Olahraga	12	8%
Taman Lingkungan Perumahan	7	4%
TWSL	15	9%



Gambar 4. 41 Diagram Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Sering Dikunjungi Responden

Tabel 4. 25 Alasan Responden Mengunjungi RTH

Alasan Mengunjungi RTH	Jumlah Responden	Persentase
Refresing	37	23%
Sejuk, asri, nyaman	26	16%
Olahraga	25	16%
Ramai	18	11%
Jalan-jalan	25	16%
Akses mudah	12	7%
Lainnya	17	11%



Gambar 4. 42 Diagram Persentase Alasan Responden Mengunjungi RTH

4.4.1 Transparansi dalam Pengelolaan RTH Kota Probolinggo

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait (seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah) dengan biaya yang minimal. Transparansi yang dimaksud dalam pengelolaan ruang terbuka hijau adalah transparansi terhadap variabel-variabel pengelolaan ruang terbuka hijau yaitu perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan.

Transparansi yang hingga saat ini telah dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo antara lain:

- Kemudahan akses bagi akademisi untuk mendapatkan data mengenai perencanaan ruang terbuka hijau Kota Probolinggo.
- Adanya radio Suara Kota dan tabloid Suara Kota yang menjadi sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan hasil-hasil pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo.
- Adanya koordinasi antar lembaga yang mengelola ruang terbuka hijau, sehingga dapat menghindari adanya ketidaksesuaian program-program pengelolaan ruang terbuka hijau.

Transparansi pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau juga dapat dilihat dari seberapa jauh pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah dalam mengelola RTH, informasi mengenai perencanaan RTH, permasalahan-permasalahan pengelolaan RTH, lembaga-lembaga yang mengelola RTH, penggunaan lahan untuk RTH, pendanaan RTH dan penghargaan yang pernah diraih pemerintah. Selama ini pemerintah Kota Probolinggo telah berupaya untuk memberikan

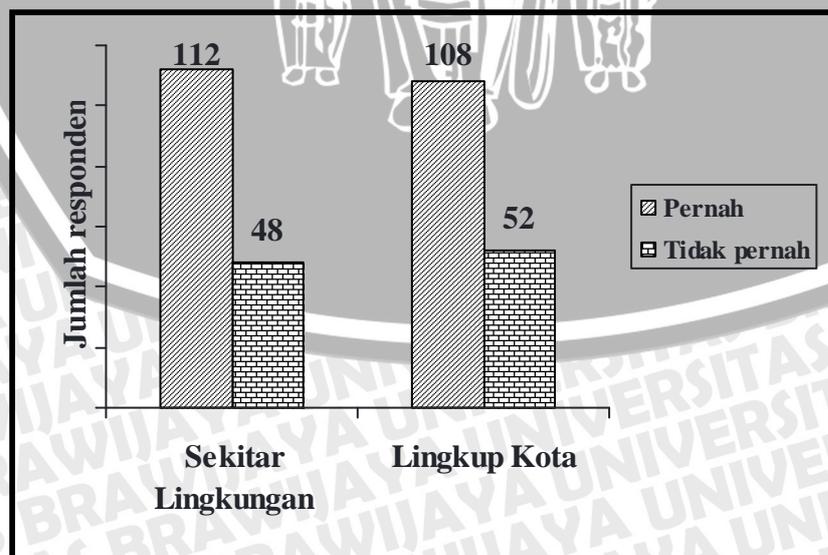
informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau, baik perencanaan, pembangunan maupun perawatannya. Informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui media siar yaitu radio Suara Kota dan media cetak yaitu tabloid Suara Kota yang merupakan radio dan tabloid pemerintah Kota Probolinggo.

Masyarakat menjadi sasaran utama pemerintah untuk menerima informasi pengelolaan ruang terbuka hijau. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua masyarakat memperoleh informasi tersebut. Hal ini tercermin dari hasil kuisioner terhadap 160 sampel masyarakat, yang beberapa diantaranya masih belum mendapatkan informasi dan mengetahui tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo

Sebanyak 112 responden (70%) menyatakan pernah mengetahui **kegiatan-kegiatan pemerintah dalam mengelola ruang terbuka hijau** di sekitar lingkungannya. Sedangkan sisanya sebanyak 30% menyatakan tidak pernah mengetahui. Untuk lingkup kota, sebanyak 108 responden (67%) menyatakan pernah mengetahui kegiatan pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau lingkup kota, sisanya sebanyak 33% tidak pernah mengetahui. Kegiatan-kegiatan pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang diketahui oleh masyarakat yaitu penyiraman, pemangkasan serta penebangan pohon-pohon yang rawan tumbang.

Tabel 4. 26 Jumlah Responden yang Pernah Mengetahui Kegiatan-Kegiatan Pemerintah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau

Apakah Anda pernah mengetahui kegiatan-kegiatan pemerintah dalam mengelola ruang terbuka hijau	Pernah		Tidak Pernah	
	Jumlah responden	Persentase	Jumlah responden	Persentase
Sekitar lingkungan	112	70%	48	30%
Lingkup kota	108	67%	52	33%



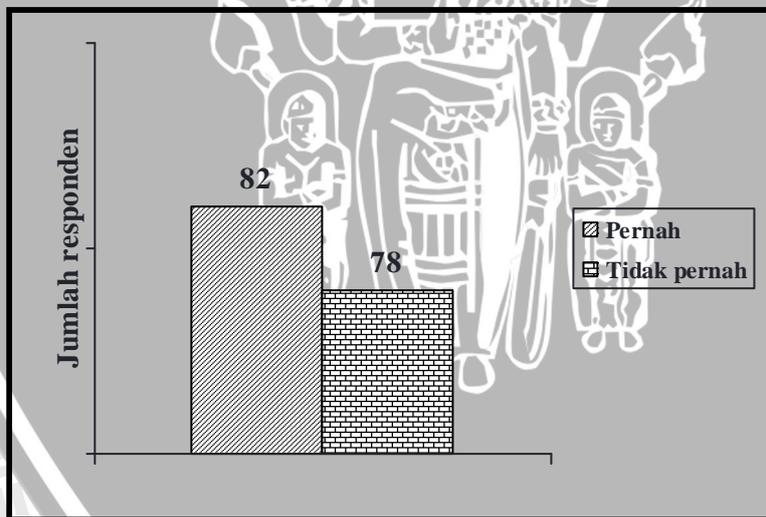
Gambar 4. 43 Diagram Jumlah Responden yang Pernah Mengetahui Kegiatan-Kegiatan Pemerintah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau

Dari tabel 4.26 dan gambar 4.43 dapat diketahui bahwa tidak semua responden mengetahui kegiatan-kegiatan pemerintah dalam mengelola ruang terbuka hijau, masih terdapat sebagian kecil responden yang belum mengetahui kegiatan-kegiatan pemerintah dalam mengelola ruang terbuka hijau. Hal ini dapat menjadi gambaran mengenai kurangnya keterbukaan pemerintah kepada masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi program pemerintah dalam mengelola ruang terbuka hijau.

Sebanyak 82 responden (51%) menyatakan **melihat papan informasi atau mendapatkan berita tentang permasalahan dan perencanaan ruang terbuka hijau** Kota Probolinggo. Sedangkan 78 responden lainnya menyatakan tidak pernah melihat papan informasi atau mendapatkan berita tentang permasalahan dan perencanaan ruang terbuka hijau. Masyarakat mendapatkan informasi tentang ruang terbuka hijau dari sejumlah media baik media cetak berupa majalah/ koran serta radio lokal.

Tabel 4. 27 Jumlah Responden yang Pernah Melihat Papan Informasi atau Mendapatkan Berita Tentang Permasalahan dan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau

Apakah Anda pernah melihat papan informasi atau mendapatkan berita tentang permasalahan dan perencanaan ruang terbuka hijau	Pernah		Tidak Pernah	
	Jumlah responden	Persentase	Jumlah responden	Persentase
	82	51%	78	49%



Gambar 4. 44 Diagram Jumlah Responden yang Pernah Melihat Papan Informasi atau Mendapatkan Berita Tentang Permasalahan dan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau

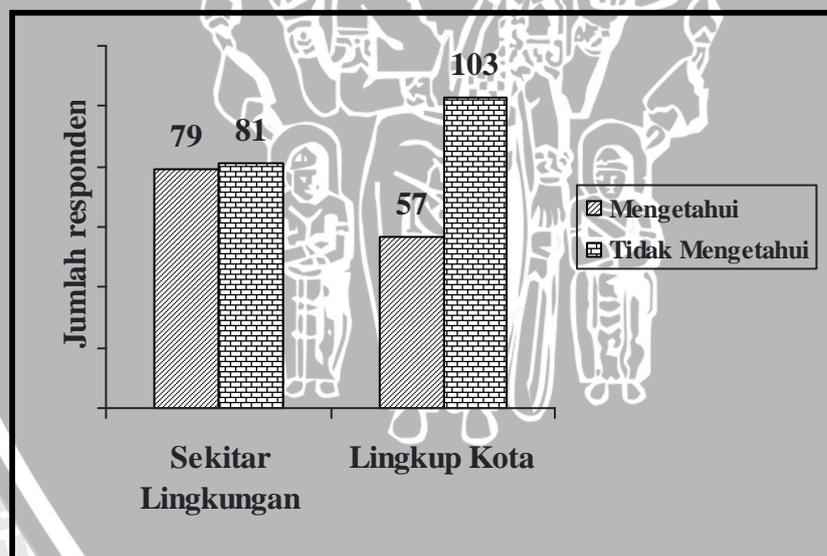
Dari tabel 4.27 dan gambar 4.44 dapat diketahui bahwa sebagian responden belum mendapatkan informasi mengenai permasalahan dan perencanaan ruang terbuka hijau. Dalam penyebaran informasi yang dilakukan pemerintah selama ini masih terfokus di daerah pusat kota dan di instansi-instansi pemerintahan. Sehingga masyarakat di daerah

pinggiran dan juga masyarakat umum lainnya masih banyak yang tidak mendapatkan informasi tersebut.

Responden yang **mengetahui permasalahan-permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau** di sekitar lingkungannya sebanyak 49%, sedangkan 51% lainnya atau 81 responden tidak mengetahui permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau. Untuk lingkup kota, jumlah responden yang tidak mengetahui permasalahan-permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau lebih banyak dibandingkan untuk lingkup lingkungan. Jumlah responden yang mengetahui sebanyak 36% dan responden yang tidak mengetahui sebanyak 64% atau 103 responden. Responden yang mengetahui permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau berpendapat bahwa permasalahan tersebut salah satunya adalah masalah pendanaan.

Tabel 4. 28 Jumlah Responden yang Mengetahui Permasalahan-Permasalahan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Apakah anda mengetahui permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau	Mengetahui		Tidak Mengetahui	
	Jumlah responden	Persentase	Jumlah responden	Persentase
Sekitar lingkungan	79	49%	81	51%
Lingkup kota	57	36%	103	64%



Gambar 4. 45 Diagram Jumlah Responden yang Mengetahui Permasalahan-Permasalahan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

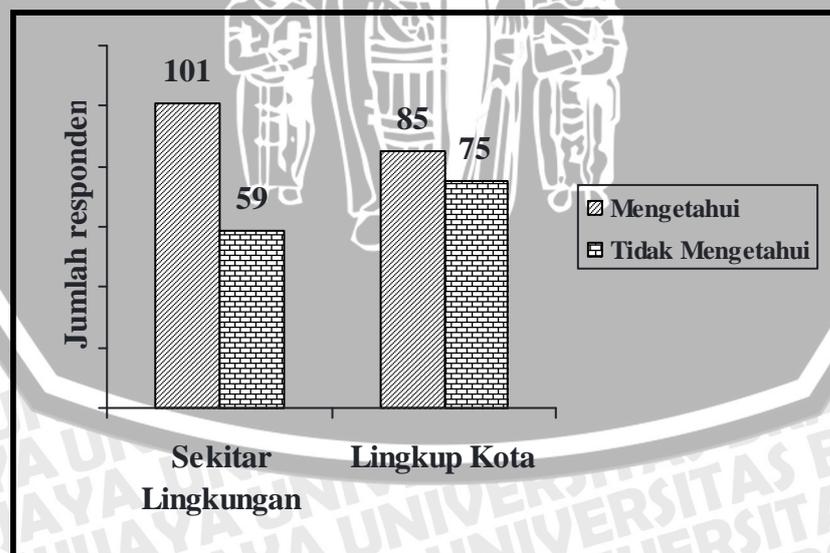
Dari tabel 4.28 dan gambar 4.45 dapat diketahui bahwa hanya sebagian kecil responden yang mengetahui permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Hal ini berbeda pada lingkup lingkungan, yang mana sebagian besar responden telah mengetahui permasalahan-permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau di sekitar lingkungannya. Perbedaan ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal

lingkungannya sekitarnya, sehingga lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan RTH di sekitar lingkungannya karena berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat tersebut.

Sebanyak 101 responden (63%) menyatakan **mengetahui lembaga-lembaga yang mengelola dan membuat keputusan dalam perencanaan ruang terbuka hijau** di sekitar lingkungannya. Sedangkan sisanya sebanyak 37% menyatakan tidak mengetahui lembaga-lembaga tersebut. Untuk lingkup kota, jumlah responden yang mengetahui dan lembaga-lembaga yang mengelola RTH tidak jauh berbeda dengan yang tidak mengetahui. Sebanyak 85 responden (53%) menyatakan mengetahui lembaga-lembaga tersebut, sebanyak 33% lainnya menyatakan bahwa tidak mengetahui lembaga-lembaga yang dimaksud. Menurut pendapat masyarakat lembaga-lembaga yang mengelola dan membuat keputusan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo antara lain Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, kecamatan, kelurahan serta melibatkan juga RW dan RT setempat.

Tabel 4. 29 Jumlah Responden yang Mengetahui Lembaga-Lembaga yang Mengelola dan Membuat Keputusan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Apakah mengetahui lembaga-lembaga yang mengelola dan membuat keputusan dalam perencanaan ruang terbuka hijau	Mengetahui		Tidak Mengetahui	
	Jumlah responden	Persentase	Jumlah responden	Persentase
Sekitar lingkungan	101	63%	59	37%
Lingkup kota	85	53%	75	47%



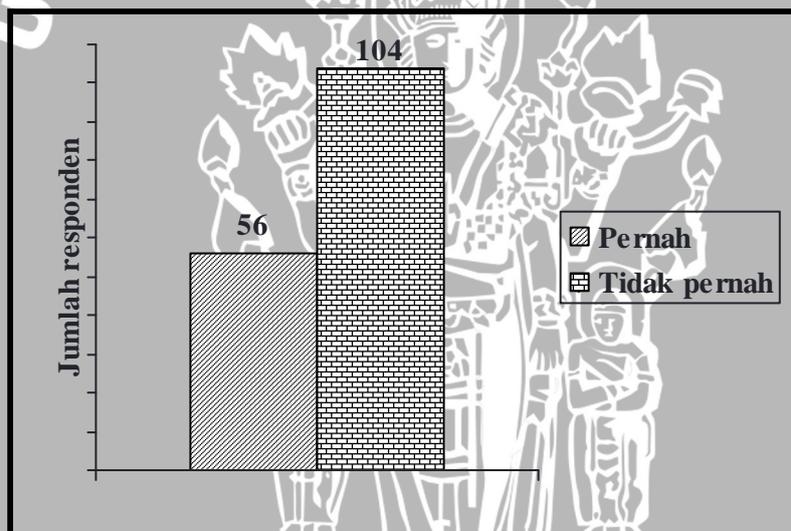
Gambar 4. 46 Diagram Jumlah Responden yang Mengetahui Lembaga-Lembaga yang Mengelola dan Membuat Keputusan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Sebagian besar responden mengetahui lembaga-lembaga yang mengelola dan membuat keputusan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau baik dalam lingkup kota maupun di sekitar lingkungan responden. Hal ini menandakan bahwa pemerintah telah berupaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kelembagaan di Kota Probolinggo.

Sebanyak 56 responden (35%) menyatakan **mengetahui perubahan lahan ruang terbuka hijau untuk kegiatan lainnya (seperti perdagangan atau perkantoran)**. Sedangkan 65% atau 104 responden lainnya menyatakan tidak pernah mengetahui perubahan lahan tersebut.

Tabel 4. 30 Jumlah Responden yang Pernah Mengetahui Perubahan Lahan Ruang Terbuka Hijau untuk Kegiatan Lainnya

Apakah Anda pernah mengetahui perubahan lahan ruang terbuka hijau untuk kegiatan lainnya (seperti perdagangan atau perkantoran)	Pernah		Tidak Pernah	
	Jumlah responden	Persentase	Jumlah responden	Persentase
	56	35%	104	65%



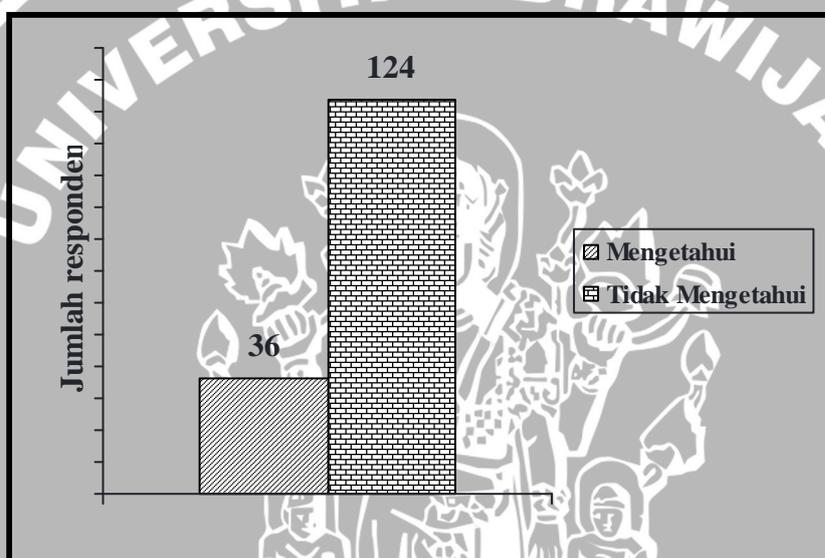
Gambar 4. 47 Diagram Jumlah Responden yang Pernah Mengetahui Perubahan Lahan Ruang Terbuka Hijau untuk Kegiatan Lainnya

Perubahan lahan yang terjadi pada ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo yaitu perubahan lapangan menjadi kompleks perumahan. Dari tabel dan diagram di atas sebagian besar responden tidak mengetahui perubahan guna lahan tersebut. Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa rencana-rencana pemerintah baik berupa RTRW maupun rencana Kawasan Terbuka Hijau belum pernah dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat Kota Probolinggo tidak mengetahui penggunaan lahan eksisting dan pengembangannya beberapa tahun kemudian.

Sebanyak 77,5% atau 124 responden tidak mengetahui asal dana yang digunakan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo, sedangkan 22,5% lainnya mengetahui asal dana tersebut. Menurut pendapat masyarakat yang mengetahui asal dana, pengelolaan ruang terbuka hijau menggunakan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Probolinggo, selain itu masyarakat juga berpendapat dana tersebut juga berasal dari masyarakat Kota Probolinggo.

Tabel 4. 31 Jumlah Responden yang Mengetahui Asal Dana yang Digunakan untuk Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Apakah Anda mengetahui asal dana yang digunakan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau	Mengetahui		Tidak Mengetahui	
	Jumlah responden	Persentase	Jumlah responden	Persentase
	36	22,5%	124	77,5%



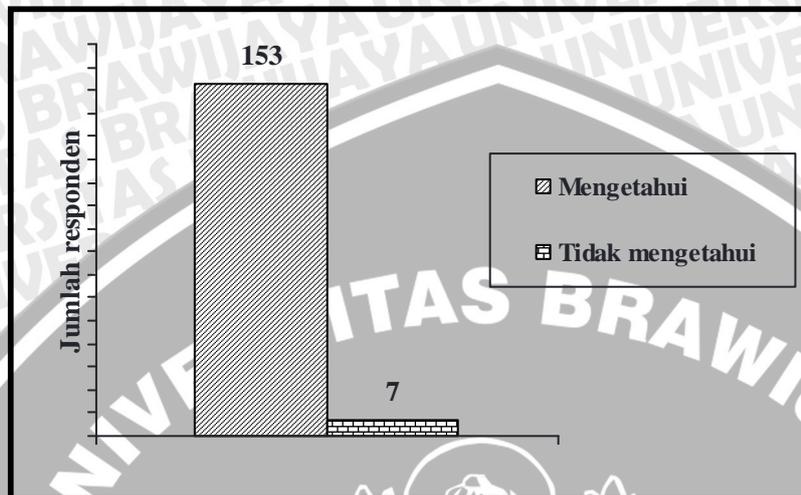
Gambar 4. 48 Diagram Jumlah Responden yang Mengetahui Asal Dana yang Digunakan untuk Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dari tabel 4.31 dan gambar 4.48 dapat diketahui bahwa hanya sebagian kecil responden yang mengetahui asal dana untuk pengelolaan ruang terbuka hijau. Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa pemerintah Kota Probolinggo masih belum terbuka terhadap asal dana yang digunakan selama ini.

Sebagian besar responden yaitu sebanyak 96% menyatakan mengetahui penghargaan yang pernah diperoleh Kota Probolinggo dalam bidang lingkungan, sedangkan sejumlah kecil lainnya (4%) tidak mengetahui penghargaan yang pernah diperoleh Kota Probolinggo. Menurut masyarakat, penghargaan yang pernah diraih oleh Kota Probolinggo dalam bidang lingkungan adalah adipura dan adiwiyata.

Tabel 4. 32 Jumlah Responden yang Mengetahui Penghargaan yang Pernah Diperoleh Kota Probolinggo dalam Bidang Lingkungan

Apakah Anda mengetahui penghargaan yang pernah diperoleh Kota Probolinggo dalam bidang lingkungan	Mengetahui		Tidak Mengetahui	
	Jumlah responden	Persentase	Jumlah responden	Persentase
	153	96%	7	4%



Gambar 4. 49 Diagram Jumlah Responden yang Mengetahui Penghargaan yang Pernah Diperoleh Kota Probolinggo dalam Bidang Lingkungan

Hasil dari beberapa indikator transparansi pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Probolinggo masih belum sepenuhnya menginformasikan hal-hal yang menyangkut pengelolaan ruang terbuka hijau baik itu berupa kegiatan-kegiatan, permasalahan-permasalahan maupun pendanaan. Hal ini seharusnya menjadi gambaran bahwa keterbukaan pemerintah Kota Probolinggo terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau perlu dipertanyakan lagi.

4.4.2 Akuntabilitas dalam Pengelolaan RTH Kota Probolinggo

Akuntabilitas atau *accountability* adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas yang dimaksud dalam pengelolaan ruang terbuka hijau adalah akuntabilitas terhadap variabel-variabel pengelolaan ruang terbuka hijau yaitu perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan.

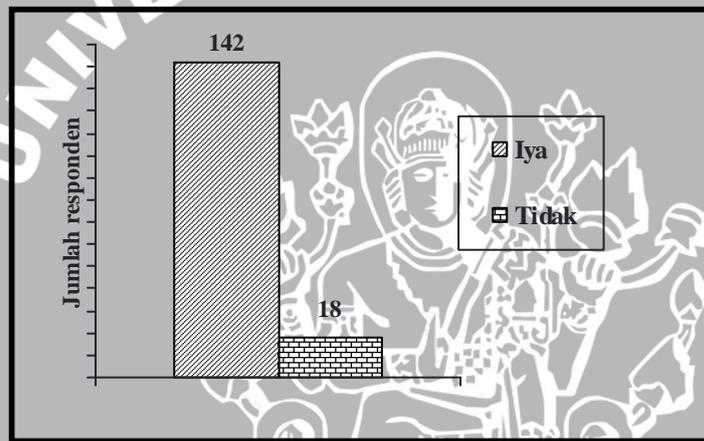
Akuntabilitas pemerintah Kota Probolinggo dalam pengelolaan ruang terbuka hijau diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban proyek-proyek atau program-program pemerintah yang berupa perencanaan, pembangunan maupun perawatan ruang terbuka hijau. Laporan pertanggung jawaban tersebut harus dilaporkan oleh instansi-instansi pengelola RTH setiap selesai pelaksanaan program kepada Wali

Kota Probolinggo. Untuk seterusnya akan diserahkan ke pemerintah pusat agar dapat diketahui mengenai keberhasilan maupun kegagalan program. Hingga tahun 2009, Badan Lingkungan Hidup menyatakan belum pernah mengalami kegagalan dalam setiap program pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Probolinggo. Hanya saja menurut BLH, apabila program tersebut belum selesai hingga waktu yang telah ditentukan maka program tersebut akan diprogramkan kembali pada tahun berikutnya.

Hasil kuisioner yang disebar, dapat diketahui

Tabel 4. 33 Pendapat Responden Mengenai Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Keberhasilan/ Kegagalan Program

Apakah lembaga-lembaga yang mengelola RTH telah bertanggung jawab terhadap keberhasilan/ kegagalan program	Iya		Tidak	
	Jumlah responden	Persentase	Jumlah responden	Persentase
	142	89%	18	11%



Gambar 4. 50 Diagram Pendapat Responden Mengenai Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Keberhasilan/ Kegagalan Program

Dari tabel 4.33 dan gambar 4.50 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mempercayai pemerintah akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo. Hal ini seharusnya menjadi masukan bagi pemerintah agar melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau lebih baik daripada sebelumnya.

4.4.3 Partisipasi dalam Pengelolaan RTH Kota Probolinggo

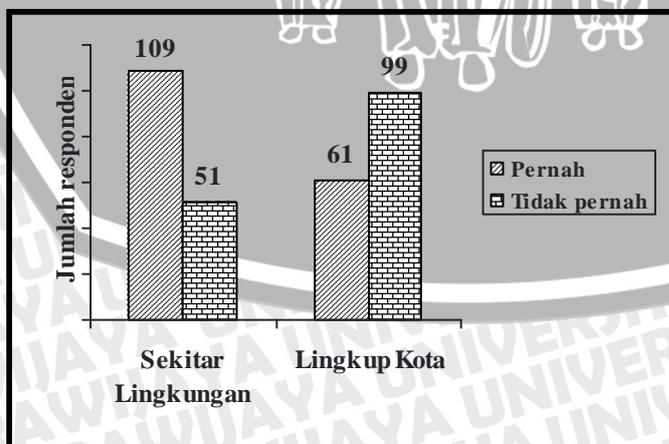
Partisipasi dapat diartikan sebagai peran masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi yang dimaksud dalam pengelolaan ruang terbuka hijau adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, koordinasi serta kelembagaan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dapat dilihat dari seberapa jauh keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan RTH, perencanaan dan evaluasi RTH dan sumbangan untuk pemeliharaan RTH.

Program-program pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya berupa program-program lingkungan hidup, misalnya lomba kampung bersih, lomba kelurahan bersih, kerja bakti, dan lain sebagainya. Untuk program pemerintah yang terkait langsung dengan ruang terbuka hijau yaitu penghijauan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, karena program penghijauan diselenggarakan bekerjasama dengan pihak pengelola industri di Kota Probolinggo. Pengelola industri yang menyediakan bibit serta melakukan penanaman, sedangkan Badan Lingkungan Hidup menentukan lokasi penghijauan. Masyarakat dapat berpartisipasi apabila pihak pengelola industri membutuhkan sumber daya manusia yang besar, namun apabila pihak pengelola industri tidak membutuhkannya, maka masyarakat tidak dapat berpartisipasi.

Sebanyak 109 responden (68%) menyatakan pernah **diikutsertakan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau** di sekitar lingkungannya, sisanya sebanyak 51 responden (32%) menyatakan tidak pernah diikutsertakan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di sekitar lingkungannya. Sedangkan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau dalam lingkup kota, sebanyak 99 responden atau 62% menyatakan tidak pernah diikutsertakan. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden yang pernah ikut serta dalam pengelolaan RTH di lingkup kota yaitu sebesar 38%.

Tabel 4. 34 Jumlah Responden yang Pernah Diikutsertakan dalam Pemeliharaan dan Perawatan Ruang Terbuka Hijau

Apakah Anda pernah diikutsertakan dalam pemeliharaan dan perawatan ruang terbuka hijau	Pernah		Tidak Pernah	
	Jumlah responden	Persentase	Jumlah responden	Persentase
Sekitar lingkungan	109	68%	51	31%
Lingkup kota	61	38%	99	61%

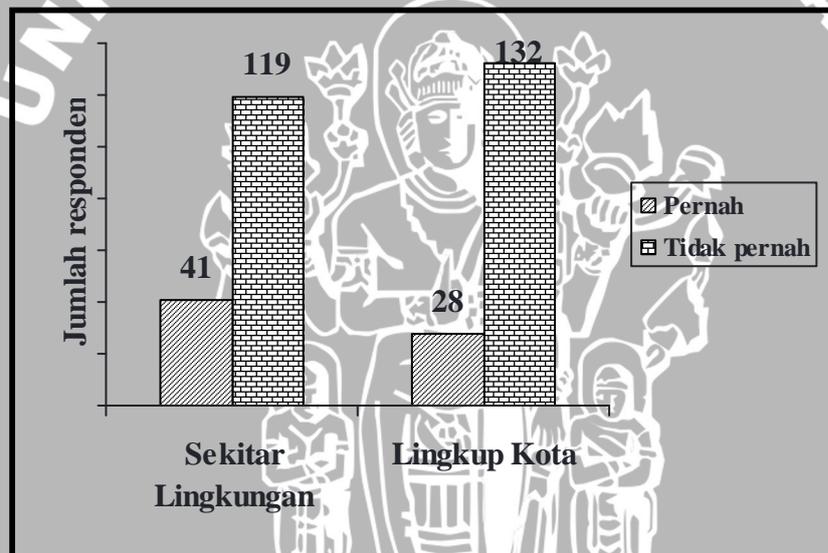


Gambar 4. 51 Digram Jumlah Responden yang Pernah Diikutsertakan dalam Pemeliharaan dan Perawatan Ruang Terbuka Hijau

Sebanyak 119 responden (74%) menyatakan tidak pernah **dilibatkan untuk memberikan saran/masukan/usulan dalam perencanaan atau evaluasi RTH** di sekitar lingkungannya., sedangkan sebanyak 26% lainnya menyatakan pernah dilibatkan. Untuk lingkup kota, sebagian besar responden yaitu 82,5% tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan ruang terbuka. Sisanya sebanyak 17,5% atau 28 responden pernah dilibatkan untuk memberikan saran/masukan/usulan dalam perencanaan atau evaluasi ruang terbuka hijau dalam lingkup kota.

Tabel 4. 35 Jumlah Responden yang Pernah Dilibatkan untuk Memberikan Usulan dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau

Pernakah dalam perencanaan atau evaluasi RTH, Anda sebagai masyarakat ikut dilibatkan untuk memberikan saran/ masukan/ usulan	Pernah		Tidak Pernah	
	Jumlah responden	Persentase	Jumlah responden	Persentase
Sekitar lingkungan	41	26%	119	74%
Lingkup kota	28	17,5%	132	82,5%



Gambar 4. 52 Diagram Jumlah Responden yang Pernah Dilibatkan untuk Memberikan Usulan dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau

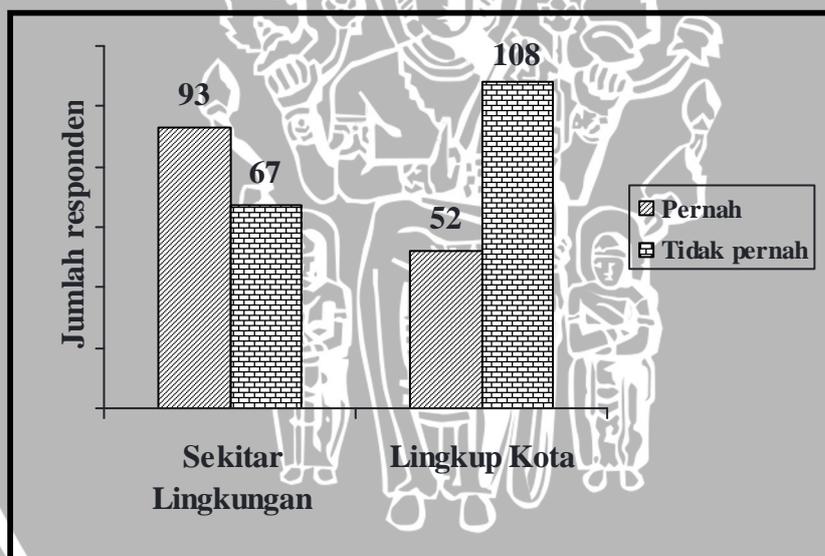
Sebagian besar responden berpartisipasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di sekitar lingkungannya, hal ini berbanding terbalik dengan partisipasi responden pada pengelolaan ruang terbuka hijau lingkup kota. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di sekitar lingkungannya dapat berupa ikut menanam pohon untuk penghijauan kota, serta merawat taman di sekitar lingkungannya. Sedangkan penglibatan masyarakat dalam memberikan usulan atau masukan untuk perencanaan dan evaluasi RTH masih sangat minim. Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan pernah dilibatkan dalam memberikan usulan dan masukan. Hal ini dapat menjadi gambaran bagi pemerintah Kota Probolinggo agar lebih melibatkan masyarakat

dalam pengelolaan ruang terbuka hijau lingkup kota, karena masyarakat merupakan *stakeholder* yang paling penting dalam perkembangan suatu kota.

Responden yang pernah **memberikan sumbangan untuk membangun dan memelihara ruang terbuka hijau** di sekitar lingkungannya sebanyak 58%, sedangkan 42% lainnya atau 67 responden tidak pernah memberikan sumbangan. Untuk lingkup kota, jumlah responden yang tidak pernah memberikan sumbangan untuk pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau lebih banyak dibandingkan untuk lingkup lingkungan. Jumlah responden yang pernah memberikan sumbangan sebanyak 32,5% dan responden yang tidak pernah memberikan sumbangan sebanyak 67,5% atau 108 responden.

Tabel 4. 36 Jumlah Responden yang Pernah Memberikan Sumbangan untuk Membangun dan Memelihara Ruang Terbuka Hijau

Apakah Anda pernah memberikan sumbangan untuk membangun dan memelihara ruang terbuka hijau	Pernah		Tidak Pernah	
	Jumlah responden	Persentase	Jumlah responden	Persentase
Sekitar lingkungan	93	58%	67	42%
Lingkup kota	52	32,5%	108	67,5%



Gambar 4. 53 Diagram Jumlah Responden yang Pernah Memberikan Sumbangan untuk Membangun dan Memelihara Ruang Terbuka Hijau

4.5 Analisis Pengembangan

Analisis pengembangan digunakan untuk mendapatkan strategi pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* di Kota Probolinggo yang dapat diperoleh dari beberapa analisis antara lain *Importane Performance Analysis* (IPA), IFAS-EFAS dan *Analysis Hierarchy Process* (AHP).

4.5.1 Importance Performance Analysis (IPA)

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap atribut pada pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* di Kota Probolinggo digambarkan oleh tingkat kesesuaian antara penilaian pendapat terhadap kualitas dan penilaian tingkat kepentingan terhadap atribut pengelolaan ruang terbuka hijau. Masyarakat akan merasa puas apabila penilaian terhadap tingkat kepuasan sebanding dengan tingkat kepentingan yang diharapkan. Apabila nilai kesesuaian masing-masing atribut melebihi nilai kesesuaian rata-rata seluruh atribut maka masyarakat dinilai sangat puas, sedangkan jika dibawah nilai kesesuaian rata-rata seluruh atribut menandakan bahwa terdapat atribut yang dianggap perlu ditingkatkan kualitasnya.

Berikut ini merupakan atribut-atribut yang akan digunakan pada *Importance Performance Analysis (IPA)*.

Tabel 4. 37 Atribut-Atribut Kondisi Fisik Ruang Terbuka Hijau yang Digunakan pada IPA

No	Atribut
1	Kondisi taman kota
2	Kondisi taman rekreasi
3	Kondisi taman lingkungan perumahan
4	Kondisi taman lingkungan perkantoran
5	Kondisi hutan kota
6	Kondisi pemakaman umum
7	Kondisi lapangan olahraga
8	Kondisi lahan pertanian perkotaan
9	Kondisi RTH jalur tegangan tinggi SUTT
10	Kondisi RTH sempadan sungai dan pantai
11	Kondisi RTH jalur pengaman jalan, median jalan dan rel kereta api
12	Fasilitas yang disediakan di taman kota dan taman rekreasi
13	Perencanaan fisik taman kota
14	Perencanaan fisik taman rekreasi
15	Perencanaan fisik taman lingkungan perumahan
16	Perencanaan fisik taman lingkungan perkantoran
17	Perencanaan fisik hutan kota
18	Perencanaan fisik pemakaman umum
19	Perencanaan fisik lapangan olahraga
20	Perencanaan fisik lahan pertanian perkotaan
21	Perencanaan fisik RTH jalur tegangan tinggi SUTT
22	Perencanaan fisik RTH sempadan sungai dan pantai
23	Perencanaan fisik RTH jalur pengaman jalan, median jalan dan rel kereta api
24	Fungsi hutan kota untuk menjaga ekosistem kota
25	Fungsi taman kota, taman rekreasi dan taman lingkungan yang ada di Kota Probolinggo sebagai ruang publik

Tabel 4. 38 Atribut-Atribut Transparansi yang Digunakan pada IPA

No	Atribut
26	Keterbukaan/ transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam penyebaran informasi mengenai pengelolaan RTH
27	Transparansi kelembagaan yang mengelola dan membuat keputusan dalam perencanaan RTH di sekitar lingkungan anda

No	Atribut
28	Transparansi kelembagaan yang mengelola dan membuat keputusan dalam perencanaan RTH dalam lingkup kota
29	Kinerja dan kemampuan pengelola RTH di sekitar lingkungan
30	Kinerja dan kemampuan pengelola RTH dalam lingkup kota
31	Transparansi sistem pendanaan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan RTH

Tabel 4. 39 Atribut-Atribut Akuntabilitas yang Digunakan pada IPA

No	Atribut
32	Tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan RTH di sekitar lingkungan anda
33	Tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan RTH dalam lingkup kota
34	Kesesuaian lahan untuk RTH di Kota Probolinggo

Tabel 4. 40 Atribut-Atribut Partisipasi yang Digunakan pada IPA

No	Atribut
35	Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan RTH di sekitar lingkungan anda
36	Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan RTH dalam lingkup kota
37	Kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan RTH di sekitar lingkungan
38	Kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan RTH di lingkup kota
39	Keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran/masukan/usulan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan RTH di sekitar lingkungan anda
40	Keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran/masukan/usulan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan RTH dalam lingkup kota

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara pendapat (X) dan kepentingan (Y) masyarakat terhadap atribut-atribut pada pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 41 Tingkat kesesuaian pendapat dan kepentingan masyarakat terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* di Kota Probolinggo

Atribut IPA ke-...	X	Y	Tki
1	627	674	93,03%
2	508	687	73,94%
3	461	668	69,01%
4	488	674	72,40%
5	458	691	66,28%
6	442	593	74,54%
7	500	640	78,13%
8	496	596	83,22%
9	485	626	77,48%
10	437	650	67,23%
11	540	600	90,00%
12	573	668	85,78%
13	631	668	94,46%
14	570	672	84,82%
15	517	550	94,00%
16	501	552	90,76%
17	497	675	73,63%
18	493	548	89,96%
19	527	594	88,72%

Atribut IPA ke-...	X	Y	Tki
20	496	529	93,76%
21	478	649	73,65%
22	482	671	71,83%
23	541	604	89,57%
24	527	693	76,05%
25	616	654	94,19%
26	403	706	57,08%
27	416	692	60,12%
28	406	694	58,50%
29	574	672	85,42%
30	612	698	87,68%
31	484	708	68,36%
32	371	712	52,11%
33	312	725	43,03%
34	295	711	41,49%
35	490	701	69,90%
36	348	725	48,00%
37	463	685	67,59%
38	520	689	75,47%
39	299	725	41,24%
40	259	740	35,00%
Jumlah	19143	26409	2937,43%
Rata-rata			73,44%

Berdasarkan tabel 4.41 diatas dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap atribut-atribut pada pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* di Kota Probolinggo yaitu sebagai berikut:

- § Tingkat kepuasan berkisar antara 35,00% sampai dengan 94,46%.
- § Masyarakat merasa puas terhadap atribut yang mempunyai tingkat kesesuaian melebihi nilai kesesuaian rata-rata seluruh atribut yaitu 73,44%. Adapun atribut tersebut antara lain:

Tabel 4. 42 Atribut yang dirasa puas oleh masyarakat Kota Probolinggo

Atribut IPA ke-...	Atribut
1	Kondisi taman kota
2	Kondisi taman rekreasi
6	Kondisi pemakaman umum
7	Kondisi lapangan olahraga
8	Kondisi lahan pertanian perkotaan
9	Kondisi RTH jalur tegangan tinggi SUTT
11	Kondisi RTH jalur pengaman jalan, median jalan dan rel kereta api
12	Fasilitas yang disediakan di taman kota dan taman rekreasi
13	Perencanaan fisik taman kota
14	Perencanaan fisik taman rekreasi
15	Perencanaan fisik taman lingkungan perumahan
16	Perencanaan fisik taman lingkungan perkantoran
17	Perencanaan fisik hutan kota
18	Perencanaan fisik pemakaman umum
19	Perencanaan fisik lapangan olahraga
20	Perencanaan fisik lahan pertanian perkotaan
21	Perencanaan fisik RTH jalur tegangan tinggi SUTT

Atribut IPA ke-...	Atribut
23	Perencanaan fisik RTH jalur pengaman jalan, median jalan dan rel kereta api
24	Fungsi hutan kota untuk menjaga ekosistem kota
25	Fungsi taman kota, taman rekreasi dan taman lingkungan yang ada di Kota Probolinggo sebagai ruang publik
29	Kinerja dan kemampuan pengelola RTH di sekitar lingkungan
30	Kinerja dan kemampuan pengelola RTH dalam lingkup kota
38	Kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan RTH di lingkup kota

Selanjutnya untuk mengetahui atribut-atribut yang perlu ditingkatkan dilakukan proses perhitungan nilai rata-rata tingkat pendapat dan penilaian rata-rata tingkat kepentingan terhadap atribut-atribut turunan dari variabel pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* di Kota Probolinggo. Skor rata-rata tingkat pendapat selanjutnya menjadi sumbu horisontal, sedangkan skor rata-rata tingkat kepentingan menjadi sumbu vertikal, yang ditunjukkan oleh koordinat (\bar{X}, \bar{Y}) . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.43.

Tabel 4. 43 Nilai Koordinat Atribut IPA

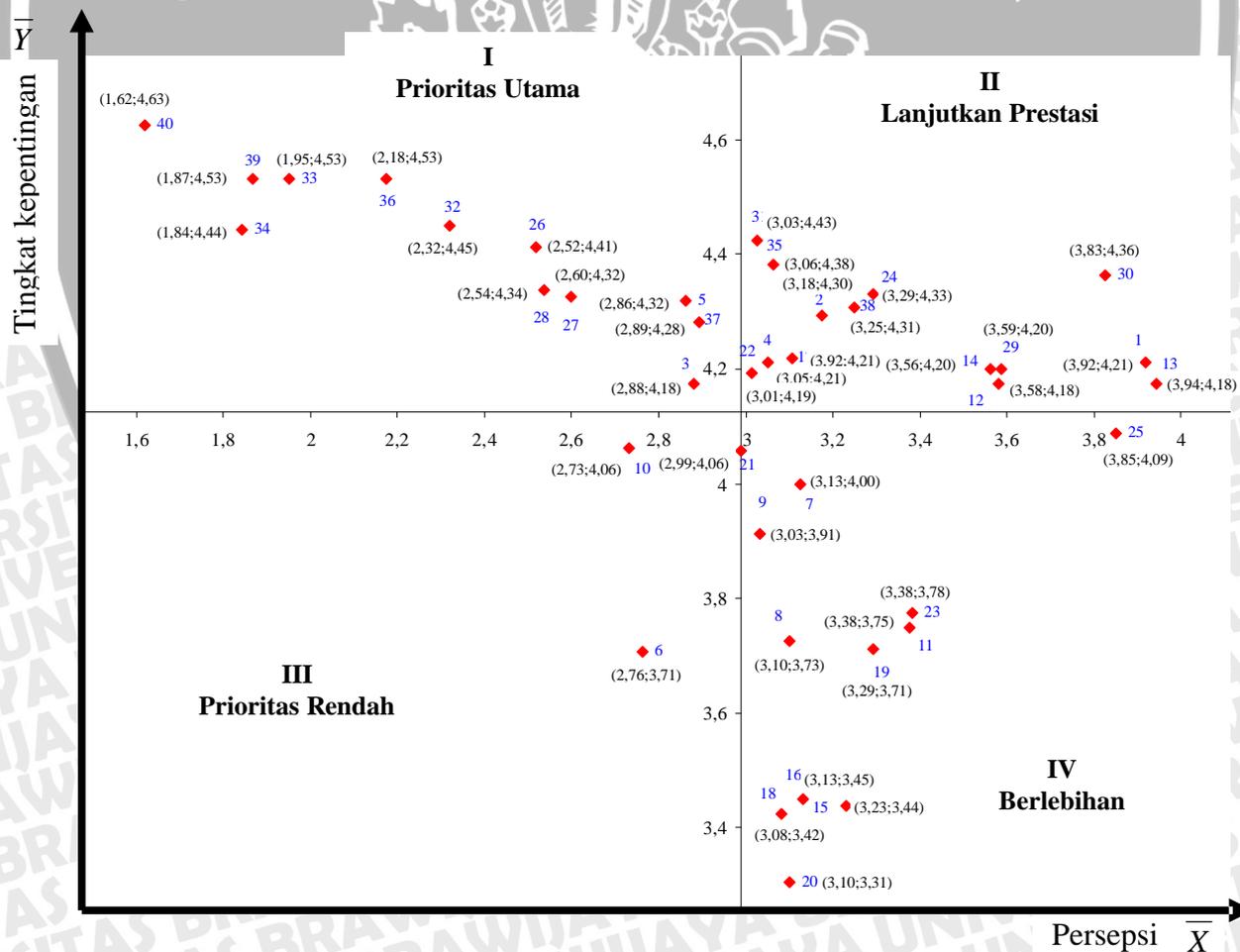
Atribut IPA ke-...	X	Y	\bar{X}	\bar{Y}
1	627	674	3,92	4,21
2	508	687	3,18	4,29
3	461	668	2,88	4,18
4	488	674	3,05	4,21
5	458	691	2,86	4,32
6	442	593	2,76	3,71
7	500	640	3,13	4,00
8	496	596	3,10	3,73
9	485	626	3,03	3,91
10	437	650	2,73	4,06
11	540	600	3,38	3,75
12	573	668	3,58	4,18
13	631	668	3,94	4,18
14	570	672	3,56	4,20
15	517	550	3,23	3,44
16	501	552	3,13	3,45
17	497	675	3,11	4,22
18	493	548	3,08	3,43
19	527	594	3,29	3,71
20	496	529	3,10	3,31
21	478	649	2,99	4,06
22	482	671	3,01	4,19
23	541	604	3,38	3,78
24	527	693	3,29	4,33
25	616	654	3,85	4,09
26	403	706	2,52	4,41
27	416	692	2,60	4,33
28	406	694	2,54	4,34
29	574	672	3,59	4,20
30	612	698	3,83	4,36
31	484	708	3,03	4,43
32	371	712	2,32	4,45
33	312	725	1,95	4,53



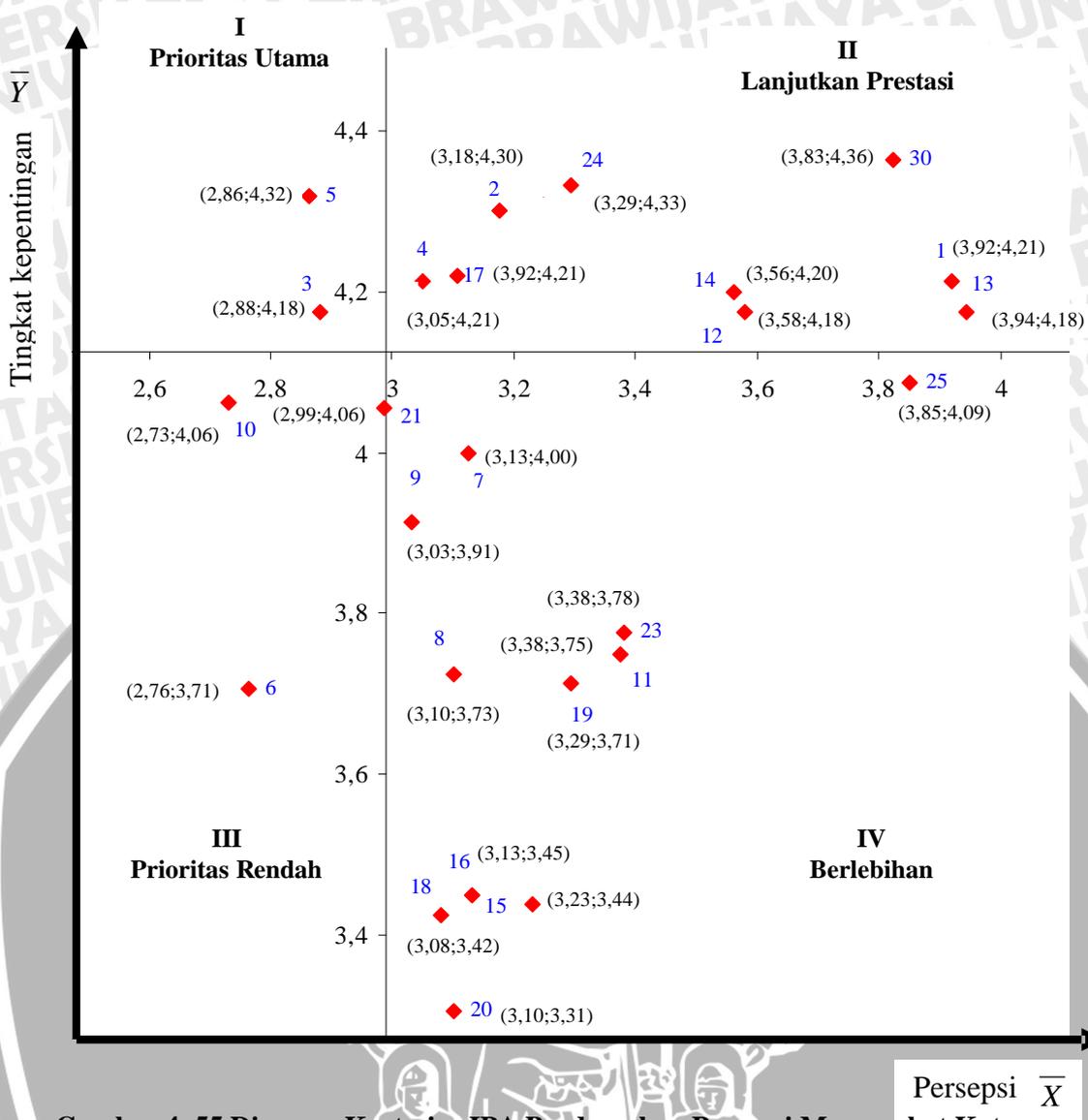
Atribut IPA ke-...	X	Y	\bar{X}	\bar{Y}
34	295	711	1,84	4,44
35	490	701	3,06	4,38
36	348	725	2,18	4,53
37	463	685	2,89	4,28
38	520	689	3,25	4,31
39	299	725	1,87	4,53
40	259	740	1,62	4,63
Jumlah	19143	26409	119,65	165,09
Rata-rata			2,99	4,13

Berdasarkan tabel 4.43 diketahui nilai batas objektif pendapat dan nilai batas objektif tingkat kepentingan responden terhadap atribut-atribut turunan dari variabel pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* di Kota Probolinggo, yaitu nilai batas objektif pendapat (\bar{X}) yaitu 2,99 dan nilai batas objektif tingkat kepentingan (\bar{Y}) sebesar 4,13.

Agar nampak jelas ke-40 atribut turunan variabel pengelolaan ruang terbuka hijau berada dalam kuadran yang mana, maka atribut-atribut tersebut diplotkan dalam diagram kartesius IPA, seperti terlihat pada gambar 4.54.

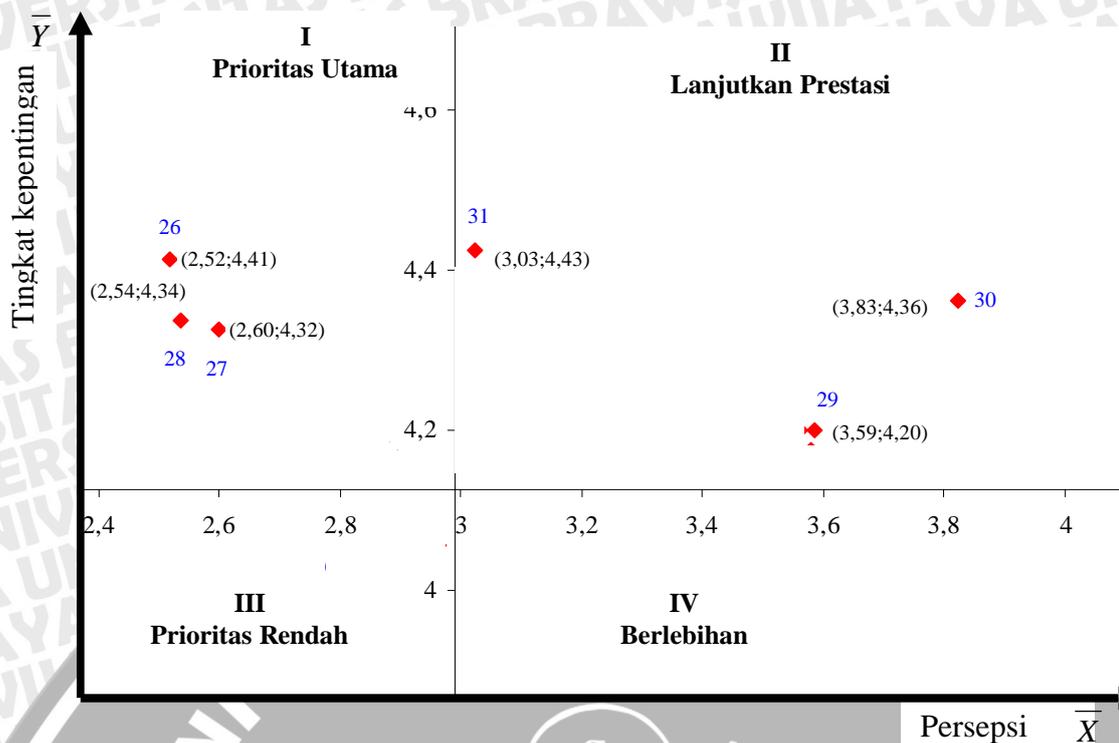


Gambar 4. 54 Diagram Kartesius IPA Berdasarkan Persepsi Masyarakat Kota Probolinggo

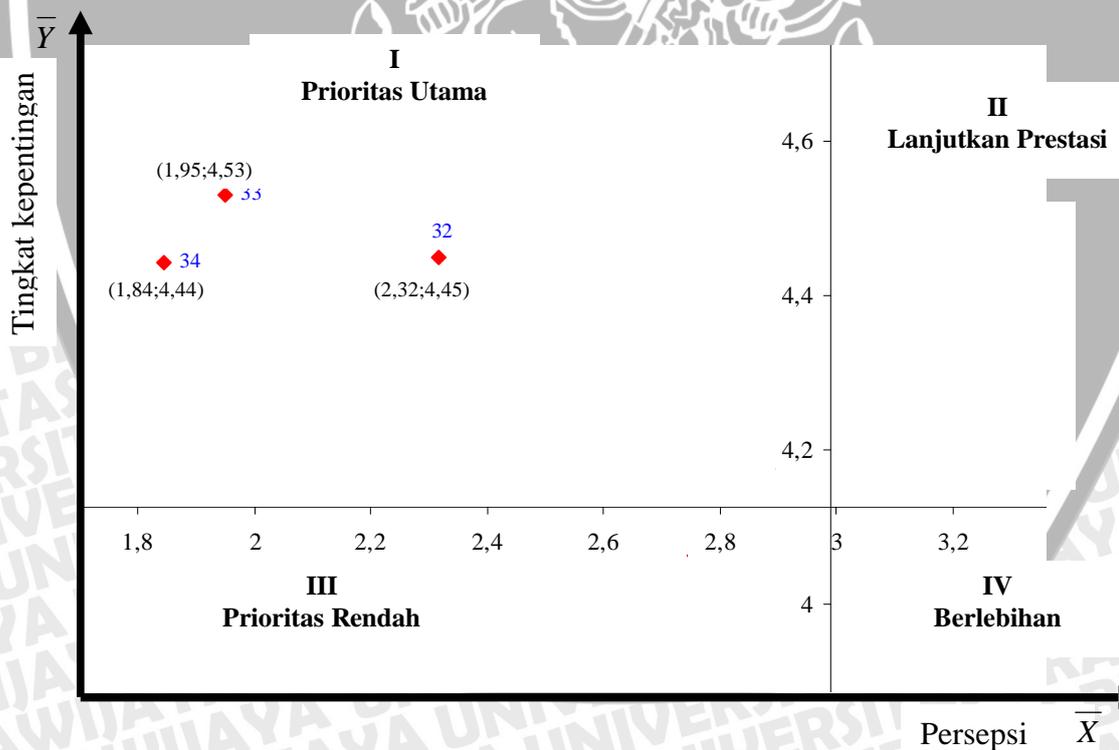


Gambar 4. 55 Diagram Kartesius IPA Berdasarkan Persepsi Masyarakat Kota Probolinggo terhadap Atribut-Atribut Kondisi Fisik Ruang Terbuka Hijau

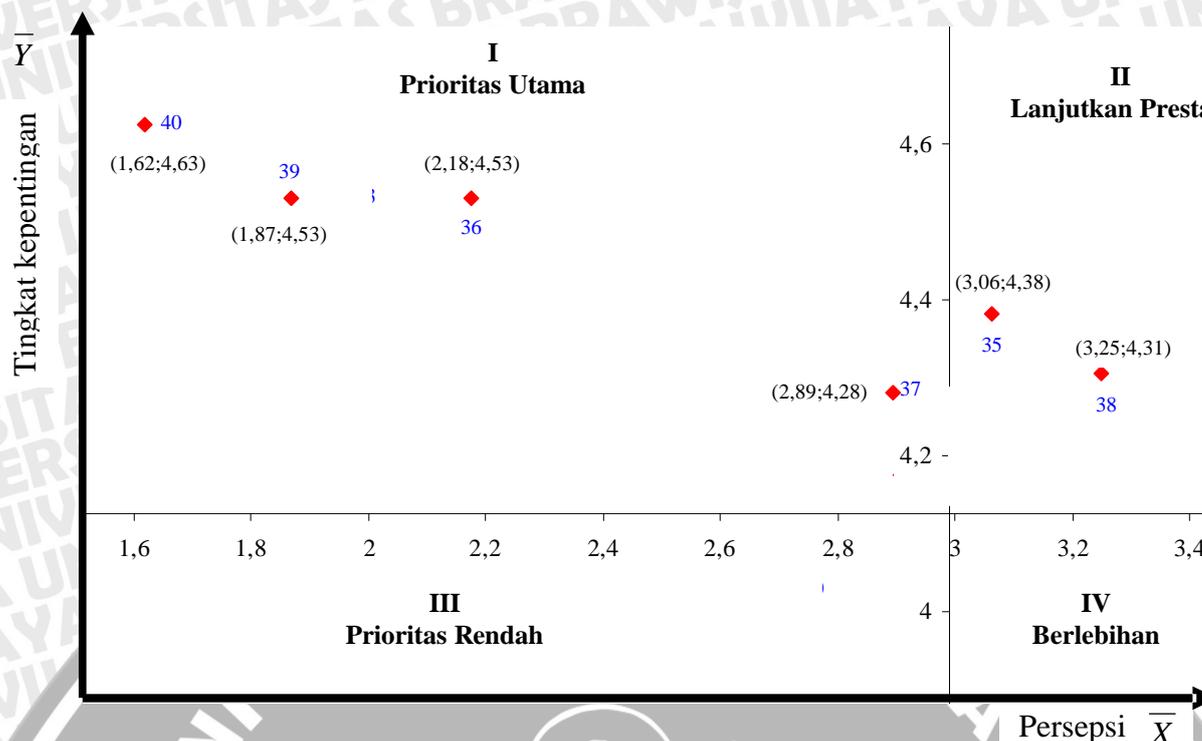




Gambar 4. 56 Diagram Kartesius IPA Berdasarakan Persepsi Masyarakat Kota Probolinggo terhadap Atribut-Atribut Transparansi



Gambar 4. 57 Diagram Kartesius IPA Berdasarakan Persepsi Masyarakat Kota Probolinggo terhadap Atribut-Atribut Akuntabilitas



Gambar 4. 58 Diagram Kartesius IPA Berdasarkan Persepsi Masyarakat Kota Probolinggo terhadap Atribut-Atribut Partisipasi

Berdasarkan diagram kartesius di atas, dapat dikelompokkan antara atribut yang berada pada kuadran I, II, III dan IV. Posisi atribut dalam diagram digunakan sebagai arahan dalam melakukan prioritas pembenahan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* di Kota Probolinggo. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.44.

Tabel 4. 44 Letak Atribut terhadap Kuadran IPA

No	Atribut	Kuadran IPA
1	Kondisi taman kota	Lanjutkan Prestasi
2	Kondisi taman rekreasi	Lanjutkan Prestasi
3	Kondisi taman lingkungan perumahan	Prioritas Utama
4	Kondisi taman lingkungan perkantoran	Lanjutkan Prestasi
5	Kondisi hutan kota	Prioritas Utama
6	Kondisi pemakaman umum	Prioritas Rendah
7	Kondisi lapangan olahraga	Berlebihan
8	Kondisi lahan pertanian perkotaan	Berlebihan
9	Kondisi RTH jalur tegangan tinggi SUTT	Berlebihan
10	Kondisi RTH sempadan sungai dan pantai	Prioritas Rendah
11	Kondisi RTH jalur pengaman jalan, median jalan dan rel kereta api	Berlebihan
12	Fasilitas yang disediakan di taman kota dan taman rekreasi	Lanjutkan Prestasi
13	Perencanaan fisik taman kota	Lanjutkan Prestasi
14	Perencanaan fisik taman rekreasi	Lanjutkan Prestasi
15	Perencanaan fisik taman lingkungan perumahan	Berlebihan
16	Perencanaan fisik taman lingkungan perkantoran	Berlebihan
17	Perencanaan fisik hutan kota	Lanjutkan Prestasi
18	Perencanaan fisik pemakaman umum	Berlebihan
19	Perencanaan fisik lapangan olahraga	Berlebihan
20	Perencanaan fisik lahan pertanian perkotaan	Berlebihan



No	Atribut	Kuadran IPA
21	Perencanaan fisik RTH jalur tegangan tinggi SUTT	Prioritas Rendah
22	Perencanaan fisik RTH sempadan sungai dan pantai	Lanjutkan Prestasi
23	Perencanaan fisik RTH jalur pengaman jalan, median jalan dan rel kereta api	Berlebihan
24	Fungsi hutan kota untuk menjaga ekosistem kota	Lanjutkan Prestasi
25	Fungsi taman kota, taman rekreasi dan taman lingkungan yang ada di Kota Probolinggo sebagai ruang publik	Berlebihan
26	Keterbukaan/ transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam penyebaran informasi mengenai pengelolaan RTH	Prioritas Utama
27	Transparansi kelembagaan yang mengelola dan membuat keputusan dalam perencanaan RTH di sekitar lingkungan anda	Prioritas Utama
28	Transparansi kelembagaan yang mengelola dan membuat keputusan dalam perencanaan RTH dalam lingkup kota	Prioritas Utama
29	Kinerja dan kemampuan pengelola RTH di sekitar lingkungan	Lanjutkan Prestasi
30	Kinerja dan kemampuan pengelola RTH dalam lingkup kota	Lanjutkan Prestasi
31	Transparansi sistem pendanaan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan RTH	Lanjutkan Prestasi
32	Tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan RTH di sekitar lingkungan anda	Prioritas Utama
33	Tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan RTH dalam lingkup kota	Prioritas Utama
34	Kesesuaian lahan untuk RTH di Kota Probolinggo	Prioritas Utama
35	Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan RTH di sekitar lingkungan anda	Lanjutkan Prestasi
36	Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan RTH dalam lingkup kota	Prioritas Utama
37	Kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan RTH di sekitar lingkungan	Prioritas Utama
38	Kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan RTH di lingkup kota	Lanjutkan Prestasi
39	Keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran/masukan/usulan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan RTH di sekitar lingkungan anda	Prioritas Utama
40	Keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran/masukan/usulan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan RTH dalam lingkup kota	Prioritas Utama

Strategi umum yang dapat diterapkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* di Kota Probolinggo berdasarkan diagram kartesius IPA adalah sebagai berikut.

– Kuadran I: Prioritas Utama

Item-item yang termasuk dalam kuadran ini memiliki kondisi yang tidak memuaskan dan harus ditingkatkan kinerjanya.

– Kuadran II: Lanjutkan Prestasi

Item-item yang termasuk dalam kuadran ini perlu untuk dipertahankan dan tidak menutup kemungkinan suatu saat ditingkatkan.

– Kuadran III: Prioritas Rendah

Peningkatan item-item yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sangat kecil.

– Kuadran IV: Berlebihan

Item-item yang termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar biaya pengelolaan dapat dihemat.

Untuk lebih jelasnya mengenai strategi yang dapat diterapkan pada tiap atribut pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 45 Rekomendasi Tiap Atribut Berdasarkan Diagram IPA

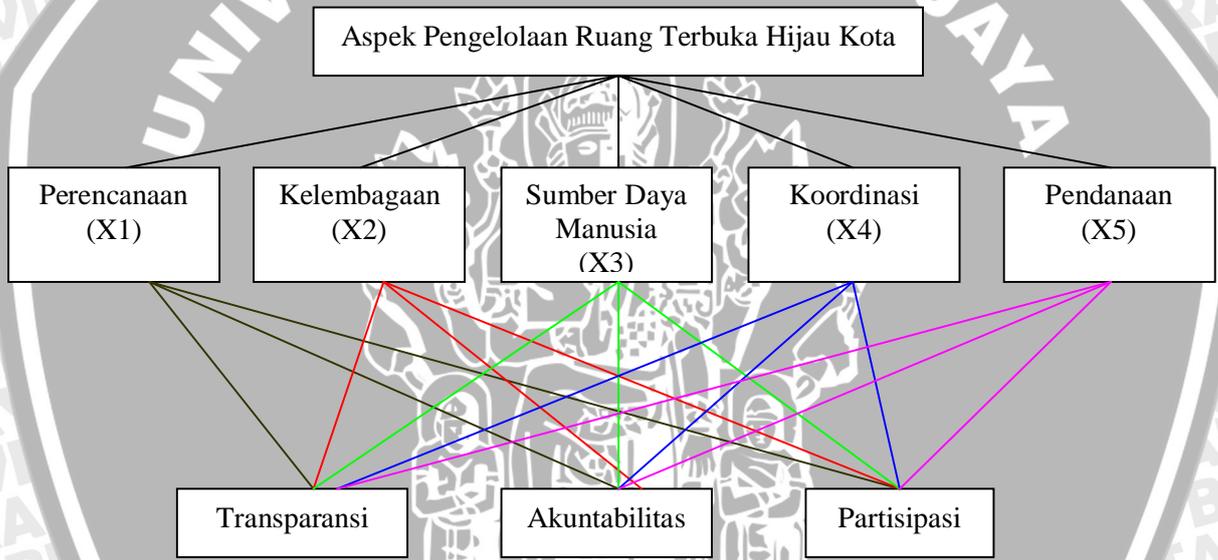
Kuadran	Atribut	Rekomendasi
I	Kondisi taman lingkungan perumahan	Peningkatan kondisi taman lingkungan perumahan, misalnya dengan penambahan jumlah taman dan perlu didukung dengan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya. Selain itu, pengembang perumahan harus menaati peraturan tentang luasan RTH pada perumahan baru.
	Kondisi hutan kota	Perlunya perbaikan kondisi hutan kota dengan penambahan jumlah dan jenis tanaman.
	Keterbukaan/ transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam penyebaran informasi mengenai pengelolaan RTH	Meningkatkan keterbukaan pemerintah dalam penyebaran informasi mengenai pengelolaan RTH misalnya dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui media siar maupun media cetak.
	Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan RTH dalam lingkup kota	Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan RTH dalam lingkup kota, misalnya masyarakat diikutsertakan dalam diskusi maupun forum.
	Kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan RTH di sekitar lingkungan	Meningkatkan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam pengelolaan RTH yang selama ini telah dilakukan, misalnya dengan mengadakan kerja bakti.
	Tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan RTH di sekitar lingkungan anda	Pemerintah harus lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pengelolaan RTH, misalnya dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar yang memanfaatkan RTH untuk kepentingan pribadi.
	Tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan RTH dalam lingkup kota	
	Transparansi kelembagaan yang mengelola dan membuat keputusan dalam perencanaan RTH di sekitar lingkungan anda	Transparansi kelembagaan di lingkup lingkungan perlu ditingkatkan, hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga-lembaga yang mengelola RTH
	Transparansi kelembagaan yang mengelola dan membuat keputusan dalam perencanaan RTH dalam lingkup kota	

Kuadran	Atribut	Rekomendasi
	Kesesuaian lahan untuk RTH di Kota Probolinggo	Kesesuaian lahan untuk RTH di Kota Probolinggo lebih disesuaikan dengan rencana tata ruang yang ada, sehingga pengembangan ke depannya tidak menyimpang dari petaturan yang ada
	Keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran/masukan/usulan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan RTH di sekitar lingkungan anda	Meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran/masukan/usulan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan RTH, misalnya perlu adanya forum diskusi antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan pengelolaan RTH
	Keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran/masukan/usulan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan RTH dalam lingkup kota	
II	Kondisi taman kota	Mempertahankan kondisi taman kota yang ada saat ini, namun perlu peningkatan kebersihan taman kota.
	Kondisi taman rekreasi	Perlunya perbaikan kondisi taman rekreasi terutama dari segi fisik, misalnya penambahan jumlah tempat sampah, penambahan flora dan fauna di taman rekreasi, dan lain sebagainya.
	Kondisi taman lingkungan perkantoran	Mempertahankan kondisi taman lingkungan perkantoran yang ada saat ini, dan meningkatkan kebersihan taman lingkungan.
	Fasilitas yang disediakan di taman kota dan taman rekreasi	Mempertahankan fasilitas yang disediakan di taman kota dan taman rekreasi, namun tidak menutup kemungkinan untuk ditingkatkan.
	Perencanaan fisik taman kota	Perencanaan fisik taman kota perlu dipertahankan. Fasilitas yang terdapat didalamnya perlu perawatan dan pemeliharaan.
	Perencanaan fisik taman rekreasi	Perencanaan fisik taman rekreasi perlu dipertahankan. Fasilitas yang terdapat didalamnya perlu perawatan dan pemeliharaan.
	Perencanaan fisik hutan kota	Perlu peningkatan dalam perencanaan fisik hutan kota, misalnya dengan penambahan jenis vegetasi dan juga penambahan jumlah vegetasi yang ada di hutan kota.
	Perencanaan fisik RTH sempadan sungai dan pantai	Perencanaan fisik RTH sempadan sungai dan pantai perlu ditingkatkan terutama mengenai batas-batas sempadan sungai dan pantai yang boleh dibangun serta yang tidak boleh dibangun.
	Fungsi hutan kota untuk menjaga ekosistem kota	Perlunya peningkatan fungsi hutan kota untuk menjaga ekosistem yaitu dengan penambahan jumlah dan jenis vegetasi yang ada di hutan kota.
	Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan RTH di sekitar lingkungan anda	Mempertahankan dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan RTH di sekitar lingkungan, misalnya masyarakat diikutsertakan dalam diskusi.
	Kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan RTH di lingkup kota	Mempertahankan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam pengelolaan RTH yang selama ini telah dilakukan, misalnya dengan mengadakan perlombaan kampung bersih.

Kuadran	Atribut	Rekomendasi
	Kinerja dan kemampuan pengelola RTH di sekitar lingkungan	Mempertahankan dan memperbaiki kinerja dan kemampuan pengelola RTH baik dalam lingkup kota maupun dalam lingkup lingkungan.
	Kinerja dan kemampuan pengelola RTH dalam lingkup kota	
	Transparansi sistem pendanaan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan RTH	Transparansi sistem pendanaan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan RTH harus ditingkatkan.
III	Kondisi pemakaman umum	Kondisi pemakaman umum perlu dipertahankan.
	Kondisi RTH sempadan sungai dan pantai	Kondisi RTH sempadan sungai dan pantai perlu dipertahankan, namun tetap harus menegakkan aturan yang ada agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi lahan.
	Perencanaan fisik RTH jalur tegangan tinggi SUTT	Perencanaan fisik RTH jalur tegangan tinggi SUTT yang telah dilaksanakan selama ini perlu dipertahankan, namun tidak perlu untuk ditingkatkan lagi.
IV	Kondisi lapangan olahraga	Kondisi lapangan olahraga perlu dipertahankan.
	Kondisi lahan pertanian perkotaan	Mempertahankan kondisi lahan pertanian perkotaan
	Kondisi RTH jalur tegangan tinggi SUTT	Kondisi RTH jalur tegangan tinggi SUTT saat ini perlu dipertahankan, namun tetap harus menegakkan aturan yang ada agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi lahan.
	Kondisi RTH jalur pengaman jalan, median jalan dan rel kereta api	Kondisi RTH jalur pengaman jalan dan median jalan saat ini perlu dipertahankan.
	Perencanaan fisik taman lingkungan perumahan	Perencanaan fisik taman lingkungan perumahan yang telah dilaksanakan selama ini perlu dipertahankan.
	Perencanaan fisik taman lingkungan perkantoran	Perencanaan fisik taman lingkungan perkantoran yang telah dilaksanakan selama ini perlu dipertahankan.
	Perencanaan fisik pemakaman umum	Perencanaan fisik pemakaman umum yang telah dilaksanakan selama ini perlu dipertahankan, namun tidak perlu untuk ditingkatkan lagi.
	Perencanaan fisik lapangan olahraga	Perencanaan fisik lapangan olahraga yang telah dilaksanakan selama ini perlu dipertahankan, namun tidak perlu untuk ditingkatkan lagi.
	Perencanaan fisik lahan pertanian perkotaan	Perencanaan fisik lahan pertanian perkotaan yang telah dilaksanakan selama ini perlu dipertahankan, namun tidak perlu untuk ditingkatkan lagi.
	Perencanaan fisik RTH jalur pengaman jalan, median jalan dan rel kereta api	Perencanaan fisik RTH jalur pengaman jalan dan median jalan yang telah dilaksanakan selama ini perlu dipertahankan, namun tidak perlu untuk ditingkatkan lagi.
	Fungsi taman kota, taman rekreasi dan taman lingkungan yang ada di Kota Probolinggo sebagai ruang publik	Mempertahankan fungsi taman kota dan taman rekreasi sebagai ruang publik

4.5.2 Analysis Hierarchy Process (AHP)

Penilaian terhadap aspek *good governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Probolinggo selain dari persepsi masyarakat, dapat juga dari penilaian dari beberapa ahli. Analisis yang digunakan dalam menentukan tingkat kepentingan penilaian pengelolaan ruang terbuka hijau yaitu dengan metode *Analysis Hierarchy Process* (AHP). Pendekatan strategi yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sedangkan variabel yang digunakan adalah perencanaan (X1), kelembagaan (X2), sumber daya manusia (X3), koordinasi (X4) dan pendanaan (X5). Berikut ini merupakan diagram penerapan prinsip *good governance* terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Probolinggo dan tabel instansi pemerintahan yang menjadi sampel dalam studi ini.



Gambar 4. 59 Diagram Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Probolinggo

Tabel 4. 46 Sampel Instansi Pemerintah

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Aries Rachmanto, SP	Kepala Sub Bagian Keanekaragaman Hayati dan Pertamanan	Badan Lingkungan Hidup
2	Mahmudah, ST	Kepala Sub Bidang Pengembangan Perkotaan	BAPPEDA
3	Sugeng, ST	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Kademangan
4	Imam S., SE	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Mayangan
5	Drs. Awitya	Sekretaris Camat	Kecamatan Kedopok
6	Irfandi, S.Sos	Sekretaris Camat	Kecamatan Kanigaran
7	Matno, SH	Sekretaris Camat	Kecamatan Wonoasih



Langkah lebih detail untuk menentukan strategi pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* di Kota Probolinggo antara lain sebagai berikut.

4.5.2.1 Penentuan prioritas

Penentuan prioritas yang dimaksud disini adalah penilaian data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara terhadap beberapa instansi pemerintahan. Proses penilaian menggunakan suatu perbandingan berpasangan berdasarkan tingkat faktor kepentingan pada masing-masing aspek pengelolaan ruang terbuka hijau.

A. Prioritas pada variabel

Prioritas pertama yang dibahas yaitu penentuan prioritas pada lima variabel yang dinilai berdasarkan preferensi pada pemilihan perencanaan (X1), kelembagaan (X2), sumber daya manusia (X3), koordinasi (X4) dan pendanaan (X5).

1. Sudut pandang ahli pertamanan (Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo)

Pembahasan berikut adalah penilaian yang diberikan oleh ahli pertamanan terhadap variabel pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun bobot dari masing-masing variabel dalam penentuan prioritas terdapat pada tabel 4.47.

Tabel 4. 47 Penilaian terhadap Variabel dari Sudut Pandang Ahli Pertamanan BLH

Variabel	Nilai	Variabel	Nilai
X1 : X2	7 : 5	X2 : X4	7 : 7
X1 : X3	5 : 7	X2 : X5	7 : 7
X1 : X4	5 : 7	X3 : X4	7 : 7
X1 : X5	7 : 7	X3 : X5	7 : 5
X2 : X3	5 : 7	X4 : X5	5 : 7

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dihitung bobot masing-masing variabel pada tabel 4.48.

Tabel 4. 48 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas dari Sudut Pandang Ahli Pertamanan BLH

Variabel	EV	$\sum V$	VP	∞ maks	CI
X1	0,9348	5,0323	0,18605	5,07276	0,018
X2	0,8740		0,17308		
X3	1,2237		0,2412		
X4	0,9999		0,20058		
X5	0,9999		0,19909		

Berdasarkan tabel 4.48 dapat diketahui bahwa sumber daya manusia lebih diperhatikan oleh sudut pandang ahli pertamanan daripada variabel lainnya. Metode selanjutnya adalah penentuan jumlah kelas interval yang dihitung dengan menggunakan metode sturgess (Lubis, 1986). Kelas interval merupakan suatu rentang penempatan nilai variabel pengelolaan ruang terbuka hijau yang terdistribusi. Rumus metode sturgess yang digunakan yaitu

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

dengan

k = jumlah kelas interval

n = jumlah unit analisis (pilihan *good governance*)

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah kelas interval untuk distribusi nilai variabel pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* adalah

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

$$k = 1 + 3,3 \log 3$$

$$k = 2,58 \rightarrow 3 \text{ (dibulatkan)}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel pengelolaan ruang terbuka hijau yang didasarkan pada tiga prinsip *good governance* seharusnya terdistribusi pada tiga kelas interval. Panjang rentang nilai (interval) diperoleh dengan rumus

$$I = \frac{\text{jarak (nilai maksimum - nilai minimum)}}{\text{jumlah kelas interval}}$$

$$I = \frac{1,2237 - 0,8740}{3}$$

$$I = 0,1166$$

Tabel 4. 49 Tingkatan Prioritas Variabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Good Governance* dari Sudut Pandang Ahli Pertamanan BLH

No Kelas	Interval Kelas	Tingkatan	Variabel
I	0,8740 – 0,9906	1	kelembagaan (X2) dan perencanaan (X1)
II	0,9907 – 1,1073	2	Koordinasi (X4) dan pendanaan (X5)
III	1,1074 – 1,2240	3	Sumber daya manusia (X3)

Berdasarkan hasil tingkatan prioritas pada tabel 4.49 maka tingkatan variabel tertinggi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* menurut ahli pertamanan adalah sumber daya manusia (X3), sedangkan untuk tingkatan terendah adalah kelembagaan (X2) dan perencanaan (X1).

2. Sudut pandang ahli pengembangan perkotaan (Bappeda Kota Probolinggo)

Pembahasan berikut adalah penilaian yang diberikan oleh ahli pengembangan perkotaan terhadap variabel pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun bobot dari masing-masing variabel dalam penentuan prioritas terdapat pada tabel 4.50.

Tabel 4. 50 Penilaian terhadap Variabel dari Sudut Pandang Ahli Pengembangan Perkotaan Bappeda

Variabel	Nilai	Variabel	Nilai
X1 : X2	5 : 7	X2 : X4	1 : 1
X1 : X3	3 : 1	X2 : X5	1 : 1
X1 : X4	3 : 1	X3 : X4	1 : 1
X1 : X5	1 : 1	X3 : X5	7 : 5
X2 : X3	5 : 7	X4 : X5	5 : 7

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dihitung bobot masing-masing variabel pada tabel 4.51.

Tabel 4. 51 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas dari Sudut Pandang Ahli Pengembangan Perkotaan Bappeda

Variabel	EV	$\sum V$	VP	∞ maks	CI
X1	1,4507	5,1193	0,2906	5,3750	0,0897
X2	0,9999		0,1963		
X3	0,9184		0,1840		
X4	0,7504		0,1416		
X5	0,9999		0,1875		

Berdasarkan tabel 4.51 dapat diketahui bahwa perencanaan lebih diperhatikan oleh sudut pandang ahli pengembangan perkotaan daripada variabel lainnya. Jumlah kelas interval untuk distribusi nilai variabel pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* adalah

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

$$k = 1 + 3,3 \log 3$$

$$k = 2,58 \rightarrow 3 \text{ (dibulatkan)}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel pengelolaan ruang terbuka hijau yang didasarkan pada tiga prinsip *good governance* seharusnya terdistribusi pada tiga kelas interval. Panjang rentang nilai (interval) diperoleh dengan rumus

$$I = \frac{\text{jarak (nilai maksimum - nilai minimum)}}{\text{jumlah kelas interval}}$$

$$I = \frac{1,4507 - 0,7504}{3}$$

$$I = 0,2335$$

Tabel 4. 52 Tingkatan Prioritas Variabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Good Governance* dari Sudut Pandang Ahli Pengembangan Perkotaan Bappeda

No Kelas	Interval Kelas	Tingkatan	Variabel
I	0,7504 – 0,9839	1	Koordinasi (X4) dan sumber daya manusia (X3)
II	0,9840 – 1,2175	2	kelembagaan (X2) dan pendanaan (X5)
III	1,2176 – 1,4511	3	Perencanaan (X1)

Berdasarkan hasil tingkatan prioritas pada tabel 4.52 maka tingkatan variabel tertinggi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* menurut ahli pengembangan perkotaan adalah perencanaan (X1), sedangkan untuk tingkatan terendah adalah koordinasi (X4) dan sumber daya manusia (X3).

3. Sudut pandang ahli pembangunan (Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo)

Pembahasan berikut adalah penilaian yang diberikan oleh ahli pembangunan Kecamatan Kademangan terhadap variabel pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun bobot dari masing-masing variabel dalam penentuan prioritas terdapat pada tabel 4.53.

Tabel 4. 53 Penilaian terhadap Variabel dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kademangan

Variabel	Nilai	Variabel	Nilai
X1 : X2	9 : 1	X2 : X4	1 : 5
X1 : X3	1 : 1	X2 : X5	1 : 9
X1 : X4	7 : 1	X3 : X4	1 : 1
X1 : X5	1 : 1	X3 : X5	1 : 1
X2 : X3	1 : 5	X4 : X5	1 : 3

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dihitung bobot masing-masing variabel pada tabel 4.54.

Tabel 4. 54 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kademangan

Variabel	EV	$\sum V$	VP	∞ maks	CI
X1	2,2902	6,5717	0,3440	5,4953	0,0927
X2	0,2181		0,0330		
X3	1,3797		0,2180		
X4	0,7505		0,1266		
X5	1,9332		0,2784		

Berdasarkan tabel 4.54 dapat diketahui bahwa perencanaan dan pendanaan lebih diperhatikan oleh sudut pandang ahli pembangunan daripada variabel lainnya. Jumlah kelas interval untuk distribusi nilai variabel pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* adalah

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

$$k = 1 + 3,3 \log 3$$

$$k = 2,58 \rightarrow 3 \text{ (dibulatkan)}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel pengelolaan ruang terbuka hijau yang didasarkan pada tiga prinsip *good governance* seharusnya terdistribusi pada tiga kelas interval. Panjang rentang nilai (interval) diperoleh dengan rumus

$$I = \frac{\text{jarak (nilai maksimum – nilai minimum)}}{\text{jumlah kelas interval}}$$

$$I = \frac{2,2902 - 0,2181}{3}$$

$$I = 0,6907$$

Tabel 4. 55 Tingkatan Prioritas Variabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Good Governance* dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kademangan

No Kelas	Interval Kelas	Tingkatan	Variabel
I	0,2181 – 0,9088	1	kelembagaan (X2) dan koordinasi (X4)
II	0,9089 – 1,5996	2	Sumber daya manusia (X3)
III	1,5997 – 2,2904	3	Perencanaan (X1) dan pendanaan (X5)

Berdasarkan hasil tingkatan prioritas pada tabel 4.55 maka tingkatan variabel tertinggi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* menurut ahli pembangunan adalah perencanaan (X1) dan pendanaan (X5), sedangkan untuk tingkatan terendah adalah kelembagaan (X2) dan koordinasi (X4).

4. Sudut pandang ahli pembangunan (Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo)

Pembahasan berikut adalah penilaian yang diberikan oleh ahli pembangunan Kecamatan Mayangan terhadap variabel pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun bobot dari masing-masing variabel dalam penentuan prioritas terdapat pada tabel 4.56.

Tabel 4. 56 Penilaian terhadap Variabel dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Mayangan

Variabel	Nilai	Variabel	Nilai
X1 : X2	1 : 7	X2 : X4	7 : 1
X1 : X3	1 : 7	X2 : X5	1 : 1
X1 : X4	1 : 1	X3 : X4	3 : 1
X1 : X5	1 : 7	X3 : X5	1 : 7
X2 : X3	5 : 1	X4 : X5	1 : 1

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dihitung bobot masing-masing variabel pada tabel 4.57.

Tabel 4. 57 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Mayangan

Variabel	EV	$\sum V$	VP	∞ maks	CI
X1	0,3113	7,9495	0,0438	5,0728	0,0980
X2	3,0049		0,3656		
X3	0,9031		0,1323		
X4	0,3504		0,0439		
X5	3,3798		0,4144		

Berdasarkan tabel 4.57 dapat diketahui bahwa kelembagaan dan pendanaan lebih diperhatikan oleh sudut pandang ahli pembangunan daripada variabel lainnya. Jumlah kelas interval untuk distribusi nilai variabel pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* adalah

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

$$k = 1 + 3,3 \log 3$$

$$k = 2,58 \rightarrow 3 \text{ (dibulatkan)}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel pengelolaan ruang terbuka hijau yang didasarkan pada tiga prinsip *good governance* seharusnya terdistribusi pada tiga kelas interval. Panjang rentang nilai (interval) diperoleh dengan rumus

$$I = \frac{\text{jarak (nilai maksimum - nilai minimum)}}{\text{jumlah kelas interval}}$$

$$I = \frac{3,3798 - 0,3113}{3}$$

$$I = 1,0229$$

Tabel 4. 58 Tingkatan Prioritas Variabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Good Governance dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Mayangan

No Kelas	Interval Kelas	Tingkatan	Variabel
I	0,3113 – 1,3342	1	Perencanaan (X1), koordinasi (X4) dan sumber daya manusia (X3)
II	1,3343 – 2,3572	2	-
III	2,3573 – 3,3802	3	kelembagaan (X2) dan pendanaan (X5)

Berdasarkan hasil tingkatan prioritas pada tabel 4.58 maka tingkatan variabel tertinggi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* menurut ahli pembangunan adalah kelembagaan (X2) dan pendanaan (X5), sedangkan untuk tingkatan terendah adalah perencanaan (X1), koordinasi (X4) dan sumber daya manusia (X3).

5. Sudut pandang ahli pembangunan (Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo)

Pembahasan berikut adalah penilaian yang diberikan oleh ahli pembangunan Kecamatan Kedopok terhadap variabel pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun bobot dari masing-masing variabel dalam penentuan prioritas terdapat pada tabel 4.59.

Tabel 4. 59 Penilaian terhadap Variabel dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kedopok

Variabel	Nilai	Variabel	Nilai
X1 : X2	1 : 5	X2 : X4	1 : 1
X1 : X3	1 : 5	X2 : X5	5 : 1
X1 : X4	1 : 5	X3 : X4	1 : 1
X1 : X5	1 : 1	X3 : X5	5 : 1
X2 : X3	1 : 1	X4 : X5	1 : 1

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dihitung bobot masing-masing variabel pada tabel 4.60.

Tabel 4. 60 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kedopok

Variabel	EV	$\sum V$	VP	∞ maks	CI
X1	0,3807	6,0929	0,0602	5,0728	0,0870
X2	1,9036		0,3010		
X3	1,9036		0,3010		
X4	1,3797		0,2395		
X5	0,5253		0,0983		

Berdasarkan tabel 4.60 dapat diketahui bahwa kelembagaan dan sumber daya manusia lebih diperhatikan oleh sudut pandang ahli pembangunan daripada variabel lainnya. Jumlah kelas interval untuk distribusi nilai variabel pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* adalah

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

$$k = 1 + 3,3 \log 3$$

$$k = 2,58 \rightarrow 3 \text{ (dibulatkan)}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel pengelolaan ruang terbuka hijau yang didasarkan pada tiga prinsip *good governance* seharusnya terdistribusi pada tiga kelas interval. Panjang rentang nilai (interval) diperoleh dengan rumus

$$I = \frac{\text{jarak (nilai maksimum - nilai minimum)}}{\text{jumlah kelas interval}}$$

$$I = \frac{1,9036 - 0,3807}{3}$$

$$I = 0,5077$$

Tabel 4. 61 Tingkatan Prioritas Variabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Good Governance* dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kedopok

No Kelas	Interval Kelas	Tingkatan	Variabel
I	0,3807 – 0,8884	1	Perencanaan (X1) dan pendanaan (X5)
II	0,8885 – 1,3962	2	Koordinasi (X4)
III	1,3963 – 1,9040	3	Kelembagaan (X2) dan sumber daya manusia (X3)

Berdasarkan hasil tingkatan prioritas pada tabel 4.61 maka tingkatan variabel tertinggi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* menurut ahli pembangunan adalah kelembagaan (X2) dan sumber daya manusia (X3), sedangkan untuk tingkatan terendah adalah perencanaan (X1) dan pendanaan (X5).

6. Sudut pandang ahli pembangunan (Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo)

Pembahasan berikut adalah penilaian yang diberikan oleh ahli pembangunan Kecamatan Kanigaran terhadap variabel pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun bobot dari masing-masing variabel dalam penentuan prioritas terdapat pada tabel 4.62.

Tabel 4. 62 Penilaian terhadap Variabel dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kanigaran

Variabel	Nilai	Variabel	Nilai
X1 : X2	9 : 1	X2 : X4	1 : 7
X1 : X3	1 : 1	X2 : X5	1 : 1
X1 : X4	5 : 1	X3 : X4	7 : 1
X1 : X5	5 : 1	X3 : X5	9 : 1
X2 : X3	1 : 9	X4 : X5	3 : 1

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dihitung bobot masing-masing variabel pada tabel 4.63.

Tabel 4. 63 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kanigaran

Variabel	EV	$\sum V$	VP	∞ maks	CI
X1	2,9542	8,0674	0,3577	5,5659	0,0890
X2	0,2813		0,0383		
X3	3,5540		0,4295		
X4	0,9031		0,1263		
X5	0,3748		0,0482		

Berdasarkan tabel 4.63 dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dan perencanaan lebih diperhatikan oleh sudut pandang ahli pembangunan daripada variabel lainnya. Jumlah kelas interval untuk distribusi nilai variabel pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* adalah

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

$$k = 1 + 3,3 \log 3$$

$$k = 2,58 \rightarrow 3 \text{ (dibulatkan)}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel pengelolaan ruang terbuka hijau yang didasarkan pada tiga prinsip *good governance* seharusnya terdistribusi pada tiga kelas interval. Panjang rentang nilai (interval) diperoleh dengan rumus

$$I = \frac{\text{jarak (nilai maksimum - nilai minimum)}}{\text{jumlah kelas interval}}$$

$$I = \frac{3,5540 - 0,2813}{3}$$

$$I = 1,0909$$

Tabel 4. 64 Tingkatan Prioritas Variabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Good Governance dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kanigaran

No Kelas	Interval Kelas	Tingkatan	Variabel
I	0,2813 – 1,3722	1	Kelembagaan (X2), pendanaan (X5) dan koordinasi (X4)
II	1,3723 – 2,4632	2	-
III	2,4633 – 3,5542	3	Perencanaan (X1) dan sumber daya manusia (X3)

Berdasarkan hasil tingkatan prioritas pada tabel 4.64 maka tingkatan variabel tertinggi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* menurut ahli pembangunan adalah perencanaan (X1) dan sumber daya manusia (X3), sedangkan untuk tingkatan terendah adalah kelembagaan (X2), pendanaan (X5) dan koordinasi (X4).

7. Sudut pandang ahli pembangunan (Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)

Pembahasan berikut adalah penilaian yang diberikan oleh ahli pembangunan Kecamatan Wonoasih terhadap variabel pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun bobot dari masing-masing variabel dalam penentuan prioritas terdapat pada tabel 4.65.

Tabel 4. 65 Penilaian terhadap Variabel dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Wonoasih

Variabel	Nilai	Variabel	Nilai
X1 : X2	1 : 7	X2 : X4	1 : 5
X1 : X3	1 : 3	X2 : X5	1 : 1
X1 : X4	1 : 1	X3 : X4	1 : 3
X1 : X5	3 : 1	X3 : X5	1 : 3
X2 : X3	5 : 1	X4 : X5	1 : 1

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dihitung bobot masing-masing variabel pada tabel 4.66.

Tabel 4. 66 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Wonoasih

Variabel	EV	$\sum V$	VP	∞ maks	CI
X1	0,6776	5,4536	0,1769	7,4498	0,5952
X2	1,4758		0,2647		
X3	0,5816		0,0997		
X4	1,7188		0,2892		
X5	0,9998		0,1695		

Nilai indeks konsistensi pada perhitungan di atas melebihi 0,1, artinya penilaian yang diberikan oleh ahli pembangunan Kecamatan Wonoasih terhadap variabel pengelolaan ruang terbuka hijau tidak konsisten dan analisis tidak dapat dilanjutkan.

B. Prioritas pada alternatif

Prioritas yang dibahas selanjutnya yaitu penentuan prioritas pada tiga prinsip *good governance* pada pengelolaan ruang terbuka hijau, ketiga alternatif tersebut antara lain transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

1. Sudut pandang ahli pertamanan (Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo)

Pembahasan berikut adalah penilaian yang diberikan oleh ahli pertamanan terhadap strategi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan prinsip *good governance*. Adapun bobot dari masing-masing strategi dalam penentuan prioritas terdapat pada tabel 4.67.

Tabel 4. 67 Penilaian terhadap Strategi dari Sudut Pandang Ahli Pertamanan BLH

Variabel	Strategi	Nilai
Perencanaan (X1)	Transparansi : Akuntabilitas	1 : 1
	Transparansi : Partisipasi	3 : 7
	Akuntabilitas : Partisipasi	3 : 7
Kelembagaan (X2)	Transparansi : Akuntabilitas	1 : 1
	Transparansi : Partisipasi	7 : 3
	Akuntabilitas : Partisipasi	7 : 5
Sumber Daya Manusia (X3)	Transparansi : Akuntabilitas	5 : 7
	Transparansi : Partisipasi	3 : 7
	Akuntabilitas : Partisipasi	3 : 7

Variabel	Strategi	Nilai
Koordinasi (X4)	Transparansi : Akuntabilitas	1 : 1
	Transparansi : Partisipasi	7 : 3
	Akuntabilitas : Partisipasi	7 : 3
Pendanaan (X5)	Transparansi : Akuntabilitas	9 : 5
	Transparansi : Partisipasi	9 : 3
	Akuntabilitas : Partisipasi	7 : 5

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dihitung bobot masing-masing strategi pada tabel 4.68.

Tabel 4. 68 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas Tiap Variabel dari Sudut Pandang Ahli Pertamanan BLH

Variabel	Strategi	EV	$\sum V$	VP	∞ maks	CI
X1	Transparansi	0,7540	3,2672	0,2308	3,0000	0,0000
	Akuntabilitas	0,7540		0,2308		
	Partisipasi	1,7592		0,5385		
X2	Transparansi	1,3264	3,1191	0,4244	3,0311	0,0146
	Akuntabilitas	1,1187		0,3587		
	Partisipasi	0,6740		0,2170		
X3	Transparansi	0,6740	3,2767	0,2062	3,0150	0,0063
	Akuntabilitas	0,8435		0,2579		
	Partisipasi	1,7592		0,5360		
X4	Transparansi	1,3263	3,8597	0,4118	3,0000	0,0000
	Akuntabilitas	1,3263		0,4118		
	Partisipasi	1,2071		0,1765		
X5	Transparansi	1,7544	3,2939	0,5324	3,0040	0,0017
	Akuntabilitas	0,9197		0,2793		
	Partisipasi	0,6198		0,1883		

Berdasarkan tabel 4.68 dapat diketahui bahwa partisipasi lebih diperhatikan oleh sudut pandang ahli pertamanan pada variabel perencanaan (X1), transparansi pada variabel kelembagaan (X2), partisipasi pada variabel sumber daya manusia (X3), transparansi dan akuntabilitas pada variabel koordinasi (X4) serta transparansi pada variabel pendanaan (X5).

Tabel 4. 69 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas dari Sudut Pandang Ahli Pertamanan BLH

Kriteria	Bobot	Transparansi	Akuntabilitas	Partisipasi
Perencanaan	0,19	0,23	0,23	0,54
Kelembagaan	0,17	0,42	0,36	0,22
SDM	0,24	0,21	0,26	0,54
Koordinasi	0,20	0,41	0,41	0,18
Pendanaan	0,20	0,53	0,28	0,19
Bobot Rating		1,08	0,80	1,17

Berdasarkan tabel 4.69 diketahui bahwa prinsip *good governance* yang dipilih oleh ahli pertamanan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo adalah partisipasi.

2. Sudut pandang ahli pengembangan perkotaan (Bappeda Kota Probolinggo)

Pembahasan berikut adalah penilaian yang diberikan oleh ahli pengembangan perkotaan terhadap strategi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan prinsip *good governance*. Adapun bobot dari masing-masing strategi dalam penentuan prioritas terdapat pada tabel 4.70.

Tabel 4. 70 Penilaian terhadap Strategi dari Sudut Pandang Ahli Pengembangan Perkotaan Bappeda

Variabel	Strategi	Nilai
Perencanaan (X1)	Transparansi : Akuntabilitas	5 : 7
	Transparansi : Partisipasi	5 : 3
	Akuntabilitas : Partisipasi	3 : 1
Kelembagaan (X2)	Transparansi : Akuntabilitas	7 : 5
	Transparansi : Partisipasi	7 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	7 : 3
Sumber Daya Manusia (X3)	Transparansi : Akuntabilitas	5 : 9
	Transparansi : Partisipasi	3 : 7
	Akuntabilitas : Partisipasi	3 : 5
Koordinasi (X4)	Transparansi : Akuntabilitas	7 : 5
	Transparansi : Partisipasi	7 : 3
	Akuntabilitas : Partisipasi	3 : 1
Pendanaan (X5)	Transparansi : Akuntabilitas	7 : 3
	Transparansi : Partisipasi	7 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	7 : 5

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dihitung bobot masing-masing strategi pada tabel 4.71.

Tabel 4. 71 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas Tiap Variabel dari Sudut Pandang Ahli Pengembangan Perkotaan Bappeda

Variabel	Strategi	EV	$\sum V$	VP	∞ maks	CI
X1	Transparansi	1,0599	3,2581	0,3254	3,0081	0,0035
	Akuntabilitas	1,6134		0,4948		
	Partisipasi	0,5848		0,1797		
X2	Transparansi	2,1400	3,7198	0,5703	3,0883	0,0328
	Akuntabilitas	1,1856		0,3213		
	Partisipasi	0,3942		0,1084		
X3	Transparansi	0,6198	3,2184	0,1928	3,0080	0,0035
	Akuntabilitas	1,0260		0,3189		
	Partisipasi	1,5726		0,4882		
X4	Transparansi	1,4838	3,2958	0,4491	3,0440	0,0193
	Akuntabilitas	1,2892		0,3910		
	Partisipasi	0,5228		0,1599		
X5	Transparansi	2,5372	3,8477	0,6525	3,0982	0,0326
	Akuntabilitas	0,8435		0,2229		
	Partisipasi	0,4670		0,1245		

Berdasarkan tabel 4.71 dapat diketahui bahwa akuntabilitas lebih diperhatikan oleh sudut pandang ahli pengembangan perkotaan pada variabel perencanaan (X1), transparansi pada variabel kelembagaan (X2), partisipasi pada variabel sumber daya manusia (X3), transparansi pada variabel koordinasi (X4) serta transparansi pada variabel pendanaan (X5).

Tabel 4. 72 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas dari Sudut Pandang Pengembangan Perkotaan Bappeda

Kriteria	Bobot	Transparansi	Akuntabilitas	Partisipasi
Perencanaan	0,29	0,32	0,49	0,18
Kelembagaan	0,20	0,57	0,32	0,11
SDM	0,18	0,19	0,32	0,49
Koordinasi	0,14	0,45	0,39	0,16
Pendanaan	0,19	0,65	0,22	0,12
Bobot Rating		1,514	1,006	0,694

Berdasarkan tabel 4.72 diketahui bahwa prinsip *good governance* yang dipilih oleh ahli pengembangan perkotaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo adalah transparansi.

3. Sudut pandang ahli pembangunan (Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo)

Pembahasan berikut adalah penilaian yang diberikan oleh ahli pembangunan Kecamatan Kademangan terhadap strategi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan prinsip *good governance*. Adapun bobot dari masing-masing strategi dalam penentuan prioritas terdapat pada tabel 4.73.

Tabel 4. 73 Penilaian terhadap Strategi dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kademangan

Variabel	Strategi	Nilai
Perencanaan (X1)	Transparansi : Akuntabilitas	5 : 1
	Transparansi : Partisipasi	5 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	1 : 3
Kelembagaan (X2)	Transparansi : Akuntabilitas	1 : 1
	Transparansi : Partisipasi	3 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	5 : 1
Sumber Daya Manusia (X3)	Transparansi : Akuntabilitas	1 : 3
	Transparansi : Partisipasi	1 : 7
	Akuntabilitas : Partisipasi	1 : 1
Koordinasi (X4)	Transparansi : Akuntabilitas	3 : 1
	Transparansi : Partisipasi	1 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	1 : 1
Pendanaan (X5)	Transparansi : Akuntabilitas	7 : 1
	Transparansi : Partisipasi	7 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	3 : 1

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dihitung bobot masing-masing strategi pada tabel 4.74.

Tabel 4. 74 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas Tiap Variabel dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kademangan

Variabel	Strategi	EV	$\sum V$	VP	∞ maks	CI
X1	Transparansi	2,9240	4,1729	0,6864	3,2194	0,0695
	Akuntabilitas	0,4055		0,1022		
	Partisipasi	0,8434		0,2114		
X2	Transparansi	1,4422	3,5577	0,4055	3,0357	0,0145
	Akuntabilitas	1,7100		0,4796		
	Partisipasi	0,4055		0,1150		
X3	Transparansi	0,3625	3,7176	0,1001	3,1040	0,0405
	Akuntabilitas	1,4422		0,3893		
	Partisipasi	1,9129		0,5105		

Variabel	Strategi	EV	ΣV	VP	∞ maks	CI
X4	Transparansi	1,4422	3,1355	0,4540	3,1481	0,0681
	Akuntabilitas	0,6933		0,2254		
	Partisipasi	1,0000		0,3206		
X5	Transparansi	3,6593	4,7758	0,7514	3,2532	0,0702
	Akuntabilitas	0,7540		0,1680		
	Partisipasi	0,3625		0,0807		

Berdasarkan tabel 4.74 dapat diketahui bahwa transparansi lebih diperhatikan oleh sudut pandang ahli pembangunan pada variabel perencanaan (X1), akuntabilitas pada variabel kelembagaan (X2), partisipasi pada variabel sumber daya manusia (X3), transparansi pada variabel koordinasi (X4) serta transparansi pada variabel pendanaan (X5).

Tabel 4. 75 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kademangan

Kriteria	Bobot	Transparansi	Akuntabilitas	Partisipasi
Perencanaan	0,34	0,69	0,10	0,21
Kelembagaan	0,03	0,41	0,48	0,11
SDM	0,22	0,10	0,39	0,51
Koordinasi	0,13	0,45	0,23	0,32
Pendanaan	0,28	0,75	0,16	0,08
Bobot Rating		1,96	0,68	0,78

Berdasarkan tabel 4.75 diketahui bahwa prinsip *good governance* yang dipilih oleh ahli pembangunan Kecamatan Kademangan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo adalah transparansi.

4. Sudut pandang ahli pembangunan (Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo)

Pembahasan berikut adalah penilaian yang diberikan oleh ahli pembangunan Kecamatan Mayangan terhadap strategi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan prinsip *good governance*. Adapun bobot dari masing-masing strategi dalam penentuan prioritas terdapat pada tabel 4.76.

Tabel 4. 76 Penilaian terhadap Strategi dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Mayangan

Variabel	Strategi	Nilai
Perencanaan (X1)	Transparansi : Akuntabilitas	1 : 1
	Transparansi : Partisipasi	1 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	1 : 1
Kelembagaan (X2)	Transparansi : Akuntabilitas	7 : 1
	Transparansi : Partisipasi	7 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	3 : 1
Sumber Daya Manusia (X3)	Transparansi : Akuntabilitas	1 : 5
	Transparansi : Partisipasi	1 : 7
	Akuntabilitas : Partisipasi	1 : 3
Koordinasi (X4)	Transparansi : Akuntabilitas	3 : 1
	Transparansi : Partisipasi	1 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	1 : 1
Pendanaan (X5)	Transparansi : Akuntabilitas	9 : 1
	Transparansi : Partisipasi	9 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	3 : 1

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dihitung bobot masing-masing strategi pada tabel 4.77.

Tabel 4. 77 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas Tiap Variabel dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Mayangan

Variabel	Strategi	EV	$\sum V$	VP	∞ maks	CI
X1	Transparansi	1,0000	3,0000	0,3333	3,0000	0,0000
	Akuntabilitas	1,0000		0,3333		
	Partisipasi	1,0000		0,3333		
X2	Transparansi	3,6593	4,7758	0,7514	3,2532	0,0702
	Akuntabilitas	0,7540		0,1680		
	Partisipasi	0,3625		0,0807		
X3	Transparansi	0,3057	4,2502	0,0738	3,0968	0,0328
	Akuntabilitas	1,1856		0,2828		
	Partisipasi	2,7589		0,6434		
X4	Transparansi	1,4422	3,1355	0,4540	3,1481	0,0680
	Akuntabilitas	0,6933		0,2254		
	Partisipasi	1,0000		0,3206		
X5	Transparansi	4,3267	5,3533	0,7938	3,2785	0,0706
	Akuntabilitas	0,6933		0,1395		
	Partisipasi	0,3333		0,0667		

Berdasarkan tabel 4.77 dapat diketahui bahwa semua strategi pada variabel perencanaan (X1) diperhatikan oleh sudut pandang ahli pembangunan, sedangkan transparansi pada variabel kelembagaan (X2), partisipasi pada variabel sumber daya manusia (X3), transparansi pada variabel koordinasi (X4) serta transparansi pada variabel pendanaan (X5).

Tabel 4. 78 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Mayangan

Kriteria	Bobot	Transparansi	Akuntabilitas	Partisipasi
Perencanaan	0,04	0,33	0,33	0,33
Kelembagaan	0,37	0,75	0,17	0,08
SDM	0,13	0,07	0,28	0,64
Koordinasi	0,04	0,45	0,23	0,32
Pendanaan	0,41	0,79	0,14	0,07
Bobot Rating		2,15	0,47	1,02

Berdasarkan tabel 4.78 diketahui bahwa prinsip *good governance* yang dipilih oleh ahli pembangunan Kecamatan Mayangan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo adalah transparansi.

5. Sudut pandang ahli pembangunan (Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo)

Pembahasan berikut adalah penilaian yang diberikan oleh ahli pembangunan Kecamatan Kedopok terhadap strategi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan prinsip *good governance*. Adapun bobot dari masing-masing strategi dalam penentuan prioritas terdapat pada tabel 4.79.

Tabel 4. 79 Penilaian terhadap Strategi dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kedopok

Variabel	Strategi	Nilai
Perencanaan (X1)	Transparansi : Akuntabilitas	1 : 7
	Transparansi : Partisipasi	3 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	7 : 1
Kelembagaan (X2)	Transparansi : Akuntabilitas	7 : 1
	Transparansi : Partisipasi	7 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	3 : 1
Sumber Daya Manusia (X3)	Transparansi : Akuntabilitas	7 : 1
	Transparansi : Partisipasi	7 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	1 : 3
Koordinasi (X4)	Transparansi : Akuntabilitas	9 : 1
	Transparansi : Partisipasi	7 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	1 : 3
Pendanaan (X5)	Transparansi : Akuntabilitas	5 : 1
	Transparansi : Partisipasi	9 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	3 : 1

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dihitung bobot masing-masing strategi pada tabel 4.80.

Tabel 4. 80 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas Tiap Variabel dari Sudut Pandang Ahli Kecamatan Kedopok

Variabel	Strategi	EV	$\sum V$	VP	∞ maks	CI
X1	Transparansi	0,7540	4,7758	0,1680	3,2532	0,0702
	Akuntabilitas	3,6593		0,7514		
	Partisipasi	0,3625		0,0807		
X2	Transparansi	3,6593	4,7758	0,7514	3,2532	0,0702
	Akuntabilitas	0,7540		0,1680		
	Partisipasi	0,3625		0,0807		
X3	Transparansi	3,6593	4,7758	0,7514	3,2532	0,0702
	Akuntabilitas	0,3625		0,0807		
	Partisipasi	0,7540		0,1680		
X4	Transparansi	3,9791	5,0664	0,7766	3,1553	0,0411
	Akuntabilitas	0,3333		0,0685		
	Partisipasi	0,7540		0,1549		
X5	Transparansi	3,5569	4,7336	0,7482	3,0520	0,0146
	Akuntabilitas	0,8434		0,1804		
	Partisipasi	0,3333		0,0714		

Berdasarkan tabel 4.80 dapat diketahui bahwa akuntabilitas lebih diperhatikan oleh sudut pandang ahli pembangunan pada variabel perencanaan (X1), transparansi pada variabel kelembagaan (X2), sumber daya manusia (X3), koordinasi (X4) serta pendanaan (X5).

Tabel 4. 81 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas dari Sudut Pandang Ahli Kecamatan Kedopok

Kriteria	Bobot	Transparansi	Akuntabilitas	Partisipasi
Perencanaan	0,06	0,17	0,75	0,08
Kelembagaan	0,30	0,75	0,17	0,08
SDM	0,30	0,75	0,08	0,17
Koordinasi	0,24	0,78	0,07	0,15
Pendanaan	0,10	0,75	0,18	0,07
Bobot Rating		3,05	0,79	0,18

Berdasarkan tabel 4.81 diketahui bahwa prinsip *good governance* yang dipilih oleh ahli pembangunan Kecamatan Kedopok dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo adalah transparansi.

6. Sudut pandang ahli pembangunan (Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo)

Pembahasan berikut adalah penilaian yang diberikan oleh ahli pembangunan Kecamatan Kanigaran terhadap strategi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan prinsip *good governance*. Adapun bobot dari masing-masing strategi dalam penentuan prioritas terdapat pada tabel 4.82.

Tabel 4. 82 Penilaian terhadap Strategi dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kanigaran

Variabel	Strategi	Nilai
Perencanaan (X1)	Transparansi : Akuntabilitas	3 : 1
	Transparansi : Partisipasi	1 : 5
	Akuntabilitas : Partisipasi	1 : 7
Kelembagaan (X2)	Transparansi : Akuntabilitas	1 : 7
	Transparansi : Partisipasi	3 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	7 : 1
Sumber Daya Manusia (X3)	Transparansi : Akuntabilitas	1 : 5
	Transparansi : Partisipasi	1 : 3
	Akuntabilitas : Partisipasi	5 : 1
Koordinasi (X4)	Transparansi : Akuntabilitas	7 : 1
	Transparansi : Partisipasi	7 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	1 : 1
Pendanaan (X5)	Transparansi : Akuntabilitas	7 : 1
	Transparansi : Partisipasi	7 : 1
	Akuntabilitas : Partisipasi	3 : 1

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dihitung bobot masing-masing strategi pada tabel 4.83.

Tabel 4. 83 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas Tiap Variabel dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kanigaran

Variabel	Strategi	EV	$\sum V$	VP	∞ maks	CI
X1	Transparansi	0,8434	4,4770	0,1932	3,1116	0,0330
	Akuntabilitas	0,3625		0,0833		
	Partisipasi	3,2711		0,7235		
X2	Transparansi	0,7535	4,7750	0,1679	3,2517	0,0695
	Akuntabilitas	3,6593		0,7515		
	Partisipasi	0,3622		0,0806		
X3	Transparansi	0,4055	4,1729	0,1022	3,2194	0,0695
	Akuntabilitas	2,9240		0,6864		
	Partisipasi	0,8434		0,2114		
X4	Transparansi	3,6593	4,7049	0,7778	3,0002	0,0001
	Akuntabilitas	0,5228		0,1111		
	Partisipasi	0,5228		0,1111		
X5	Transparansi	3,6593	4,7758	0,7514	3,2532	0,0702
	Akuntabilitas	0,7540		0,1680		
	Partisipasi	0,3625		0,0807		

Berdasarkan tabel 4.83 dapat diketahui bahwa partisipasi lebih diperhatikan oleh sudut pandang ahli pembangunan pada variabel perencanaan (X1), akuntabilitas pada variabel kelembagaan (X2), akuntabilitas pada variabel sumber daya manusia (X3), transparansi pada variabel koordinasi (X4) serta transparansi pada variabel pendanaan (X5).

Tabel 4. 84 Hasil Perhitungan Penentuan Prioritas dari Sudut Pandang Ahli Pembangunan Kecamatan Kanigaran

Kriteria	Bobot	Transparansi	Akuntabilitas	Partisipasi
Perencanaan	0,36	0,19	0,08	0,72
Kelembagaan	0,04	0,17	0,75	0,08
SDM	0,43	0,10	0,69	0,21
Koordinasi	0,13	0,78	0,11	0,11
Pendanaan	0,05	0,75	0,17	0,08
Bobot Rating		1,50	1,46	0,88

Berdasarkan tabel 4.84 diketahui bahwa prinsip *good governance* yang dipilih oleh ahli pembangunan Kecamatan Kanigaran dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo adalah transparansi.

4.5.2.2 Model prioritas

Model prioritas yang dibahas berkaitan dengan model prioritas pada variabel dan alternatif pilihan prinsip *good governance* yang sesuai diterapkan di Kota Probolinggo. Model prioritas yang dihitung merupakan penggabungan nilai sudut pandang dari semua pernyataan ahli.

A. Model prioritas bobot variabel

Setelah diketahui bobot variabel pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* dari sudut pandang para ahli, maka untuk menentukan jenis variabel paling penting untuk diterapkan di Kota Probolinggo adalah dengan cara menggabungkan bobot variabel pengelolaan ruang terbuka hijau dari semua sudut pandang. Hasil perhitungan prioritas/ bobot lima variabel yang telah dihitung dengan mendapatkan model prioritas variabel yang paling mempengaruhi pemilihan cara pengelolaan ruang terbuka hijau yang akan diarahkan. Adapun penjelasan bobot nilai terdapat pada tabel 4.85.

Tabel 4. 85 Jumlah Bobot Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis *Good Governance* di Kota Probolinggo

Variabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Bobot masing-masing sudut pandang						Total bobot	Bobot rata-rata
	P1	P2	P3	P4	P5	P6		
Perencanaan (X1)	0,186	0,291	0,344	0,044	0,060	0,358	1,282	0,214
Kelembagaan (X2)	0,173	0,196	0,033	0,366	0,301	0,038	1,107	0,185
Sumber Daya Manusia (X3)	0,241	0,184	0,218	0,132	0,301	0,430	1,506	0,251
Koordinasi (X4)	0,201	0,142	0,127	0,044	0,239	0,126	0,878	0,146
Pendanaan (X5)	0,199	0,187	0,278	0,414	0,098	0,048	1,226	0,204

Keterangan

P1 = Ahli Pertamanan BLH

P2 = Ahli Perencanaan Fisik Bappeda

P3 = Ahli Pembangunan Kecamatan Kademangan

P4 = Ahli Pembangunan Kecamatan Mayangan

P5 = Ahli Pembangunan Kecamatan Kedopok

P6 = Ahli Pembangunan Kecamatan Kanigaran

Penentuan kelas yaitu sebagai berikut:

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

$$k = 1 + 3,3 \log 3$$

$$k = 2,58 \rightarrow 3 \text{ (dibulatkan)}$$

$$I = \frac{\text{jarak (nilai maksimum - nilai minimum)}}{\text{jumlah kelas interval}}$$

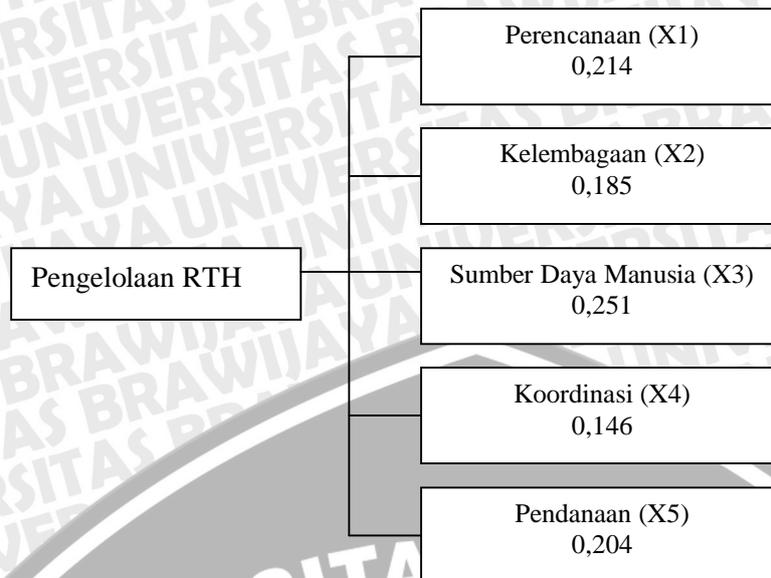
$$I = \frac{0,251 - 0,146}{3}$$

$$I = 0,035$$

Tabel 4. 86 Tingkatan Prioritas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dari Semua Sudut Pandang

No Kelas	Interval Kelas	Tingkatan	Variabel
I	0,146 – 0,181	1	Koordinasi (X4)
II	0,182 – 0,217	2	Kelembagaan (X2), Pendanaan (X5) dan Perencanaan (X1)
III	0,218 – 0,253	3	Sumber daya manusia (X3)

Berdasarkan tabel 4.86, maka variabel yang memiliki prioritas utama yaitu aspek sumber daya manusia (X3) kemudian pada tingkatan prioritas selanjutnya adalah kelembagaan (X4), pendanaan (X5) dan perencanaan (X1).



Gambar 4. 60 Bagan Hirarki Aspek Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

B. Model prioritas bobot alternatif

Bobot alternatif pilihan prinsip *good governance* di Kota Probolinggo dapat ditentukan dengan cara menggabungkan bobot pilihan pengelolaan ruang terbuka hijau dari semua sudut pandang berdasarkan variabel yang dipilih. Hasil perhitungan prioritas/ bobot lima variabel yang telah dihitung dengan mendapatkan model prioritas variabel yang paling mempengaruhi pemilihan prinsip *good governance* yang akan diarahkan. Adapun penjelasan bobot nilai terdapat pada tabel 4.87.

Tabel 4. 87 Pemilihan Prioritas Alternatif *Good Governance* pada Setiap Variabel dari Semua Sudut Pandang

Variabel Pengelolaan	Konsep <i>Good Governance</i>	Bobot masing-masing sudut pandang						Total bobot	Bobot rata-rata
		P1	P2	P3	P4	P5	P6		
Perencanaan	Transparansi	0,23	0,32	0,69	0,33	0,17	0,19	1,93	0,32
	Akuntabilitas	0,23	0,49	0,10	0,33	0,75	0,08	1,98	0,33
	Partisipasi	0,54	0,18	0,21	0,33	0,08	0,72	2,06	0,34
Kelembagaan	Transparansi	0,42	0,57	0,41	0,75	0,75	0,17	3,07	0,51
	Akuntabilitas	0,36	0,32	0,48	0,17	0,17	0,75	2,25	0,38
	Partisipasi	0,22	0,11	0,11	0,08	0,08	0,08	0,68	0,11
Sumber Daya Manusia	Transparansi	0,21	0,19	0,10	0,07	0,75	0,10	1,42	0,24
	Akuntabilitas	0,26	0,32	0,39	0,28	0,08	0,69	2,02	0,34
	Partisipasi	0,54	0,49	0,51	0,64	0,17	0,21	2,56	0,43
Koordinasi	Transparansi	0,41	0,45	0,45	0,45	0,78	0,78	3,32	0,55
	Akuntabilitas	0,41	0,39	0,23	0,23	0,07	0,11	1,44	0,24
	Partisipasi	0,18	0,16	0,32	0,32	0,15	0,11	1,24	0,21
Pendanaan	Transparansi	0,53	0,65	0,75	0,79	0,75	0,75	4,22	0,70
	Akuntabilitas	0,28	0,22	0,16	0,14	0,18	0,17	1,15	0,19
	Partisipasi	0,19	0,12	0,08	0,07	0,07	0,08	0,61	0,10

Tabel 4. 88 Pemilihan Prioritas Alternatif *Good Governance* dari Semua Sudut Pandang

Konsep <i>Good Governance</i>	Bobot masing-masing sudut pandang						Total bobot	Bobot rata-rata
	P1	P2	P3	P4	P5	P6		
Transparansi	1,076	2,292	1,958	2,148	3,047	1,498	12,019	2,003
Akuntabilitas	0,802	2,426	0,680	0,470	0,790	1,462	6,630	1,105
Partisipasi	1,171	1,210	0,784	1,017	0,179	0,876	5,238	0,873

Keterangan

P1 = Ahli Pertamanan BLH

P2 = Ahli Perencanaan Fisik Bappeda

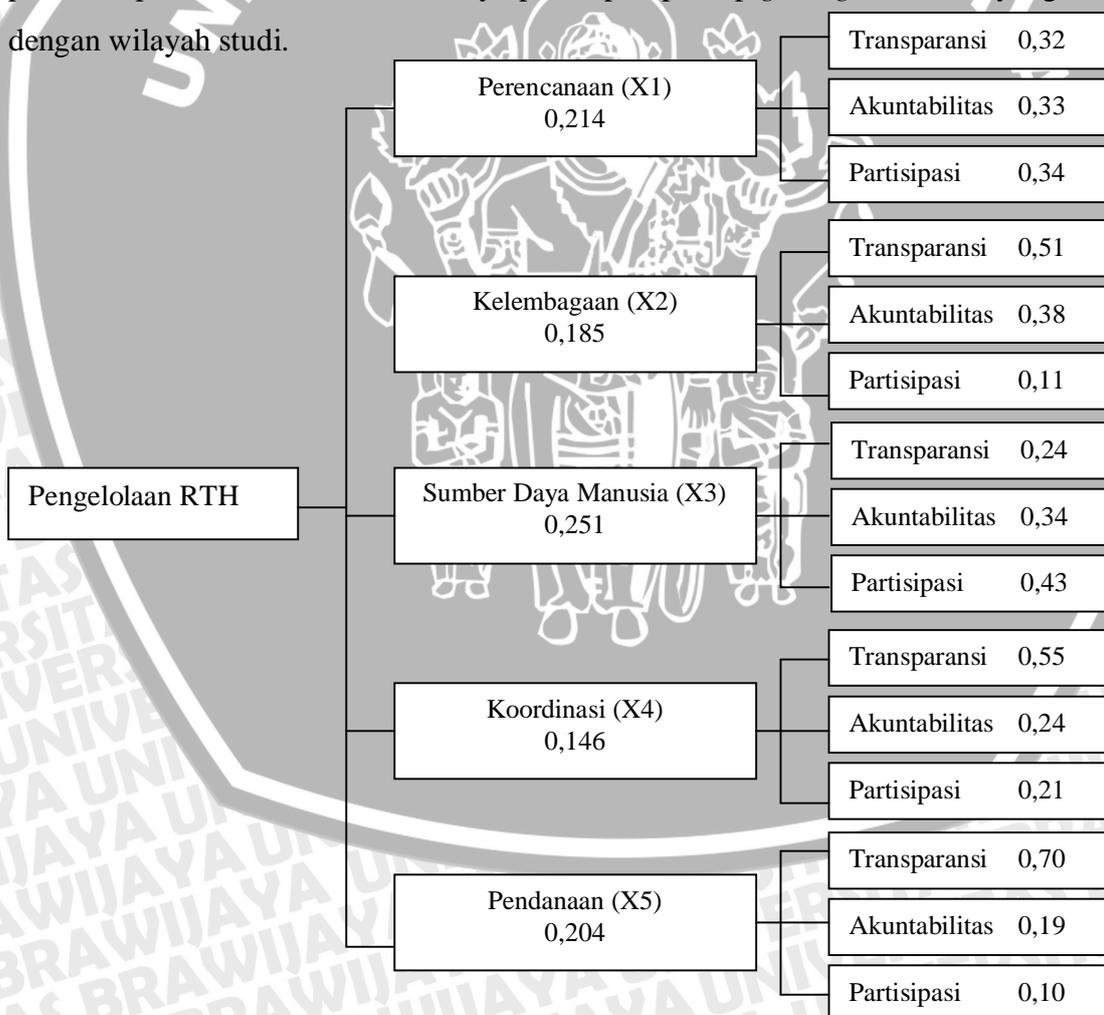
P3 = Ahli Pembangunan Kec Kademangan

P4 = Ahli Pembangunan Kec Mayangan

P5 = Ahli Pembangunan Kec Kedopok

P6 = Ahli Pembangunan Kec Kanigaran

Berdasarkan tabel 4.88, dari ketiga prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, prinsip yang sesuai dengan prioritas menurut sudut pandang semua pendapat ahli dalam studi ini adalah dengan prinsip transparansi. Penilaian tersebut harus dapat diterapkan pada kondisi eksisting wilayah studi dalam hal ini yaitu Kota Probolinggo. Kebutuhan untuk penilaian pada studi ini adalah adanya penerapan prinsip *good governance* yang sesuai dengan wilayah studi.

**Gambar 4. 61 Bagan Hirarki Prioritas Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

4.6 Kesimpulan Hasil Analisis IPA dan AHP

Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo terdiri dari 5 (lima) atribut antara lain perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan. Sedangkan prinsip *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Berdasarkan analisis IPA dan AHP dapat disimpulkan pada tabel 4.89.

Tabel 4. 89 Hasil Analisis IPA dan AHP

No	Atribut	Hasil Analisis IPA	Hasil Analisis AHP
1	Kondisi taman kota	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	
2	Kondisi taman rekreasi	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	
3	Kondisi taman lingkungan perumahan	Kuadran I: Prioritas Utama	
4	Kondisi taman lingkungan perkantoran	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	
5	Kondisi hutan kota	Kuadran I: Prioritas Utama	
6	Kondisi pemakaman umum	Kuadran III: Prioritas Rendah	
7	Kondisi lapangan olahraga	Kuadran IV: Berlebihan	
8	Kondisi lahan pertanian perkotaan	Kuadran IV: Berlebihan	
9	Kondisi RTH jalur tegangan tinggi SUTT	Kuadran IV: Berlebihan	
10	Kondisi RTH sempadan sungai dan pantai	Kuadran III: Prioritas Rendah	
11	Kondisi RTH jalur pengaman jalan, median jalan dan rel kereta api	Kuadran IV: Berlebihan	
12	Fasilitas yang disediakan di taman kota dan taman rekreasi	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	
13	Perencanaan fisik taman kota	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	
14	Perencanaan fisik taman rekreasi	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	
15	Perencanaan fisik taman lingkungan perumahan	Kuadran IV: Berlebihan	
16	Perencanaan fisik taman lingkungan perkantoran	Kuadran IV: Berlebihan	
17	Perencanaan fisik hutan kota	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	
18	Perencanaan fisik pemakaman umum	Kuadran IV: Berlebihan	
19	Perencanaan fisik lapangan olahraga	Kuadran IV: Berlebihan	
20	Perencanaan fisik lahan pertanian perkotaan	Kuadran IV: Berlebihan	
21	Perencanaan fisik RTH jalur tegangan tinggi SUTT	Kuadran III: Prioritas Rendah	
22	Perencanaan fisik RTH sempadan sungai dan pantai	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	
23	Perencanaan fisik RTH jalur pengaman jalan, median jalan dan rel kereta api	Kuadran IV: Berlebihan	
24	Fungsi hutan kota untuk menjaga ekosistem kota	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	
25	Fungsi taman kota, taman rekreasi dan taman lingkungan yang ada di Kota Probolinggo sebagai ruang publik	Kuadran IV: Berlebihan	
26	Keterbukaan/ transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam penyebaran informasi mengenai pengelolaan RTH	Kuadran I: Prioritas Utama	Prioritas pertama
27	Transparansi kelembagaan yang mengelola dan membuat keputusan dalam perencanaan RTH di sekitar lingkungan	Kuadran I: Prioritas Utama	Prioritas pertama
28	Transparansi kelembagaan yang mengelola dan membuat keputusan dalam perencanaan RTH dalam lingkup kota	Kuadran I: Prioritas Utama	Prioritas pertama
29	Kinerja dan kemampuan pengelola RTH di sekitar lingkungan	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	Prioritas ketiga
30	Kinerja dan kemampuan pengelola RTH dalam lingkup kota	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	Prioritas ketiga
31	Transparansi sistem pendanaan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan RTH	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	Prioritas pertama
32	Tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan RTH	Kuadran I: Prioritas Utama	Prioritas kedua

No	Atribut	Hasil Analisis IPA	Hasil Analisis AHP
33	di sekitar lingkungan Tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan RTH dalam lingkup kota	Kuadran I: Prioritas Utama	Prioritas kedua
34	Kesesuaian lahan untuk RTH di Kota Probolinggo	Kuadran I: Prioritas Utama	Prioritas kedua
35	Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan RTH di sekitar lingkungan	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	Prioritas pertama
36	Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan RTH dalam lingkup kota	Kuadran I: Prioritas Utama	Prioritas pertama
37	Kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan RTH di sekitar lingkungan	Kuadran I: Prioritas Utama	Prioritas pertama
38	Kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan RTH di lingkup kota	Kuadran II: Lanjutkan Prestasi	Prioritas pertama
39	Keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran/masukan/usulan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan RTH di sekitar lingkungan	Kuadran I: Prioritas Utama	Prioritas ketiga
40	Keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran/masukan/usulan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan RTH dalam lingkup kota	Kuadran I: Prioritas Utama	Prioritas ketiga

Hasil analisis IPA yang akan dilakukan perbaikan berdasarkan tabel 4.89 diurutkan berdasarkan prioritas adalah sebagai berikut.

1. Kondisi taman lingkungan perumahan
2. Kondisi hutan kota
3. Kondisi taman kota
4. Kondisi taman rekreasi
5. Kondisi taman lingkungan perkantoran
6. Fasilitas yang disediakan di taman kota dan taman rekreasi
7. Perencanaan fisik taman kota
8. Perencanaan fisik taman rekreasi
9. Perencanaan fisik hutan kota
10. Perencanaan fisik RTH sempadan sungai dan pantai
11. Fungsi hutan kota untuk menjaga ekosistem kota

Hasil analisis AHP yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki berdasarkan tabel 4.89 adalah atribut-atribut yang pada analisis IPA berada pada kuadran I yaitu prioritas utama dan pada analisis AHP menjadi prioritas pertama.

1. Keterbukaan/ transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam penyebaran informasi mengenai pengelolaan RTH
2. Transparansi kelembagaan yang mengelola dan membuat keputusan dalam perencanaan RTH di sekitar lingkungan

3. Transparansi kelembagaan yang mengelola dan membuat keputusan dalam perencanaan RTH dalam lingkup kota
4. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan RTH dalam lingkup kota
5. Kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan RTH di sekitar lingkungan
6. Transparansi sistem pendanaan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan RTH
7. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan RTH di sekitar lingkungan anda
8. Kegiatan-kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan RTH di lingkup kota
9. Tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan RTH di sekitar lingkungan
10. Tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan RTH dalam lingkup kota
11. Kesesuaian lahan untuk RTH di Kota Probolinggo
12. Keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran/masukan/usulan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan RTH di sekitar lingkungan
13. Keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran/masukan/usulan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan RTH dalam lingkup kota
14. Kinerja dan kemampuan pengelola RTH di sekitar lingkungan dan dalam lingkup kota

4.7 Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Probolinggo

Strategi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo berbasis *good governance* didapat dari hasil analisis sebelumnya yaitu analisis IPA dan AHP. Strategi pengelolaan ruang terbuka hijau berbasis *good governance* di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut.

4.7.1 Strategi Peningkatan Kondisi dan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan hasil analisis IPA, kondisi taman lingkungan perumahan dan hutan kota menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Berikut ini merupakan strategi peningkatan kondisi ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo.

1. - Melaksanakan program penghijauan pada pekarangan rumah dengan menanam pohon pelindung, perdu maupun tanaman produktif. Apabila tidak memiliki pekarangan yang cukup luas, penghijauan dapat dilakukan dengan sistem potisasi yaitu menanam tanaman pada pot-pot di sekitar halaman rumah atau pekarangan.

- Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengembang perumahan untuk meminimalisir ketidaksesuaian luasan lahan yang digunakan untuk fasilitas umum termasuk ruang terbuka hijau. Apabila pengembang perumahan melanggar ketentuan luasan ruang terbuka hijau, pemerintah dapat memberikan sanksi tegas seperti denda, pidana dan pencabutan ijin developer.

2. Menganekaragamkan jenis vegetasi yang terdapat di hutan kota. Jenis vegetasi yang ada di hutan kota saat ini adalah Tanjung, Glodokan Tiang dan Kenongo. Jenis vegetasi yang akan ditambahkan antara lain Mahoni, Sawo Kecil, Angsana dan Waru Rangsang.
3. Memperbaiki kondisi taman-taman di sepanjang Jalan Hasan Genggong dan Jalan Dr. Hamka dengan menanam kembali taman tersebut untuk mengganti tanaman-tanaman yang telah rusak.
4. Penambahan sarana dan prasarana pada taman rekreasi yang difokuskan pada pembangunan sarana prasarana taman satwa seperti sarana pembuangan limbah satwa.
5. Melaksanakan penghijauan di sekitar halaman perkantoran yang dapat dilakukan dengan membuat taman-taman lingkungan atau dapat juga dilakukan dengan sistem potisasi apabila tidak ada lahan yang dapat digunakan.
6. Memperbaiki fasilitas yang disediakan pada taman kota dan taman rekreasi (seperti bangku taman, fasilitas bermain anak, tempat sampah, dan lain sebagainya) yang sudah tidak layak pakai, serta pemeliharaan dan perawatan fasilitas yang masih layak pakai.
7. Penambahan taman kota. Luas taman kota yang ada saat ini yaitu 5,74 Ha, untuk penambahan taman kota diletakkan pada jalan lingkaran utara dan pada pintu masuk Kota Probolinggo yaitu Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Raya Bromo.
8. Pengembangan taman rekreasi baru (sesuai dengan RTRW Kota Probolinggo Tahun 2009-2028) yang akan diarahkan di utara Kota Probolinggo dengan konsep edukasi terutama sebagai pusat informasi Mangrove.
9. Penambahan hutan kota, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Terbuka Hijau Kota Probolinggo Tahun 2007. Luas hutan kota saat ini yaitu 1,48 Ha, untuk penambahan hutan kota akan didirikan di Kelurahan Kademangan, Kelurahan Wonoasih dan Kelurahan Sukabumi. Penambahan hutan kota akan menggunakan konsep kebun raya yang berorientasi pada aspek edukasi, konservasi dan rekreasi

sehingga hutan kota tersebut dapat dijadikan sarana penelitian khususnya di bidang botani.

10. Penghijauan di sekitar jalur tegangan tinggi (SUTT) dan di sepanjang sempadan sungai dan pantai, serta pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap pelanggaran yang terjadi di sempadan sungai dan pantai terutama di Kecamatan Mayangan yang merupakan pusat Kota Probolinggo.
11. Penambahan jumlah vegetasi di hutan kota yang disesuaikan dengan luas lahan yang ada.

4.7.2 Strategi Peningkatan *Good Governance* dalam Pengelolaann Ruang

Terbuka Hijau

Berdasarkan analisis AHP dan IPA, maka diperoleh strategi untuk meningkatkan *good governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, antara lain:

1. Transparansi kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau seperti RTRW Kota Probolinggo, Rencana Tata Ruang Kawasan Terbuka Hijau kepada masyarakat agar masyarakat yang masih awam terhadap keberadaan kebijakan tersebut dapat memahami pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan ekosistem suatu kota. Transparansi tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan RTH yaitu Bappeda dan Badan Lingkungan Hidup. Dengan adanya transparansi ini diharapkan juga dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan fungsi ruang terbuka hijau sebagai salah satu elemen kota yang sangat penting.
2. Membuat struktur organisasi yang jelas dalam pengelolaan ruang terbuka hijau lingkungan dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Struktur organisasi ini dapat dimulai dari tingkat kelurahan hingga RT, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan RTH di sekitar lingkungannya.
3. - Peningkatan frekuensi pertemuan dan komunikasi rutin institusi atau pejabat yang relevan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau (Bappeda dan Badan Lingkungan Hidup).
- Memantapkan sistem kelembagaan pengelolaan ruang terbuka hijau secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa *stake holders* antara lain pemerintah Kota Probolinggo (Bappeda, BLH); pelaku industri yang tergabung dalam IMF (*Informal Meeting Forum*); LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang peduli terhadap

lingkungan; masyarakat umum Kota Probolinggo; dan pengusaha ekonomi lemah, seperti pedagang kecil dan PKL. Sistem kelembagaan ini memerlukan adanya model kerjasama yang saling menguntungkan, sehingga diharapkan pengelolaan RTH tidak hanya terbatas dari pemerintah kota namun seluruh *stake holders* dapat terlibat langsung dalam pengelolaan RTH di Kota Probolinggo.

4. Melaksanakan forum komunikasi masyarakat kota. Forum ini dibentuk sebagai media untuk menjembatani permasalahan-permasalahan dalam perencanaan dan pembangunan RTH yang dihadapi oleh warga Kota Probolinggo dengan pemerintah dan DPRD. Peran dan fungsi forum adalah melakukan dialog untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan perencanaan dan pembangunan RTH. Forum Komunikasi Masyarakat Kota beranggotakan dari berbagai kalangan diantaranya LSM, organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Forum ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi memberikan usulan dan masukan dalam perencanaan maupun pembangunan RTH.
5. Perlunya perlombaan antar wilayah yang diadakan oleh pemerintah kota dimana pemenang perlombaan dapat diberikan penghargaan berupa uang/ dana yang dapat digunakan untuk mengelola RTH di sekitar lingkungannya, sehingga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau di sekitar lingkungannya.
6. Transparansi pemerintah mengenai pendanaan ruang terbuka hijau, baik mengenai asal dana maupun alokasi penggunaan dana, yang dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui website resmi pemerintah Kota Probolinggo, koran pemerintah serta radio Suara Kota. Selain itu perlunya audit terhadap dana yang dialokasikan untuk ruang terbuka hijau secara berkala yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh akuntan publik yang telah ditunjuk maupun oleh pemerintah pusat melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk menghindari adanya penyelewengan penggunaan dana pengelolaan ruang terbuka hijau.
7. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan ruang terbuka hijau, yang dapat dimulai pada lingkup yang paling kecil seperti RT atau RW. Peran aktif masyarakat dapat diwujudkan dengan memberikan ide/ gagasan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, seperti menentukan kegiatan-kegiatan untuk memelihara ruang terbuka hijau, menentukan lokasi-lokasi pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar lingkungannya, dan lain sebagainya.

8. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya namun masih belum terlaksananya yaitu gerakan Ayo Bersih-Bersih Lingkungan (ABBL) dan Abang Becak Bersih-Bersih Lingkungan. Gerakan ABBL dilaksanakan secara serentak dengan melakukan pembersihan sampah yang tersebar di sekitar lingkungan masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di Kota Probolinggo dan para abang becak. Kegiatan Abang Becak Bersih-Bersih Lingkungan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu yaitu abang becak yang ada di Kota Probolinggo, dimana setelah mereka dilibatkan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan kemudian diberikan reward yang dapat berupa sembako.
9. Mempertahankan rembug kahbi (kampung hijau bersih dan indah). Rembug Kahbi adalah program komunikasi publik untuk mewujudkan kampung hijau bersih dan indah serta mencari penyelesaian permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di sekitar masyarakat yang dilaksanakan secara bergiliran di tiap-tiap kelurahan di Kota Probolinggo.
10. Perlunya pemerintah Kota Probolinggo menyusun Peraturan Daerah tentang perencanaan RTH. Hal ini perlu dilakukan karena saat ini peraturan daerah yang ada yaitu Perda Kota Probolinggo No 19 Tahun 2002 Tentang Penetapan Kawasan Lindung dan Perda Kota Probolinggo No 10 Tahun 2005 tentang Hutan Kota. Lingkup materi dalam kedua perda tersebut meskipun terkait dengan RTH tetapi tidak membahas secara khusus mengenai RTH itu sendiri, karena hutan kota dan kawasan lindung hanya bagian kecil dari bentuk-bentuk RTH.
11. - Pengendalian pemanfaatan RTH sesuai fungsinya, melalui izin dari Kepala Daerah (Walikota Probolinggo) atau pejabat yang ditunjuk (Bappeda dan BLH), serta sanksi hukum yang mengikat. Selain itu diperlukan juga ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan-permasalahan RTH.
- Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan RTH. Sistem insentif yang diberikan berupa kemudahan perizinan kepada swasta/ pengembang perumahan (developer) yang membantu mengembangkan ruang terbuka hijau kota. Sedangkan sistem disinsentif yang diberikan berupa sanksi tegas yang dapat berupa denda maupun hukuman pidana bagi mereka yang melanggar peraturan/ kebijakan mengenai RTH.
12. Pemberdayaan masyarakat untuk memberikan saran/ masukan/ usulan dalam mengevaluasi pengelolaan RTH yang dapat dimulai pada lingkup yang paling kecil

yaitu RT atau RW. Saran/ masukan/ usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh ketua RT atau RW setempat mengenai pengelolaan RTH agar kedepannya RTH dapat berfungsi lebih baik lagi.

13. Mengadakan program komunikasi publik melalui media radio lokal “suara kota Probolinggo”. Walikota didampingi oleh kepala unit kerja BLH dan Bappeda melakukan dialog langsung dengan masyarakat. Instansi terkait memberikan uraian penjelasan tentang pelaksanaan berbagai program dan pelaksanaan pembangunan RTH untuk selanjutnya warga masyarakat Kota Probolinggo memberikan tanggapan melalui telepon. Selain itu masyarakat dapat memberikan pengaduan terhadap permasalahan-permasalahan RTH yang dihadapi dan ditemui untuk dikomunikasikan langsung dengan unit kerja yang menanganinya. Sehingga pada saat itu juga masyarakat mendapatkan respon secara langsung untuk mendapatkan solusi dan penanganannya.

14. - Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia pengelola ruang terbuka hijau, perlu adanya diklat atau penyuluhan dalam rangka penambahan wawasan dan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas serta kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau.

- Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pemeliharaan RTH (pupuk, obat pembasmi hama, mobil tangki air, peralatan penyiangan dan pemangkasan tanaman, dan lain sebagainya), untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pemeliharaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

